



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2024



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya, Kode
Pos 73111

Telp/Fax (0536) 4270391 / Email:
dinkes@kalteng.go.id

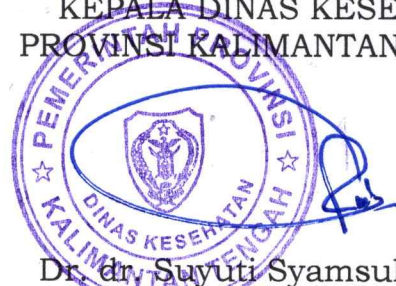
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Palangka Raya, Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja yang dinyatakan berhasil adalah yang capaian kinerjanya ≥ 75 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 ada 4 (empat) sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 120,9 persen (Sangat Berhasil). Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Dengan indikatornya Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) dengan capaian kinerja 104,6 persen (Sangat Tinggi).

2. Perbaiki Gizi Masyarakat.

- a. Dengan indikatornya Persentase Balita *Wasting* dengan capaian kinerja 134,2 persen (Sangat Tinggi).
- b. Dengan indikatornya Persentase Balita *Stunting* dengan capaian kinerja 135,6 persen (Sangat Tinggi).

3. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak.

- a. Dengan indikatornya Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 71,6 persen (Sedang).
- b. Dengan indikatornya Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 109,3 persen (Sangat tinggi).

Capaian indikator didukung oleh 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. *Pertama*, Implementasi program prioritas dengan mengacu pada arah kebijakan Gubernur untuk mewujudkan KALTENG BERKAH dan arahan Menteri Kesehatan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *kedua*, *multiple burden of disease*, yaitu: penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, *new emerging disease*, dan penyakit lama yang muncul kembali, *ketiga*, Beban ganda permasalahan gizi, *keempat*, mewujudkan tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), *kelima* Pemenuhan tenaga kesehatan, sarana prasarana yang berkualitas dan standarisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan	3
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.....	4
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	5
E. Struktur Organisasi	15
F. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra).....	30
B. Strategi dan Sasaran.....	32
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	33
D. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024.....	35
E. Program Prioritas Pusat dan Daerah	36
F. Instrumen Pendukung.....	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	42
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	44
C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024.....	67
D. Efisiensi Anggaran	76
E. Prestasi dan Penghargaan.....	78
F. Inovasi.....	78
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	79
BAB IV. PENUTUP	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	16
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2024	18
Tabel 1.3	Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	19
Tabel 1.4	Jumlah dan Jenis Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	21
Tabel 1.5	Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	24
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	34
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	35
Tabel 2.3	Anggaran Perubahan Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	36
Tabel 3.1	Kategori pencapaian Sasaran.....	42
Tabel 3.2	Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024	43
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup	44
Tabel 3.4	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”	45
Tabel 3.5	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Capaian Nasional dan Target RPJMD Usia Harapan Hidup.....	45
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	

	Persentase Balita <i>Wasting</i> Dan Persentase Balita <i>Stunting</i>	48
Tabel 3.7	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat	49
Tabel 3.8	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Target RPJMD Persentase Balita <i>Wasting</i> dan Persentase Balita <i>Stunting</i>	49
Tabel 3.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Indeks).....	58
Tabel 3.10	Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”	59
Tabel 3.11	Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Target RPJMD Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	60
Tabel 3.12	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	68
Tabel 3.13	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Per Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	69
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2024.....	75
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Tahun 2024.....	76
Tabel 3.16	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.....	46
Gambar 3.2	Perkembangan <i>Wasting</i> di Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024.....	51
Gambar 3.3	Perkembangan <i>Stunting</i> di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024.....	53
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024.....	61
Gambar 3.5	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 (Pejabat Ess II)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Pejabat Ess II, III, & IV)
3. Cascading Kinerja
4. Rencana Aksi
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. SK Tim Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024
7. SK Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025
8. Rencana Kerja Tahunan 2025

BAB.I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja Instansi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga dan institusi pemerintah yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

B. KEDUDUKAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu yang kemudian disempurnakan lagi dengan keluarnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdapat tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dari masing-masing dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan. Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
- g. Pembinaan dan penataan asset/barang milik daerah pada Dinas Kesehatan;
- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pesehatan primer, pelayanan

kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- b. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing UPT adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas: melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan Pemantapan Mutu Eksternal Mikrobiologi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rujukan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai Laboratorium Kesehatan;
- d. Pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- f. Pelayanan pengujian higiene sanitasi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;
- i. Pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
- j. Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
- k. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- l. Pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
- m. Pelaksanaan pemasaran produk Balai Laboratorium Kesehatan;
- n. Penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
- o. Pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
- p. Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
- q. Pelaksanaan ketatausahaan;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Laboratorium Kesehatan; dan

- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Tugas: merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan keterampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
- d. Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehatan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelatihan Kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pusat Pengembangan Obat Tradisional Pada Dinas Kesehatan

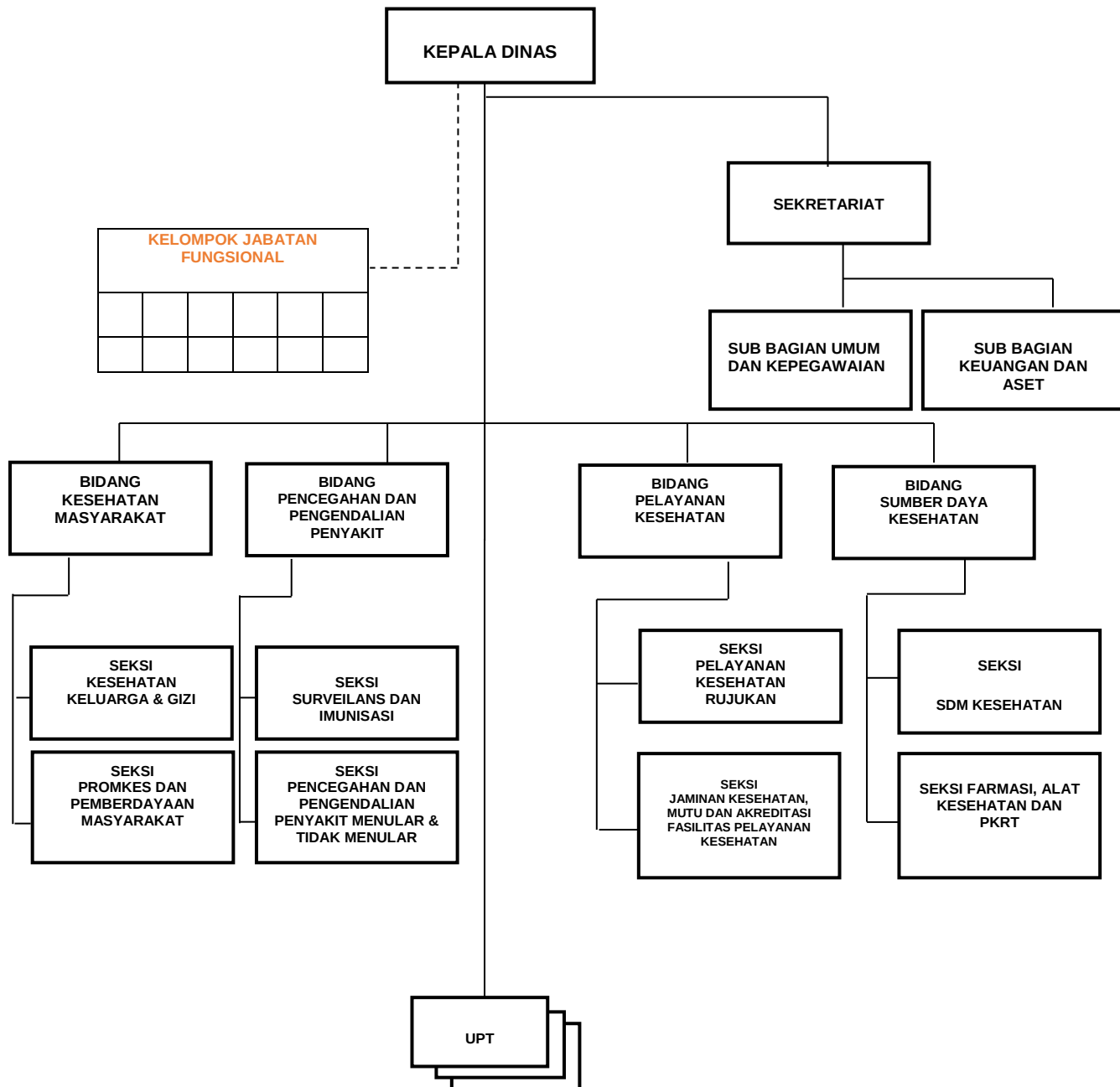
UPT-PPOT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan

terkait penyediaan bahan baku Obat Tradisional dan Pengembangannya

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Daerah;
- b. Pemberian layanan penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar baik itu simplisia maupun produk jadi obat tradisional;
- c. Melaksanakan uji mutu dan kualitas bahan baku serta produk obat tradisional;
- d. Melaksanakan kegiatan kultur jaringan tanaman untuk melestarikan tanaman obat yang ada di Daerah;
- e. Melakukan budidaya tanaman obat tradisional serta pengumpulan tanaman obat tradisional di Daerah;
- f. Melakukan promosi produk obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah melalui produk jamu dan simplisia;
- g. Melaksanakan pengembangan dan penelitian tanaman obat asli indonesia sebagai bahan baku obat tradisional terstandarisasi;
- h. Melaksanakan program saintifikasi jamu obat tradisional asli indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

E. STRUKTUR ORGANISASI



F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Tugas Pokok fungsi dan Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut maka dapat dirumuskan aspek strategis yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal Daerah dan peluang

(*opportunities*) serta tantangan (*threats*) yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kekuatan (*strength*) yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Kelembagaan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Dinas di Provinsi
- 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan;
- 14 (empat belas) Kelembagaan Kesehatan di Kabupaten/Kota

2. Ketenagaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Adapun jumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang di *updating* jumlah kepegawaian pada tahun 2024 sebanyak 157 orang dan dibantu oleh tenaga PHL/Kontrak sebanyak 27 orang. Adapun rincian ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
	Dinkes	
1	Struktural Eselon II	1 Orang
2	Struktural Eselon III	5 Orang
3	Struktural Eselon IV	8 Orang
4	Fungsional :	
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1 Orang
	2) Apoteker Ahli Madya	2 Orang
	3) Apoteker Ahli Muda	2 Orang
	4) Administrator Kesehatan Ahli Madya	4 Orang
	5) Administrator Kesehatan Ahli Muda	15 Orang
	6) Administrator Kesehatan Ahli	2 Orang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

	Pertama	
	7) Sanitarian Terampil	1 Orang
	8) Pranata Komputer Terampil	1 Orang
5	Staff	55 Orang
	UPT. Bapelkes	
1	Struktural Eselon III	1 Orang
2	Struktural Eselon IV	1 Orang
3	Fungsional :	
	1) Administrator Kesehatan Ahli Madya	2 Orang
	2) Administrator Kesehatan Ahli Muda	1 Orang
	3) Widyaiswara Madya	4 Orang
4	Staff	12 Orang
	UPT. Labkeskal	
1	Struktural Eselon III	1 Orang
2	Struktural Eselon IV	3 Orang
3	Fungsional :	
	1) Dokter Madya	2 Orang
	2) Dokter Muda	1 Orang
	3) Elektromedik Lanjutan / Mahir	1 Orang
	4) Pranata Labkes Madya	2 Orang
	5) Pranata Labkes Ahli Muda	3 Orang
	6) Pranata Labkes Penyelia	7 Orang
	7) Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan	4 Orang
	8) Pranata Labkes Pelaksana Terampil	1 Orang
	9) Asisten Apoteker Mahir	1 Orang
	10) Perawat Mahir	3 Orang
	11) Perawat Ahli Madya	1 Orang
	Staff	8 Orang
	UPT. PPOT	
	Struktural Eselon III	1 Orang
	Struktural Eselon IV	3 Orang
	Staff	2 Orang
	JUMLAH	157

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Tabel 1.2
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
	Dinkes	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	1 Orang
	Golongan IV / c	-
	Golongan IV / b	8 Orang
	Golongan IV / a	17 Orang
2	Golongan III / d	30 Orang
	Golongan III / c	14 Orang
	Golongan III / b	12 Orang
	Golongan III / a	12 Orang
3	Golongan II / d	2 Orang
	Golongan II / c	1 Orang
	UPT. Bapelkes	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	3 Orang
	Golongan IV / b	1 Orang
	Golongan IV / a	2 Orang
2	Golongan III / d	2 Orang
	Golongan III / c	4 Orang
	Golongan III / b	1 Orang
	Golongan III / a	5 Orang
3	Golongan II / d	1 Orang
	Golongan II / c	-
	UPT. LABKESKAL	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	-
	Golongan IV / b	1 Orang
	Golongan IV / a	3 Orang
2	Golongan III / d	12 Orang
	Golongan III / c	6 Orang
	Golongan III / b	8 Orang
	Golongan III / a	4 Orang
3	Golongan II / d	-
	Golongan II / c	2 Orang
	UPT. P2OT	
1	Golongan IV / e	-
	Golongan IV / d	-
	Golongan IV / c	-

	Golongan IV / b	-
	Golongan IV / a	2 Orang
2	Golongan III / d	3 Orang
3	Golongan II / c	1 Orang
	JUMLAH	157

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Tabel 1.3
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	Dinkes	
	S3	
	Ilmu sosial sosial dan Politik	1 Orang
	S2	
1	Kesehatan Masyarakat	9 Orang
2	Gizi	1 Orang
3	Ekonomi	1 Orang
4	Akutansi	1 Orang
5	Pendidikan Sains	1 Orang
6	Manajemen Administrasi Publik	4 Orang
7	Ilmu Kesehatan	1 Orang
8	Epidomologi	1 Orang
9	Ilmu Administrasi	1 Orang
10	Kesehatan	2 Orang
11	Manajemen	1 Orang
	S1	
1	Farmasi + Profesi	10 Orang
2	Kedokteran + Profesi	2 Orang
3	Kedokteran Gigi + Profesi	1 Orang
4	Ekonomi	3 Orang
5	Hukum	1 Orang
6	Ilmu Sosial dan Politik	1 Orang
7	Ilmu Sosiologi	1 Orang
8	Akuntansi	1 Orang
9	Informatika	1 Orang
10	Keperawatan	7 Orang
11	Kebidanan	1 Orang
12	Kesehatan Masyarakat	14 Orang
13	Pendidikan Gizi	1 Orang
14	Psikologi	1 Orang
15	Teknik	1 Orang
16	Teknik Lingkungan	1 Orang
	D4	
	Pendidikan Bidan	1 Orang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

	D3	
1	Farmasi	1 Orang
2	Informatika	2 Orang
3	Keperawatan	4 Orang
4	Pendidikan Bidan	3 Orang
5	Kesehatan Lingkungan	1 Orang
	SMA	
1	Sekolah Mengah Atas	10 Orang
	UPT. Bapelkes	
	S2	
1	Kesehatan Masyarakat	3 Orang
2	Pendidikan Sains	2 Orang
3	Pendidikan	1 Orang
4	Administrasi Publik	1 Orang
	S1	
	Ilmu Sosial dan Politik	1 Orang
	Ekonomi	1 Orang
	Ilmu Gizi Kesehatan	1 Orang
	D3	
1	Kesehatan Lingkungan	1 Orang
2	Pendidikan Bidan	1 Orang
3	Keperawatan	1 Orang
4	Informatika	1 Orang
	SMA	
1	Sekolah Menengah Atas	6 Orang
	UPT. Labkes	
	S2	
	Ilmu Kesehatan Lingkungan	1 Orang
	Administrasi Publik	2 Orang
	Pendidikan Sains	1 Orang
	Manajemen Kesehatan	1 Orang
	S1	
1	Kedokteran + Profesi	3 Orang
2	Keperawatan + Profesi	1 Orang
3	Pendidikan Sains	3 Orang
4	Teknik	1 Orang
5	Kesehatan Masyarakat	2 Orang
	D4	
1	Elektromedik	1 Orang
	D3	
1	Analisis Kesehatan	9 Orang
2	Farmasi	1 Orang
3	Keperawatan	2 Orang
4	Pendidikan Kimia	4 Orang

	SMA	
1	Sekolah Menengah Atas	3 Orang
	UPT. PPOT	
	S2	
	Pendidikan Sains	1 Orang
	Magister Farmasi	1 Orang
	S1	
	Kesehatan Masyarakat	1 Orang
	Farmasi	1 Orang
	D3	
	Farmasi	1 Orang
	SMA	
	Sekolah Menengah Atas	1 Orang
	JUMLAH	157

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

3. Sarana dan prasarana

Standarisasi sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani dan rohani, keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat, penataan yang bernilai estetika, dan perkembangan kantor sesuai volume/beban kerja dan struktur organisasi. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Tengah meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan rumah dinas. Adapun kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	5.248	129.103.987.856,01
1	TANAH	14	6.561.117.628,00
1.01	TANAH	14	6.561.117.628,00
2	PERALATAN DAN MESIN	4.677	60.835.003.335,00
2.01	ALAT BESAR	17	3.084.025.451,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

2.02	ALAT ANGKUTAN	94	11.845.076.133,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	105	1.281.226.785,00
2.04	ALAT PERTANIAN	58	405.860.654,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.995	10.454.076.646,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	162	2.056.296.616,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	327	5.052.703.699,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	286	21.908.949.193,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	67	99.014.200,00
2.10	KOMPUTER	503	4.422.820.358,00
2.11	ALAT EKSPLORASI		0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN		0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		0,00
2.16	ALAT PERAGA		0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	57	73.178.600,00
2.18	RAMBU - RAMBU		0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	6	151.775.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	37	55.936.598.453,01
3.01	BANGUNAN GEDUNG	35	55.936.598.453,01
3.02	MONUMEN		0,00
3.03	BANGUNAN MENARA		0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	25	5.651.429.750,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2	597.274.050,00
4.02	BANGUNAN AIR	2	317.047.000,00
4.03	INSTALASI	18	4.442.808.700,00
4.04	JARINGAN	3	294.300.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	495	119.838.690,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	491	102.338.690,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	4	17.500.000,00
5.03	HEWAN		0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN		0,00
5.05	TANAMAN		0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.325	6.537.965.856,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD		1.571.946.800,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	11	1.571.946.800,00
4	ASET LAIN-LAIN		4.966.019.056,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	1.314	4.966.019.056,00
	BARANG EKTRACOMTABLE	4.570	768.240.597

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

4. Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung dengan berbagai sumber anggaran. Salah satu sumber dana tahun 2024 adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2023 dimana dana tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam TAPKIN yang telah di tanda tangani bersama antara Kepala OPD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran akuntabilitas keuangan (realisasi keuangan) masing-masing program dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yang termuat dalam Penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 82.187.760.648 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 73.396.324.897 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,30%, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Ringkasan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan	1.307.100.000	1.566.486.000	119,84
Belanja	82.187.760.648	73.396.324.897	89,30
Belanja Operasional	78.496.584.767	70.370.493.072	89,65
Belanja Modal	3.691.175.881	3.025.831.825,00	81,97
Belanja Tidak Terduga	0	0	0
Belanja Transfer	0	0	0

Sumber: Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2024.

Kelemahan (*weaknesses*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan bagi pejabat/petugas untuk mengembangkan kemampuan serta masih rendahnya kapabilitas.
2. Terbatasnya jumlah tenaga ASN kesehatan dan pengembangan kompetensi untuk setiap ASN.
3. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kemudian aspek strategis eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

- a. Rencana Strategis Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) yang menempatkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan adalah program pokok dan prioritas untuk dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Keberadaan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPTD) yang mendukung program/kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
- c. Dukungan kerjasama Internasional dan Nasional untuk membantu di sektor kesehatan seperti *Global Found* yang terlibat dalam penanggulangan HIV AIDS, TB Malaria.
- d. Dukungan Pendanaan dari beberapa sumber dana transfer pusat seperti DAK, DID, DAU, DBH-DR, Dana Desa dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan juga dukungan pendanaan BTT.

Sedangkan aspek strategis eksternal yang merupakan tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Kualitas sebagian besar sumber daya manusia kesehatan yang masih rendah, hal ini sangat berpengaruh pada keterampilan dan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Adanya permasalahan gizi di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dimana angka *wasting*, *stunting* dan gizi lebih pada balita masih diatas angka nasional sehingga perlu adanya penanganan yang serius.
3. Capaian AKI dan AKB yang belum maksimal, karena kasus kematian yang tercatat baik ibu dan bayi adalah yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Cakupan UCI yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Rasio dokter dan tenaga kesehatan strategis lainnya per 100.000 penduduk yang belum tercapai sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal.
6. Isu-isu strategis bidang kesehatan yang berkembang seperti Program Indonesia Sehat berbasis pendekatan keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).
7. Adanya bencana Banjir yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Tengah.

Isu jumlah kematian ibu dan bayi serta isu status gizi masyarakat masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak gizi pada ibu hamil, bayi, balita, dan anak merupakan inverstasi besar bagi pembangunan nasional. Peningkatan status gizi masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan gizi.

Selain itu, isu perubahan paradigma dan penganggaran yang lebih di prioritaskan yaitu pelayanan preventif dan promotif, akreditasi sarana pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan program kesehatan berbasis keluarga.

Tantangan lain pembangunan kesehatan ke depan yang masih memerlukan upaya dan kerja keras adalah pengendalian program penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan penyehatan lingkungan. Penyakit menular seperti AIDS, TB, dan malaria di Kalimantan Tengah masih menjadi prioritas pembangunan kesehatan ke depan. Penyakit-penyakit infeksi telah banyak menurun walaupun belum semua dapat dieradikasikan. Namun ke depan penyakit-penyakit degeneratif/penyakit tidak menular berpotensi besar sebagai penyebab kematian di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Kebiasaan

masyarakat sangat besar peranannya dalam menyehatkan lingkungan, untuk itu peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini.

Tantangan besar yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah adalah masih belum terpenuhinya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih perlu pembenahan. Untuk itu ke depan, akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkannya.

Adapun potensi kendala yang akan dihadapi untuk tercapainya indikator sasaran antara lain:

1. Sistem pencatatan dan pelaporan yang masih belum maksimal sehingga data yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
2. Keadaan ekonomi masyarakat yang menurun sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai jaminan pembiayaan kesehatan.
3. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal, karena banyak dalam pencapaian suatu indikator kesehatan melibatkan sektor terkait.
4. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat.
5. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang.
6. Masih kurangnya SDM di Fasilitas Kesehatan serta menumpuknya tenaga kesehatan di perkotaan.
7. Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan belum menjadi prioritas.

8. Banyak penduduk yang masih belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
9. Masih banyak penduduk yang belum berminat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagian masyarakat belum memenuhi Kriteria kepesertaan sesuai standar Dinas Sosial dan Dukcapil.
10. Beberapa kabupaten kota belum mengalokasikan anggaran APBD untuk JKN.
11. Kurangnya minat dokter spesialis untuk ditempatkan di kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dan kurangnya kemampuan daerah untuk mendatangkan tenaga dokter spesialis dasar maupun spesialis penunjang untuk di tempat di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten.

BAB. II.

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Adapun untuk rencana strategis dalam penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 kita masih menggunakan Renstra 2021-2026.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi, Misi dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui

pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

B. STRATEGI DAN SASARAN

1. Strategi

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09.
- b. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%.
- c. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
- d. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
- e. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan OPD sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat OPD sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan

kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan naskah asli yang telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam lampiran, Tahun 2024.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Kesehatan				
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70.44
2.	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7.3
3.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	16
4.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6.7
5.		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	128

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

D. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Cara Perhitungan
Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70.44	Tahun	Jumlah Umur orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu di bagi dengan Jumlah orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu
Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7.3	Persen	(Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
	Persentase Balita Stunting	16	Persen	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah dibagi jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6.7	Indeks	(Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 1000
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128	Indeks	(Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Provinsi Kalimantan Tengah

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

				oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 100.000
--	--	--	--	---

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Anggaran Program Prioritas :

Tabel 2.3
Anggaran Perubahan Program Prioritas Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.382.436.902	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.994.620.253	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.288.653.493	
4	Program Sediaan Framasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	127.050.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395.000.000	
T O T A L		82.187.760.648	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Total Anggaran perubahan Tahun 2024 untuk Program Prioritas berjumlah Rp. **82.187.760.648,-** (*Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

E. PROGRAM PRIORITAS PUSAT DAN DAERAH

Tujuan pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program Prioritas Nasional dan Daerah merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan nasional dan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pada periode 2020-2024, program prioritas nasional bidang kesehatan meliputi:

1. Penurunan kematian maternal,
2. Penurunan kematian bayi,
3. Penurunan *stunting*,
4. Penurunan *wasting*, dan
5. Pengendalian penyakit.

Sedangkan program prioritas daerah Provinsi Kalimantan Tengah bidang kesehatan periode tahun 2021-2026 meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, serta bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang terlayani 100%.
2. Meningkatkan rasio tempat tidur rumah sakit per jumlah penduduk, dengan kondisi saat ini sebesar 0,94 diharapkan pada tahun ke 5 menjadi 1.24.

3. Meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan.
4. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi/Balita (*Stunting, Wasting, AKB dan AKI*).
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Puskesmas.
6. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular.
7. Tersedianya Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi menjadi rujukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Meningkatnya persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, dengan kondisi saat ini sebesar 83% diharapkan pada tahun ke 5 menjadi 98%.
9. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
10. Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dan Terstandarisasi.
11. Meningkatkan Pengembangan Obat Tradisional di Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Peningkatan Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.
14. Penguatan Jejaring *Public Safety Center* (PSC) 119.
15. Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

F. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024

Instrumen yang mendukung penerapan SAKIP di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat website www.dinkes.kalteng.go.id Website ini menyediakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan (profil

kesehatan) dan data yang mendukung kesehatan dan layanan aduan.

2. Aplikasi E Sakip yang bisa diakses melalui website: <http://esakip.dinkes.kalteng.go.id> Aplikasi ini dikembangkan sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
3. Komunikasi Gizi yang bisa diakses melalui website: www.sigizi.kemendes.go.id yang berisi website yang dikembangkan Kementerian Kesehatan untuk pelaporan terpadu program gizi yang berisikan tabel indikator, grafik indikator dan laporan kegiatan.
4. Komunikasi Data (Komdat): Sistem informasi untuk menyampaikan laporan capaian program tentang derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan. Situs ini dapat dibuka melalui *website* www.komdat.kemkes.go.id
5. SPM (Standar Pelayanan Minimal): Sistem informasi capaian SPM kabupaten/kota dan SPM Provinsi melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home/login>.
6. Pelaporan terpadu TB: SITTB (Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis) adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan Kementerian kesehatan.
7. Kesehatan berupa software TB elektronik yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data untuk penyelesaian laporan triwulan penemuan kasus, hasil konversi, dan hasil pengobatan TB.
8. SIHA (Sistem Informasi HIV dan AIDS): software sistem pencatatan dan pelaporan terpadu yang dikembangkan

Kementrian Kesehatan untuk program HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual.

9. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) adalah suatu program aplikasi komputer untuk pelaksanaan kegiatan menghimpun data PNS, merekam perubahan, serta menyimpan dalam satu database. Dari database dapat dijadikan sumber data dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan output yang dapat dijadikan informasi kepegawaian.
10. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (*SIPD*) adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi ini dapat diakses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (kemendagri.go.id). = <https://kaltengprov.sipd.kemendagri.go.id/>

BAB.III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024***

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Penilaian keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan Skala Ordinal yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1: Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 90 %	Sangat Tinggi (sangat berhasil)
II	75% s/d 90%	Tinggi (berhasil)
III	65% s/d 75%	Sedang (cukup berhasil)
IV	50% s/d 65%	Rendah (kurang Berhasil)
V	< 50 %	Sangat Rendah (tidak berhasil)

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	70,27	70,44	73,73	104,6	Sangat tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	5,5	7,3	4,8	134,2	Sangat tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	12,1	16	10,3	135,6	Sangat tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	7,5	12,69	6,7	8,6	71,6	Sedang
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	179,3	128	116	109,3	Sangat tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.

Hasil analisis 3 (tiga) sasaran strategis Dinas kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah berikut:

1. Evaluasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan** diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu: Umur Harapan Hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Jumlah Umur orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu di bagi dengan Jumlah orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 104,6 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Tinggi).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Usia Harapan Hidup	Tahun	70,04	70,27	70.44	73.73	104.6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Capaian Nasional dan Target RPJMD Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Nasional	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan
Usia Harapan Hidup	72,39	70.44	73,73 Tahun	Sudah di atas capaian nasional

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Angka Usia Harapan Hidup

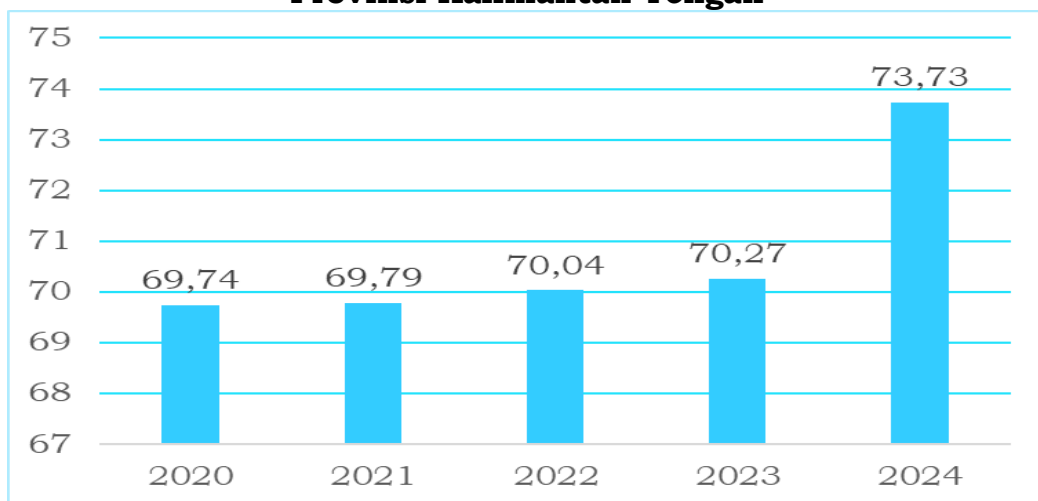
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2024 sebesar 70,44 tahun dengan capaian 73,73 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.1 Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Gambar diatas diketahui ada peningkatan usia harapan hidup diprovinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS pada Tahun 2024 Realisasi UHH telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 73,73 dari target 70,44 dengan capaian kinerja sebesar 104,6% atau melebihi target, Capaian UHH Tahun 2024 meningkat 3.46 poin bila dibandingkan dengan capaian UHH tahun 2023 sebesar 70,04. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kalimantan Tengah rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 73,73 tahun.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya pembangunan Rumah sakit Provinsi di Wilayah Barat yang telah mencapai tahap penyelesaian. Tahun 2024 jumlah sarana pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Rumah sakit sebanyak 33 unit, 204 puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 1.147 unit, Unit Transfusi darah 14 unit dan Laboratorium Kesehatan daerah sebanyak 15 unit.
2. Dalam mendukung indikator Usia Harapan Hidup capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap beberapa faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas adalah:
 - a. Menurunnya persentase balita *wasting* dan *stunting* adalah karena jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya sistem

surveilans gizi. Sistem ini mulai berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu meningkatnya daya beli masyarakat memberikan kontribusi dalam pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat keluarga yang berimplikasi pada kecukupan nilai gizi anggota keluarga.

- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal dan perinatal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi dapat langsung tertangani dengan baik, sehingga menurunkan jumlah kematian pada ibu dan bayi.

2. Evaluasi Sasaran Perbaikan Gizi Masyarakat

Tolak ukur capaian sasaran “**Perbaikan Gizi Masyarakat**” diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu: Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Wasting	(Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
		2. Persentase Balita Stunting	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah dibagi jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Kinerja sasaran **“Perbaikan Gizi Masyarakat”** dengan indikator persentase balita *wasting* dan persentase balita *stunting* pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Persentase balita *wasting* dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 134,2 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil) 2. Persentase balita *stunting* dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 135,6 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Persentase Balita <i>Wasting</i>	Persen	5,7	5.5	7,3	4,8	134.2
2. Persentase Balita <i>Stunting</i>	Persen	12,5	12.1	16	10,3	135,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Target RPJMD Persentase Balita *Wasting* dan Persentase Balita *Stunting*

Indikator Kinerja	Target Nasional	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan
1. Persentase Balita <i>Wasting</i>	7 Persen	7,3 Persen	4,8 Persen	Tercapai
2. Persentase Balita <i>Stunting</i>	14 Persen	16 Persen	10.3 Persen	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Balita *Wasting*

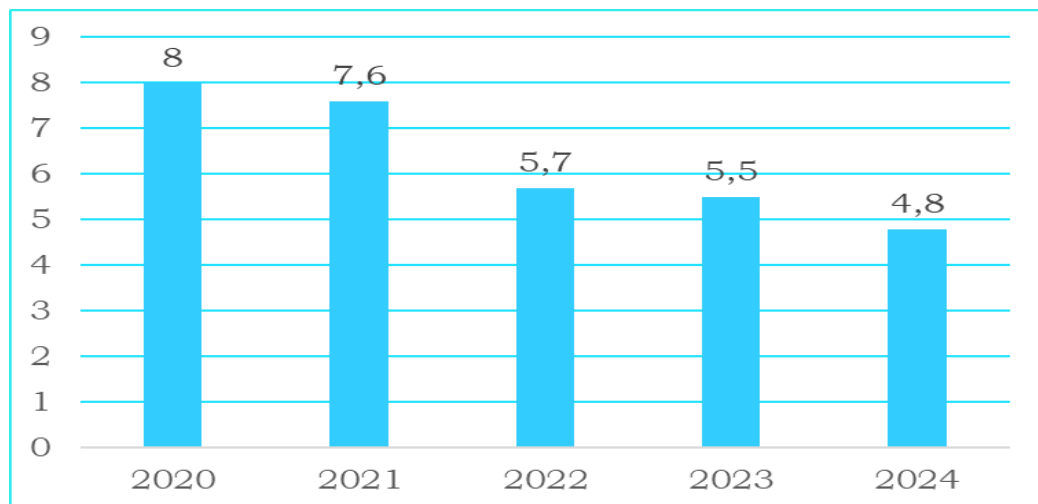
Wasting adalah permasalahan kesehatan yang paling menonjol di negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang yang dampaknya sangat besar. *Wasting* memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak bahkan meningkatkan resiko kematian anak. Anak-anak yang *wasting* akan mudah terkena penyakit infeksi hal ini karena sistem kekebalan tubuh anak yang menurun. Jika Kondisi kurang gizi pada usia anak balita terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatannya dimasa depannya.

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu *wasting* biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. *Wasting* tidak dapat dianggap sepele sebab jika penanganannya terlambat bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Anak yang menderita stunting akibat kekurangan zat gizi protein secara kronis atau anak yang mengalami *wasting* akibat kehilangan berat badan secara akut dapat dimasukkan ke dalam kriteria anak gizi kurang atau *underweight*. Sebaliknya anak yang memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan seharusnya pada usia tersebut maka disebut anak menderita obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan yang diukur berdasarkan standar WHO.

Perkembangan kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi *wasting* sebesar 8 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7,6 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 menjadi 4,8 persen. Data prevalensi *wasting* yang digunakan bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Penurunan prevalensi *wasting* pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan pemenuhi hygiene dan

sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan *wasting* pada balita.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya *weight faltering* (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada dibawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu. Untuk anak yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*), dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan. Petugas gizi bersama lintas program dan lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalan data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah. Upaya lainnya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan berupa biskuit kepada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurang. Pemberian PMT balita gizi kurang diharapkan mampu mencegah kejadian gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk dan gizi kurang. Pendampingan dilakukan untuk memantau asupan, pola asuh, dan kesehatan lingkungan yang dilakukan keluarga kepada anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang.

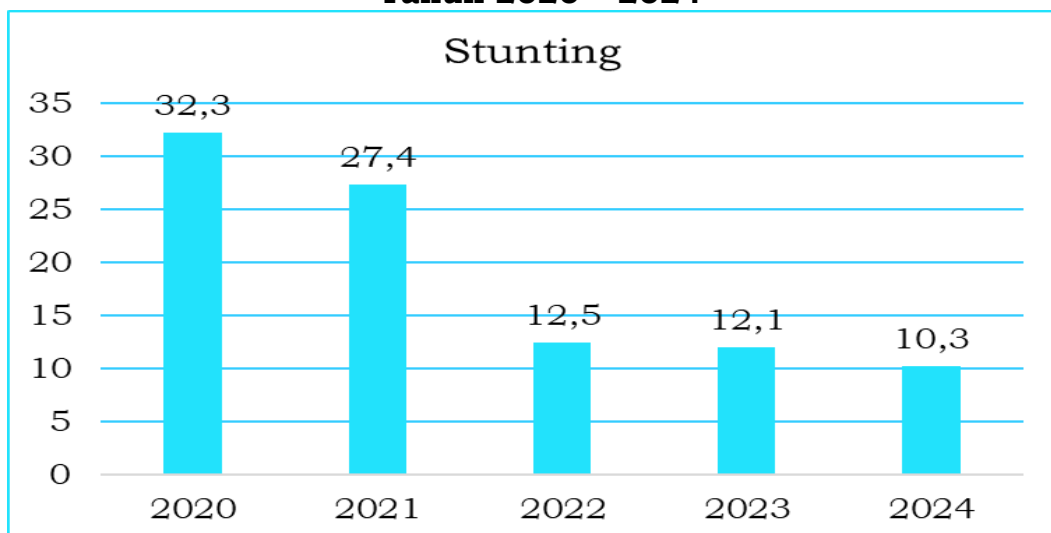
b. Prevalensi *Stunting* (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia

masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan (Aryastami dan Tarigan, 2017). Balita pendek mencakup dua kategori yaitu pendek dan sangat pendek, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang atau tinggi badan menurut umur balita terhadap standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005 yang memiliki nilai *z-score* yang berada kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) dikategorikan sebagai (pendek/*stunted*) atau memiliki nilai *z-score* yang berada kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) yang dikategorikan sebagai (sangat pendek/*severely stunted*) (Antonio, W. H. O. & Weise, S, 2012).

Perkembangan kasus *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan *stunting* tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3 Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 32,3

persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27,4 persen dan kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen dan pada tahun 2023 menjadi 12,1 persen kemudian turun kembali menjadi 10,3 persen pada tahun 2024. Penurunan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 disebabkan karena penggunaan data *stunting* yang bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas Kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Tingginya tingkat capaian pada sasaran perbaikan gizi masyarakat disebabkan penanganan gizi kurang, gizi buruk dan gizi pendek dipelayanan kesehatan dasar maupun rujukan sudah lebih optimal, terlatihnya tenaga gizi dan dokter spesialis anak dalam penanganan gizi balita, pemberian makanan tambahan kepada balita sejak terdeteksi kurus untuk mencegah terjadinya gizi buruk, adanya program peningkatan program ASI eksklusif dan partisipasi masyarakat.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. 8000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah periode waktu sejak terjadinya konsepsi hingga anak berusia 19 tahun. Program 8000 HPK merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk mencegah *stunting* dan mempersiapkan generasi unggul. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung *stunting* yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran antara lain:

Faktor pendukung tercapaiannya sasaran kinerja terkait dengan perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi sensitif dan spesifik stunting menurut Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain:

1. Remaja Putri

Intervensi spesifik yang dilakukan pada remaja putri antara lain melakukan screening status Hb, melakukan screening kesehatan remaja di sekolah, adanya posyandu remaja di wilayah, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri di sekolah dan di wilayah, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), KIE tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang, PHBS, Germas. Intervensi sensitifnya antara lain: Edukasi literasi gizi melalui kegiatan AKSI bergizi di sekolah, Posyandu Remaja.

2. Calon Pengantin

Intervensi spesifik yang dilakukan pada calon pengantin antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas, konseling gizi, konseling persiapan pernikahan melalui psikologi, suplementasi TTD untuk mencegah anemia dan suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan pada calon pengantin antara lain pendataan calon pengantin oleh kelurahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA.

3. Ibu Hamil

Intervensi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil antara lain ANC terpadu, konseling gizi, kelas ibu, suplementasi TTD dan asam folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Intervensi sensitifnya antara lain: Kader Pendampingan ibu hamil, peningkatan akses air minum yang aman, peningkatan akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses bantuan uang tunai untuk keluarga

kurang mampu (PKH), pemberian bantuan protein hewani berupa telur, ayam, dan lele untuk ibu hamil.

4. Ibu Menyusui

Intervensi spesifik yang dilakukan ibu menyusui antara lain Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk merangsang produksi ASI, pemberian TTD 40 tablet dan vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul untuk memulihkan kesehatan ibu nifas, promosi dan konseling menyusui. Intervensi sensitif yang dilaksanakan antara lain: kelas ibu, kelompok pendukung ibu, kader pendamping ibu menyusui, akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)

5. Balita

Intervensi spesifik yang dilakukan pada balita antara lain

- 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu atau fasyankes
- 2) Promosi dan konseling Pemberian Makan untuk Bayi dan Anak (PMBA)
- 3) Suplementasi Vitamin A
- 4) Suplementasi zinc untuk diare
- 5) Tatalaksana gizi buruk akut
- 6) Pencegahan kecacingan
- 7) Pemberian Makanan Tambahan
- 8) Imunisasi
- 9) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah

1. Orang tua balita tidak merasa anaknya bermasalah gizi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena ibu balita tidak memiliki timbangan dan alat ukur

panjang/tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan mandiri merupakan pemantauan pertumbuhan yang dilaksanakan secara mandiri oleh ibu atau pengasuh balita di rumah, kemudian data BB dan atau TB disetorkan/dilaporkan kepada kader. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi balita yang tidak dapat hadir ke posyandu ketika jadwal posyandu agar tetap tercatat berat dan tinggi badannya. Namun masih terdapat kelemahan dalam pemantauan mandiri, antara lain:

- a. Alat timbang yang digunakan belum standar (menggunakan timbangan injak kamar mandi, dimana deviasinya sampai 500 gram).
 - b. Cara membaca angka pada timbangan yang kurang tepat (mata tidak sejajar dengan skala timbangan).
 - c. Alat ukur panjang atau tinggi badan yang digunakan tidak standar (menggunakan metline/pita ukur yang tidak dipasang dengan benar).
 - d. Kesalahan teknis pengukuran sehingga meningkatkan risiko data yang kurang valid.
 - e. Saat penimbangan dan pengukuran masih menggunakan pakaian tebal, popok sekali pakai, alas kaki, topi, kuncir rambut, saku baju/celana tidak dalam kondisi kosong, dsb.
3. Kurangnya pemanfaatan buku KIA. Pencatatan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di buku KIA tidak lengkap sehingga deteksi dini gagal tumbuh (*weight faltering*) di posyandu tidak berjalan optimal. Balita tidak naik (T) belum dirujuk ke puskesmas.
 4. Konseling/penyuluhan gizi di meja 4 posyandu belum berjalan dengan baik.
 5. Masih rendahnya cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N).

6. Belum semua balita bermasalah gizi datang ke puskesmas untuk dilakukan validasi dan assesment.
7. Balita tidak memiliki dokumen kependudukan/tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.
8. Balita dari pernikahan remaja (ibu masih bersekolah).
9. Adanya lebih dari 1 balita stunting dalam 1 keluarga.
10. Ibu balita yang bekerja menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anaknya kepada pengasuh balita tanpa dibekali arahan terkait pemberian makan.
11. Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak.
12. Petugas belum optimal dalam mendampingi balita bermasalah gizi

3. Evaluasi Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Tolak ukur capaian sasaran “**Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak**” diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu: Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (indeks) dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	(Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 1.000
		2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	(Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di

		(indeks)	Provinsi Kalimantan Tengah oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 100.000
--	--	----------	--

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Kinerja sasaran **“Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”** dengan indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (indeks) dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks) pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 71,6 persen dengan predikat sedang (cukup berhasil) 2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 109,3 dengan predikat Sangat tinggi (sangat berhasil).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator Sasaran “Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak”

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	(indeks)	7,3	12,69	6,7	8,6	71,6
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	(indeks)	146	179,3	128	116	109,3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Target RPJMD Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator Kinerja	Target Nasional	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan
1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	16	6,7	8,6	Belum Tercapai untuk Target RPJMD
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	183	128	116	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

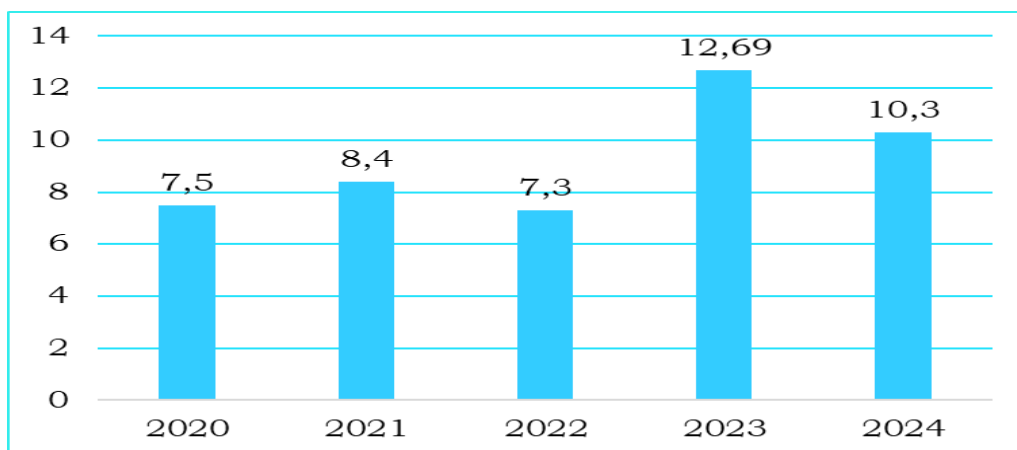
Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita

(AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Gambaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.

Gambar 3.4 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan perkembangan angka kematian pada bayi yang mengalami sedikit mengalami fluktuasi namun capaian yang telah diperoleh jauh dibawah target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi berada pada angka 7,5 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,3 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023

menjadi 12,69 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan capaian AKB pada tahun 2024 turun menjadi 8,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,3. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 berjumlah 448 bayi. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 69 bayi, kemudian Kota Palangka Raya sebanyak 61 bayi dan Kabupaten Kapuas sebanyak 59 bayi. Jumlah kematian bayi paling sedikit terjadi di Kabupaten Sukamara sebanyak 9 bayi. Penyebab utama kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab lain-lain sebesar 137 bayi (30,17 persen), Asfiksia sebanyak 133 bayi (29,29 persen) dan Berat Badan Lahir Rendah/dan prematuritas (27,75 persen). Berdasarkan data diatas masalah kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya.

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

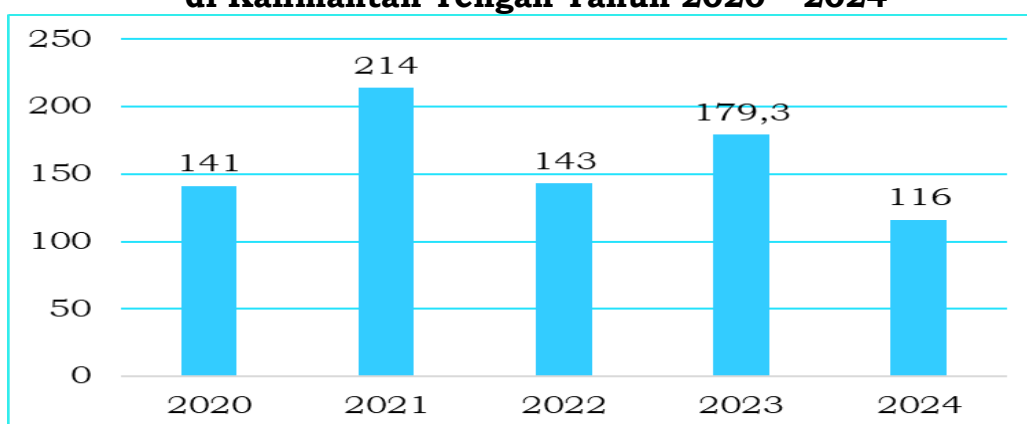
Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah

melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Gambaran AKI di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini.

Gambar 3.5 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang terjadi cukup fluktuatif, pada tahun 2020 angka kematian ibu berada pada angka 141 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 kemudian turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 179,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 kemudian turun kembali menjadi 116 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Terkait dengan target dan realisasi indikator sasaran angka kematian ibu untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, sudah melebihi atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian juga jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu faktor

sosiokultural dan faktor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan faktor sosial budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan sekunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONED/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.
- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.

- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penanganan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).

Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode *blended learning*,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan

pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2023 dimana dana tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja yang telah di tanda tangani bersama antara Kepala OPD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran akuntabilitas keuangan (realisasi keuangan) masing-masing program dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yang termuat dalam Penetapan Kinerja (PK).

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mengampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan serta P2TO, sedangkan pagu anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 82.187.760.648,- (***Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah***), realisasi sampai dengan 31

Desember 2024 sebesar Rp. 73.396.324.897 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 89,30 persen dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.382.436.902	38.282.151.549	92,51
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.994.620.253	28.576.610.886	84,06
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.288.653.493	6.044.847.762	96,12
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	114.834.200	90,39
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395.000.000	377.880.500	95,67
T O T A L		82.187.760.648	73.396.324.897	89,30

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024**

No	Program	*Kegiatan	*Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			41.382.436.902	38.282.151.549	92,51	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		254.482.700	208.389.428	81,89	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.982.700	160.714.028	96,25	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	4.815.000	48,15	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.386.200	93,86	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.500.000	33.474.200	49,59	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29.767.723.992	27.517.789.405	92,44	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.247.955.192	24.998.134.905	91,74	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.346.400	4.335.250	99,74	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.937.250	99,37	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	5.422.400	5.382.000	99,25	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		240.464.600	224.352.172	93,30	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.121.500	5.071.600	99,03	
			Pengamanan Barang		15.248.072	50,83	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

			Milik Daerah SKPD	30.000.000			
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	201.356.700	200.046.500	99,35	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.986.400	3.986.000	99,99	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		450.110.725	436.866.746	97,06	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	165.110.725	162.974.813	98,71	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	260.000.000	256.727.228	98,74	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	17.164.705	68,66	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.245.397.118	2.068.981.491	92,14	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144.020.038	126.657.800	87,94	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	115.382.800	76,92	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	115.027.940	95,86	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	107.006.050	71,34	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000	120.000.000	100,00	
			Penyediaan Bahan/Material	314.697.080	312.075.200	99,17	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	93.417.950	62,28	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	879.000.000	863.587.067	98,25	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	24.865.684	99,46	

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	192.680.000	190.961.000	99,11	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.927.957.560	2.730.672.623	93,26	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.249.116.000	1.246.744.000	99,81	
			Pengadaan Mebel	237.843.632	235.262.000	98,91	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	302.038.348	297.865.623	98,62	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.138.959.580	950.801.000	83,48	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.766.307.920	3.568.825.603	94,76	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.857.500	98,58	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.379.000.000	1.366.584.851	99,10	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000	79.199.300	83,37	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.282.307.920	2.113.183.952	92,59	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.729.992.287	1.526.274.081	88,22	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.730.000	220.821.571	88,07	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	97.902.200	97,90	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.319.262.287	1.167.550.310	88,50	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	60.000.000	40.000.000	66,67	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			33.994.620.253	28.576.610.886	84,06	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7.245.665.699	6.481.155.509	89,45	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.132.186.735	994.990.878	87,88	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	638.456.367	42.663.700	6,68	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.585.398.797	1.575.759.800	99,39	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.053.046.167	1.042.239.100	98,97	
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.836.577.633	2.825.502.031	99,61	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		26.199.687.750	21.580.179.993	82,37	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.698.019.407	464.797.244	17,23	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	176.784.178	173.107.000	97,92	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.323.276.775	1.271.272.256	96,07	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	135.000.000	127.814.000	94,68	

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	277.072.000	273.906.132	98,86	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	563.990.000	557.792.320	98,90	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	210.869.031	203.613.413	96,56	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	346.464.000	325.630.900	93,99	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	480.274.369	438.106.500	91,22	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	94.000.000	93.240.780	99,19	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	882.708.096	853.710.337	96,71	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	47.000.000	46.383.500	98,69	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	37.000.000	36.540.000	98,76	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.862.180.458	12.826.254.696	86,30	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	801.357.358	785.720.233	98,05	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.267.666.150	1.235.879.195	97,49	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.417.300.000	1.308.153.747	92,30	
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	470.925.478	451.078.540	95,79	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	52.800.450	52.392.600	99,23	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan	55.000.000	54.786.600	99,61	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

			Keluarga				
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		130.720.000	121.270.766	92,77	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	130.720.000	121.270.766	92,77	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		418.546.804	394.004.618	94,14	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	167.689.000	166.452.000	99,26	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	250.857.804	227.552.618	90,71	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			6.288.653.493	6.044.847.762	96,12	
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		4.947.048.044	4.823.231.261	97,50	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.874.048.044	4.753.121.261	97,52	
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	73.000.000	70.110.000	96,04	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1.341.605.449	1.221.616.501	91,06	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	674.000.000	588.359.130	87,29	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	667.605.449	633.257.371	94,86	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			127.050.000	114.834.200	90,39	
		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		127.050.000	114.834.200	90,39	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan	127.050.000	114.834.200	90,39	

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

			Cabang PAK				
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			395.000.000	377.880.500	95,67	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		50.000.000	48.735.500	97,47	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	48.735.500	97,47	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		345.000.000	329.145.000	95,40	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	345.000.000	329.145.000	95,40	
TOTAL				82.187.760.648	73.396.324.897	89,30	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,44	73,73	104,6	82.187.760.648	73.396.324.897	89,30
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,3	4,8	134,2			
		Persentase Balita Stunting	16	10,3	135,6			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,7	8,6	71,6			

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128	116	109,3			
--	--	--	-----	-----	-------	--	--	--

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

D. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (84,06%) 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (96,12%) 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (90,39%) 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (95,67%) 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (92,51%)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (15,94%) 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (3,88%) 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (9,61%) 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (4,33%) 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (7,49%)
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persentase Balita Wasting		
		Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting		
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Persentase Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 sasaran strategis dengan 4 sasaran **berpredikat sangat tinggi** dan 1 sasaran **berpredikat sedang**, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran a) “Meningkatnya kualitas kesehatan” b) “Perbaikan gizi masyarakat” dan c) “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

1. Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat: sebesar 15,94% efisiensi tersebut diantaranya terdapat pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
2. Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: 3,88%. Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Efisiensi anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman: 9,61% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

4. Efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan: 4,33% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
5. Efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi: 7,49% efisiensi program pendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

E. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024 yaitu:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Peringkat XIII Informatif tahun 2024.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) Award 2024.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih kategori “**Baik**” Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK tahun 2024.

F. Inovasi

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia bukan sebagai penghambat dalam mencapai sasaran kinerja, bahkan dapat sebagai pemicu

berbagai ide kreatif dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai inovasi sebagai upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan:

1. Penggunaan aplikasi E SAKIP sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
2. Penggunaan aplikasi STR-Metal yaitu sebuah aplikasi untuk legalisir STR melalui digital, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan legalisir tanpa harus ke Dinas Kesehatan Provinsi.

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 3.16 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1.	Membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan menggambarkan ketercapaian Kinerja dalam Kurun Waktu Tertentu.	Menyusun RKT dengan menggambarkan ketercapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.
2.	Meningkatkan persentase pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.	Kepala Dinas akan bersurat ke bidang-bidang terkaitb untuk meningkatkan persentase pencapaian targetbkinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.
3.	Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) supaya mencantumkan data dan perhitungan capaian kinerja.	Pada LKIP akan menampilkan data dan proses perhitungan capaian kinerja.
4.	Pengukuran Kinerja supaya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Akan dibuat regulasi terkait penyesuaian capaian kinerja dan tunjangan kinerja.

5.	Pengukuran Kinerja supaya menjadi dasar dalam penempatan Jabatan baik struktural maupun fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.	Akan dibuat regulasi terkait penyesuaian capaian kinerja dan tunjangan kinerja.
6.	Setiap bukti Tindak Lanjut terjadinya penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja hasil dari evaluasi kinerja setiap triwulan supaya didokumentasikan dan dilaporkan dalam laporan evaluasi.	Menyusun dokumentasi bukti tindak lanjut.
7.	Melakukan reviu program dan kegiatan atas hambatan dan keberhasilan secara berkala, serta melampirkan dokumen tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dilakukan.	Setiap bidang akan melakukan reviu kegiatan atas hambatan dan keberhasilan secara berkala.
8.	Hasil pengukuran kinerja agar menjadi dasar dilakukan reviu kebutuhan anggaran.	Hasil kinerja sudah menjadi dasar dalam penentuan jumlah anggaran untuk masing-masing bidang.
9.	Pada tahun 2024 setiap pegawai melaporkan capaian kinerja setiap bulannya pada SKP.	Setiap pegawai sudah melaporkan capaian kinerja setiap bulannya.
10.	Untuk LKIP Tahun 2024, supaya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaporkan tepat waktu, paling lambat 2 (dua bulan) setelah tahun anggaran berakhir.	LKIP tahun 2024 akan dilaporkan tepat waktu.
11.	Pada LKIP supaya menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah (RENSTRA).	LKIP tahun 2024 akan menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
12.	Analisis Efisiensi Anggaran yang dicantumkan dalam LKIP supaya menjelaskan ketercapaian indikator atas kegiatan dan program dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan serta dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama.	Telah disusun analisis efisiensi anggaran.
13.	Pada LKIP tahun 2024 supaya menyajikan Rekomendasi perbaikan Kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.	Pada LKIP tahun 2024 sudah menyajikan rekomendasi perbaikan.

14.	Melakukan bedah/pembahasan bersama seluruh pegawai secara berkala yang dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen kegiatan yang bertujuan supaya informasi yang disajikan dalam LKIP menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Telah dilakukan pembahasan dengan seluruh pegawai secara berkala terkait dengan keterlibatan pegawai terhadap laporan kinerja.
15.	Informasi dalam LKIP secara berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Capaian LKIP dijadikan sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran.
16.	Melakukan reviu perencanaan Kinerja sebelum dilakukan perubahan (RENSTRA, RENJA, RKT, Rencana Aksi dan RKA/DPA).	Telah dilakukan reviu perencanaan kinerja sebelum dilakukan perubahan.
17.	Pada LKIP supaya memuat Ekspektasi Pimpinan terhadap Perubahan Kinerja Organisasi.	LKIP tahun 2024 akan memuat ekspektasi pimpinan terhadap perubahan kinerja organisasi.
18.	Membuat Laporan Hasil Evaluasi Internal yang disahkan secara formal untuk menilai keberhasilan program/kegiatan serta ketercapaian Perjanjian Kinerja, supaya diketahui perbaikan maupun hal-hal yang telah dilakukan perbaikan.	Akan mendokumentasikan LHE Internal yang disahkan secara formal untuk menilai keberhasilan program/kegiatan serta ketercapaian Perjanjian Kinerja.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

BAB.IV

P E N U T U P

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi

dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disajikan pembiayaan yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2024.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Kegiatan program-program pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kegiatan tiap tahun. Adapun rincian capaian kinerja untuk 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas kesehatan” terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,6 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.
2. **Sasaran 2** “Perbaikan gizi masyarakat” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 134,9 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.
3. **Sasaran 3** “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,45 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.

Adapun alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 82.187.760.648,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.396.324.897,- dengan persentase penyerapan sebesar 89,30%.

Masalah pembangunan kesehatan tidak dapat terselesaikan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja namun memerlukan kerjasama dan peran lintas sektor yang optimal. Disamping itu, pembangunan yang kita laksanakan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam

bentuk pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat maupun kemandirian dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan melalui JKN juga sangat diperlukan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah.

L A M P I R A N



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	$\frac{\text{Jumlah Seluruh kematian berdasarkan Age Specific Death Rate (ASDR)}}{\text{Jumlah Seluruh Kasus Kematian}} \times 100\%$	BPS
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita (%)	$\frac{\text{Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah}}{\text{Jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi
		Persentase Balita Stunting (%)	$\frac{\text{Jumlah balita dengan (tinggi badan/umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah}}{\text{Jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah}} \times 100\%$	Dinkes Provinsi
3.	Meningkatnya Kesehatan Ibu Dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah}}{\text{Jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes Provinsi
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	$\frac{\text{Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma}}{\text{Jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinkes Provinsi

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 4270391 Fax 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

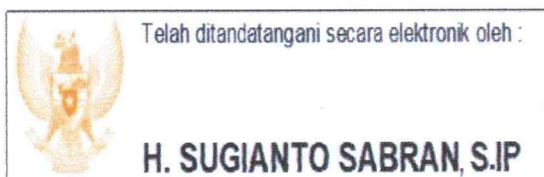
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,44
	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita (%)	Persen	7,3
2.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	16
3.	Meningkatnya Kesehatan Ibu Dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,7
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	128

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 39.201.880.702	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 33.745.199.325	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 6.682.802.780	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Rp. 127.050.000	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 485.000.000	

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM, MKM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya,

Januari 2024

Pihak Pertama

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	Poin	70
		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN yang meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan	Dokumen	6
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,44
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	1
		Data Profil Kesehatan	Dokumen	1
		Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Uji Kompetensi	Nakes	200

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 282.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 29.220.123.992	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 240.464.600	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 670.110.725	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.838.020.038	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 737.696.352	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.227.071.960	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.401.854.687	
9.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3.125.454.878	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 380.000.000	

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya,

Januari 2024

Pihak Pertama,

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Fery Iriawan, MPH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Pertama,

dr. Fery Iriawan, MPH
NIP. 19750120 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persen	90
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN1)	Persen	92
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	85
		Cakupan Posyandu aktif	Persen	65
		Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persen	50
		Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	60
		Kabupaten/kota yang melaksanakan Olahraga	Persen	60
2	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Stunting pada balita	Persen	15,38
		Persentase Wasting pada balita	Persen	7.3
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Persen	11,5
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen	55
		Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	100

	Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga			
1.	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita	Rp.	160.000.000,-	APBD
2.	Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga	Rp.	150.000.000,-	APBD

3.	Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Rp.	50.000.000,-	APBD
4.	Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Rp.	100.000.000,-	APBD
5.	Kegiatan Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	Rp.	613.444.000,-	DAK NON FISIK
6.	Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons)	Rp.	194.675.000,-	DAK NON FISIK
7.	Monev Kespro	Rp.	135.000.000,-	APBD
8.	Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/ LS)	Rp.	70.000.000,-	APBD
II	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1	Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu	Rp.	200.000.000,-	APBD
2	Konsultasi Program Gizi	Rp.	50.000.000,-	APBD
3	Pembinaan Surveilans Gizi	Rp.	150.195.000,-	APBD
4	Monev Manajemen Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Balita Stunting	Rp.	174.805.000,-	APBD
5	Pertemuan Surveilans GKIA Bagi Petugas GKIA di 14 Kab/Kota	Rp.	175.000.000,-	APBD
6	Pertemuan evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, stunting) (DAK NON FISIK)	Rp.	315.285.000,-	DAK Non Fisik

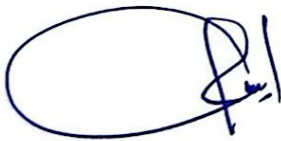
III	Pengelolaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Terkait GERMAS	Rp.	150.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
2	Pendampingan dan Pembinaan UKBM dalam Rangka Posyandu Aktif oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DWP unit Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah	Rp.	65.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
3	Konsultasi Implementasi GERMAS ke Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Rp.	50.000.000,-	DAU
4	Penggerakan Massa dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (4 kali)	Rp.	250.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
5	Penggerakan Masyarakat "Cegah Stunting itu penting" (3 kali)	Rp.	175.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
6	Refreshing Kader Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah (1 kali)	Rp.	210.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
7	Supervisi Fasilitatif Data UKBM	Rp.	70.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
8	Seminar Kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	Rp.	90.000.000,-	DAU – Bagi Hasil

9	Penggerakan Masyarakat dalam Mendukung Bumil Sehat (11 kali)	Rp.	110.621.700,-	DAU – Bagi Hasil
10	Advokasi, pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp.	167.878.000,-	DAK – NF
IV	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
1	Intervensi kesehatan lingkungan	Rp.	120.000.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
2	Konsultasi dan Koordinasi	Rp.	40.608.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
3	Orientasi Penyelenggaraan	Rp.	199.392.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
V	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1	Senam jumat pagi Bersama ASN dan tenaga kontrak	Rp.	10.000.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
2	Konsultasi ke pusat terkait program Kesehatan kerja dan olahraga	Rp.	12.802.000,-	APBD
3	Pemeriksaan kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR untuk ASN Dinkes dan OPD lainnya	Rp.	22.650.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
4	Monev dan koordinasi pelaksanaan senam hamil di puskesmas, senam lansia di posyandu lansia dan pada kelompok Masyarakat (jantung sehat, prolanis) serta pemantauan kebugaran anak SD/MI	Rp.	125.000.099,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
5	Monitoring dan evaluasi MBH	Rp.	70.181.024,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]

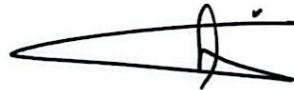
Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr.dr.Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200001 1 006



dr. Fery Iriawan, MPH
NIP. 19750120 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDDY KELANA, SKM.,MS.i**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006



EDDY KELANA, SKM.,MS.i
NIP. 197305261993031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kesehatan yang bermutu	Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang terakreditasi	buah	204
		Persentase fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Rumah Sakit) yang terakreditasi	buah	33
2.	Upaya peningkatan pelayanan Kesehatan rujukan	Jumlah rasio tempat tidur di rumah sakit	Rasio per 1000 penduduk	1,14
3.	Tersedianya jaminan dan pembiayaan Kesehatan yang cukup, merata dan bermutu	Persentase kepesertaan JKN menuju UHC	persen	95,4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pertemuan koordinasi dan evaluasi layanan UTD Daerah	Rp. 180.000.000	
2. Monitoring dan evaluasi layanan UTD Daerah	Rp. 100.000.000	
3. Pertemuan koordinasi dan evaluasi layanan klinik	Rp. 180.000.000	
4. Bimbingan dan evaluasi pelayanan Kesehatan primer	Rp. 100.000.000	
5. Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program	Rp. 55.000.000	
6. Operasional Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Rp. 70.026.735	
7. Konsultasi Perencanaan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahap III pengawasan berkala (MYC)	Rp. 1.100.000.000	
8. Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp. 464.000.000	
9. Jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 52.800.540	
10. Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 150.000.000	
11. Monev Sistem Rujukan Terintegrasi Lintas Program di Tingkat Provinsi	Rp. 100.000.000	
12. Monev dan Bimtek Manual Rujukan	Rp. 100.000.000	
13. Program Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)	Rp. 200.000.000	
14. Monev Penyelenggaraan Mutu Fasyankes Lainnya (FKTP)	Rp. 100.000.000	
15. Monev Penyelenggaraan Mutu Fasyankes Lainnya (FKTRL)	Rp. 100.000.000	
16. Monitoring Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota	Rp. 105.000.000	
17. Sinkronisasi dan Konsolidasi Program JKN	Rp. 70.000.000	
18. Premi Penerima bantuan luran (PBI) JKN	Rp. 14.606.819.278	
19. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Tingkat Provinsi	Rp. 160.000 000	
JUMLAH	Rp. 18.175.646.553	



Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,

EDDY KELANA, SKM.,MS.i
NIP. 197305261993031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Persentase Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan	Persen	22,7
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persen	31
3	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persen	94
4	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	55,40

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

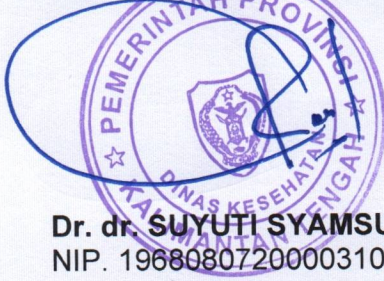
No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	4.775.000.000	PAD
2	Pertemuan Koordinasi Program Pengembangan SDM	126.000.000	PAD
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	162.000.000	PAD
4	Penilaian Puskesmas yang memenuhi 9 nakes	73.000.000	PAD
5	Penilaian nakes teladan	455.000.000	PAD
6	Fasilitasi koordinasi program dokter internship ke kab/kota	73.000.000	PAD
7	Peningkatan Kapasitas Puskesmas yang memenuhi 9 nakes	140.000.000	PAD
8	Penyiapan data SDM untuk faskes pemerintah dan swasta	203.600.000	APBN

9	Pendampingan pengelola data SDM dan rencana kebutuhan nakes dari provinsi ke kab/kota	83.458.000	APBN
10	Penyajian data	242.770.000	APBN
11	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	75.000.000	DAU SG
12	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	615.000.000	DAU SG
13	Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kab/kota	526.714.167	DNF
14	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000	DAU SG
15	Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi dalam pengelolaan vaksin	50.000.000	DAU SG
16	Pemusnahan Obat dan BHP	50.000.000	DAU SG
17	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten/Kota)	140.000.000	DAU SG
18	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000	PAD
19	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000	PAD
20	Pemeliharaan instalasi farmasi dan Gudang vaksin	25.000.000	PAD
21	Analisa dan Evaluasi Ketersediaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) di Sarana Pelayanan Kesehatan	100.000.000	DAU SG
22	Tambahan biaya distribusi obat, vaksin, dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kab/Kota	50.000.000	DAU SG
23	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementerian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	54.000.000	DAU
24	Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu	109.475.625	DNF
25	Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak	208.971.038	DNF
26	Pengadaan Obat Program Gizi	808.233.170	DNF
27	Evaluasi dan supervise pengelolaan obat dan vaksin sebagai upaya penerapan kebijakan pengelolaan 1 pintu dan pengendalian ketersediaan di Instalasi Farmasi Dinkes Kab/kota	29.360.000	APBN
28	Pengawasan dan pendampingan untuk meningkatkan mutu pengelolaan obat, vaksin dan BMHP	209.424.000	APBN
	TOTAL	9.622.056.000	

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, flowing script that appears to be the name "Damar Pramusinta".

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDAYATI, S.ST, M.A.P**

Jabatan : **KEPALA UPT BAPELKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA UPT BAPELKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi SDM kesehatan	Jumlah Nakes yang Terlatih	orang	24
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan sinergitas kediklatan pelatihan bersama Dinkes Kabupaten/kota	kegiatan	1
3.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Workshop Pelaksanaan BLUD	kegiatan	1
4.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan konsultasi ke Pusat	kegiatan	1
5.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan akreditasi institusi	kegiatan	1
6.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan	kegiatan	1
7.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	kegiatan	1
8.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lapangan	kegiatan	1
9.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan	kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Sinergitas kediklatan pelatihan Bersama Dinkes Kab/Kota	Rp. 90.000.000	Triwulan I, II
2. Kegiatan Workshop Pelaksanaan BLUD	Rp. 15.000.000	Triwulan I
3. Kegiatan Akreditasi Institusi Bapelkes	Rp. 94.000.000	Triwulan I, II
4. Kegiatan Konsultasi ke Pusat	Rp. 75.924.780	TR, I,II,III,IV
5. Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan	Rp. 50.000.000	Triwulan III
6. Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	Rp. 6.000.000	Triwulan III
7. Kegiatan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	Rp. 237.000.000	Triwulan III
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan	Rp. 12.000.000	Triwulan IV
9. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan	Rp. 6.000.000	Triwulan IV

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAYUMUATULU, SKM, MAP

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Prosentase realisasi Jasa Medis terhadap pendapatan Labkes	%	100
2	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah pengujian parameter laboratorium klinik dan laboratorium Kesehatan Masyarakat	parameter	21.538
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Score penilaian	84
4.		Persentase pemenuhan alat dan bahan laboratorium	%	80
5.		Laporan Tahunan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	Dokumen	1

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis UPT Labkeskal	282.000.000	PAD
2.	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	40.000.000	PAD
3.	Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	70.000.000	PAD
4.	Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	10.000.000	PAD
5.	Kaji Ulang Manajemen (KUM)	10.000.000	PAD
6.	Pelayanan Pelanggan UPT Labkeskal	42.919.048	PAD
7.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
8.	Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan	3.000.000	PAD
9.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	40.000.000	PAD
10.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
11.	Pengadaan Labkesda untuk penguatan sistem Kesehatan (DAK Fisik)	1.480.500.797	DAK Fisik
12.	Kontrol Mutu Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	35.000.000	PAD
TOTAL		2.113.419.845	

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP 196808072000031006

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391 e-mail :
dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si**
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama,

MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391 e-mail :
dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	Buah	20
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah laporan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi	Laporan	1
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Persen	100

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengolahan Tanaman Tradisional Menjadi Jamu Skala Laboratorium P4TO.	Rp. 15.000.000,-	PAD
2. Konservasi Tanaman Berkhasiat dalam upaya persiapan Etalase Tanaman Obat di UPT PPOT.	Rp. 24.000.000,-	PAD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Konservasi tanaman Obat untuk menunjang Penyediaan Bahan Baku Produksi Obat Tradisional.	Rp. 14.452.230,-	PAD
4. Penapisan Tanaman Obat.	Rp. 10.000.000,-	PAD
5. Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi dalam rangka mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota.	Rp. 50.000.000,-	PAD/Spesific Grant
6. Pengumpulan Tanaman Obat.	Rp 55.000.000,-	PAD
7. Peningkatan Kapasitas SDM UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di bidang SDK
8. Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO.	Rp 0	Anggaran melekat di Bidang SDK
9. Kalibrasi peralatan Laboratorium UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Labkeskal
10. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Labkeskal
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 302.038.398,-	PAD
12. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan PPOT)	Rp. 0	Anggaran melekat di Sekretariat
13. Workshop BLUD UPT PPOT	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Bapelkes

Pihak Kedua



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,



MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,44
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita (%)	Persen	7,3
3.		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	16
4.	Meningkatnya Kesehatan Ibu Dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,7
5.		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	128

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 41.382.436.902	
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 33.934.620.253	
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 6.288.653.453	
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Rp. 127.050.000	
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 395.000.000	

Palangka Raya, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM, MKM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya,

Januari 2024

Pihak Pertama

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	Poin	70
		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN yang meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan	Dokumen	6
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,44
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	1
		Data Profil Kesehatan	Dokumen	1
		Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Uji Kompetensi	Nakes	200

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 282.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 29.220.123.992	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 240.464.600	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 670.110.725	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.838.020.038	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 737.696.352	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.227.071.960	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.401.854.687	
9.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3.125.454.878	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 380.000.000	

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Pertama,

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM, MKM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya,

Januari 2024

Pihak Pertama,

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	Poin	70
		Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN yang meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan	Dokumen	6
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,44
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	1
		Data Profil Kesehatan	Dokumen	1
		Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Uji Kompetensi	Nakes	200

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 282.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 29.220.123.992	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 240.464.600	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 670.110.725	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.838.020.038	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 737.696.352	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.227.071.960	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.401.854.687	
9.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3.125.454.878	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 380.000.000	

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Pertama,

RAINER DANNY P. M., SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Fery Iriawan, MPH**

Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Pertama,

dr. Fery Iriawan, MPH
NIP. 19750120 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persen	90
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN1)	Persen	92
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	85
		Cakupan Posyandu aktif	Persen	65
		Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persen	50
		Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	60
		Kabupaten/kota yang melaksanakan Olahraga	Persen	60
2	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat	Persentase Stunting pada balita	Persen	15,38
		Persentase Wasting pada balita	Persen	7.3
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Persen	11,5
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen	55
		Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	100

	Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga			
1.	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita	Rp.	160.000.000,-	APBD
2.	Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga	Rp.	150.000.000,-	APBD

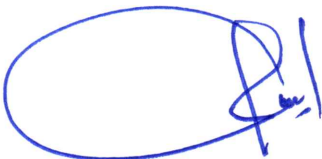
3.	Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Rp.	50.000.000,-	APBD
4.	Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Rp.	100.000.000,-	APBD
5.	Kegiatan Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	Rp.	613.444.000,-	DAK NON FISIK
6.	Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons)	Rp.	194.675.000,-	DAK NON FISIK
7.	Monev Kespro	Rp.	135.000.000,-	APBD
8.	Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/ LS)	Rp.	70.000.000,-	APBD
II	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1	Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu	Rp.	200.000.000,-	APBD
2	Konsultasi Program Gizi	Rp.	50.000.000,-	APBD
3	Pembinaan Surveilans Gizi	Rp.	150.195.000,-	APBD
4	Monev Manajemen Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Balita Stunting	Rp.	174.805.000,-	APBD
5	Pertemuan Surveilans GKIA Bagi Petugas GKIA di 14 Kab/Kota	Rp.	175.000.000,-	APBD
6	Pertemuan evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, stunting) (DAK NON FISIK)	Rp.	315.285.000,-	DAK Non Fisik

III	Pengelolaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Terkait GERMAS	Rp.	150.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
2	Pendampingan dan Pembinaan UKBM dalam Rangka Posyandu Aktif oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DWP unit Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah	Rp.	65.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
3	Konsultasi Implementasi Gernas ke Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Rp.	50.000.000,-	DAU
4	Penggerakan Massa dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (4 kali)	Rp.	250.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
5	Penggerakan Masyarakat “Cegah Stunting itu penting” (3 kali)	Rp.	175.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
6	Refreshing Kader Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah (1 kali)	Rp.	210.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
7	Supervisi Fasilitatif Data UKBM	Rp.	70.000.000,-	DAU – Bagi Hasil
8	Seminar Kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	Rp.	90.000.000,-	DAU – Bagi Hasil

9	Penggerakan Masyarakat dalam Mendukung Bumil Sehat (11 kali)	Rp.	110.621.700,-	DAU – Bagi Hasil
10	Advokasi, pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp.	167.878.000,-	DAK – NF
IV	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
1	Intervensi kesehatan lingkungan	Rp.	120.000.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
2	Konsultasi dan Koordinasi	Rp.	40.608.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
3	Orientasi Penyelenggaraan	Rp.	199.392.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
V	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1	Senam jumat pagi Bersama ASN dan tenaga kontrak	Rp.	10.000.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
2	Konsultasi ke pusat terkait program Kesehatan kerja dan olahraga	Rp.	12.802.000,-	APBD
3	Pemeriksaan kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR untuk ASN Dinkes dan OPD lainnya	Rp.	22.650.000,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
4	Monev dan koordinasi pelaksanaan senam hamil di puskesmas, senam lansia di posyandu lansia dan pada kelompok Masyarakat (jantung sehat, prolanis) serta pemantauan kebugaran anak SD/MI	Rp.	125.000.099,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]
5	Monitoring dan evaluasi MBH	Rp.	70.181.024,-	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama [SPESIFIC GRANT]

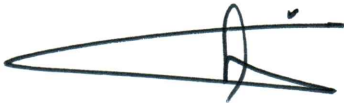
Palangka Raya,
Januari 2024

Pihak Kedua
Pihak Pertama



Dr.dr.Suyuti Syamsul, MPPM

NIP. 19680807 200001 1 006



dr. Fery Iriawan, MPH

NIP. 19750120 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDDY KELANA, SKM.,MS.i**

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama,

EDDY KELANA, SKM.,MS.i
NIP. 197305261993031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kesehatan yang bermutu	Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang terakreditasi	buah	204
		Persentase fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Rumah Sakit) yang terakreditasi	buah	33
2.	Upaya peningkatan pelayanan Kesehatan rujukan	Jumlah rasio tempat tidur di rumah sakit	Rasio per 1000 penduduk	1,14
3.	Tersedianya jaminan dan pembiayaan Kesehatan yang cukup, merata dan bermutu	Persentase kepesertaan JKN menuju UHC	persen	95,4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pertemuan koordinasi dan evaluasi layanan UTD Daerah	Rp. 180.000.000	
2. Monitoring dan evaluasi layanan UTD Daerah	Rp. 100.000.000	
3. Pertemuan koordinasi dan evaluasi layanan klinik	Rp. 180.000.000	
4. Bimbingan dan evaluasi pelayanan Kesehatan primer	Rp. 100.000.000	
5. Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program	Rp. 55.000.000	
6. Operasional Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Rp. 70.026.735	
7. Konsultasi Perencanaan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahap III pengawasan berkala (MYC)	Rp. 1.100.000.000	
8. Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp. 464.000.000	
9. Jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 52.800.540	
10. Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 150.000.000	
11. Monev Sistem Rujukan Terintegrasi Lintas Program di Tingkat Provinsi	Rp. 100.000.000	
12. Monev dan Bimtek Manual Rujukan	Rp. 100.000.000	
13. Program Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)	Rp. 200.000.000	
14. Monev Penyelenggaraan Mutu Fasyankes Lainnya (FKTP)	Rp. 100.000.000	
15. Monev Penyelenggaraan Mutu Fasyankes Lainnya (FKTRL)	Rp. 100.000.000	
16. Monitoring Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota	Rp. 105.000.000	
17. Sinkronisasi dan Konsolidasi Program JKN	Rp. 70.000.000	
18. Premi Penerima bantuan Iuran (PBI) JKN	Rp. 14.606.819.278	
19. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Tingkat Provinsi	Rp. 160.000.000	
JUMLAH	Rp. 18.175.646.553	

Palangka Raya, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama,

EDDY KELANA, SKM., MS.i
NIP. 197305261993031007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DAMAR PRAMUSINTA, M.P.H.
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Persentase Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan	Persen	22,7
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) % (45/100.000)	Persen	31
3	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persen	94
4	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	55,40

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

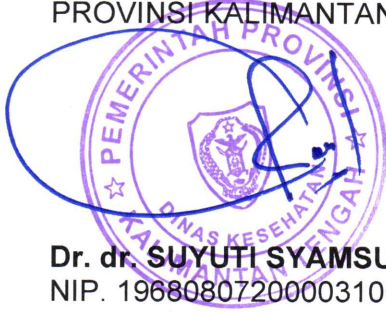
No	Kegiatan	Jumlah Uang (Rupiah)	Keterangan
1	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tenaga Kesehatan	4.775.000.000	PAD
2	Pertemuan Koordinasi Program Pengembangan SDM	126.000.000	PAD
3	Peningkatan kapasitas nakes teladan	162.000.000	PAD
4	Penilaian Puskesmas yang memenuhi 9 nakes	73.000.000	PAD
5	Penilaian nakes teladan	455.000.000	PAD
6	Fasilitasi koordinasi program dokter internship ke kab/kota	73.000.000	PAD
7	Peningkatan Kapasitas Puskesmas yang memenuhi 9 nakes	140.000.000	PAD
8	Penyiapan data SDM untuk faskes pemerintah dan swasta	203.600.000	APBN

9	Pendampingan pengelola data SDM dan rencana kebutuhan nakes dari provinsi ke kab/kota	83.458.000	APBN
10	Penyajian data	242.770.000	APBN
11	Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kabupaten / Kota	75.000.000	DAU SG
12	Pengadaan Obat Buffer dan Alat Kesehatan	615.000.000	DAU SG
13	Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kab/kota	526.714.167	DNF
14	TIM Perencanaan Obat Terpadu	10.000.000	DAU SG
15	Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi dalam pengelolaan vaksin	50.000.000	DAU SG
16	Pemusnahan Obat dan BHP	50.000.000	DAU SG
17	Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten/Kota)	140.000.000	DAU SG
18	Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	19.320.000	PAD
19	Monev Sarana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	107.730.000	PAD
20	Pemeliharaan instalasi farmasi dan Gudang vaksin	25.000.000	PAD
21	Analisa dan Evaluasi Ketersediaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) di Sarana Pelayanan Kesehatan	100.000.000	DAU SG
22	Tambahan biaya distribusi obat, vaksin, dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kab/Kota	50.000.000	DAU SG
23	Koordinasi Peningkatan Distribusi Kefarmasian ke Kementerian Kesehatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan	54.000.000	DAU
24	Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu	109.475.625	DNF
25	Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak	208.971.038	DNF
26	Pengadaan Obat Program Gizi	808.233.170	DNF
27	Evaluasi dan supervise pengelolaan obat dan vaksin sebagai upaya penerapan kebijakan pengelolaan 1 pintu dan pengendalian ketersediaan di Instalasi Farmasi Dinkes Kab/kota	29.360.000	APBN
28	Pengawasan dan pendampingan untuk meningkatkan mutu pengelolaan obat, vaksin dan BMHP	209.424.000	APBN
	TOTAL	9.622.056.000	

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 19760310 200312 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 427039 Fax 4270391
e-mail: infodinkes@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP**
Jabatan : **KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN**
TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2024

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama

KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persentase	60%
	Persentase pasien sifilis yang diobati	Persentase	70 %
	Keberhasilan pengobatan TB / success Rate	Persentase	80 %
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai <i>Positivity Rate</i> (PR) < 5%	Kab/Kota	14
	Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar	Persentase	95%
	Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar	Persentase	85%
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	Persentase	100%
	Jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies	Kab/Kota	7
	<i>Case Fatality Rate</i> (CFR) DBD	Persentase	< 1
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pandu PTM >80% Puskesmas	Kab/Kota	14
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Kab/Kota	14
	Jumlah Kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Kab/Kota	14
	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap IDL .	Persentase	95%
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE< 24 jam	Persentase	100%
	Persentase Sinyal Keswaspadaan Dini yang direspon sebesar 80 %	Persentase	80%

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Capaian
1	Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	30.000.000,00	
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan (Kabupaten Kota)	58.040.449,00	
3	Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif) (Kabupaten Kota)	35.000.000,00	
4	Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)	35.000.000,00	
5	Pembinaan implementasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) di Kabupaten (kab/kota)	91.560.000,00	
6	Monitoring Utilisasi TCM untuk diagnosis TB	35.000.000,00	
7	assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota	25.000.000,00	
8	Penilaian Eliminasi Malaria	47.464.000,00	
9	Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	40.000.600,00	
10	Penyelidikan Epidemiologi DBD	50.000.000,00	
11	Penguatan dan pengendalian teknis arbovirosis	75.000.000,00	
12	On The Job Training Program HIV AIDS dan PIMS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	
13	Pengawasan Ke Kab/Kota yg melaksanakan kebijakan KTR 100% di 7 Tatanan	69.041.147,-	
14	Koordinasi Pelaksanaan RBM	50.000.000,-	
15	Monev Deteksi dini Katarak di kab/Kota	65.000.000,-	
16	Monitoring dan evaluasi Program Haji	60.000.000,-	
17	Pertemuan Rujukan Kasus deteksi dini IVA dan SADANIS di Kab/Kota	65.000.000,-	
18	Koordinasi Pelaksanaan Gangguan DM dan Gangguan Metabolik	132.000.000,-	
19	Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan SADANIS bagi Tenaga Kesehatan	75.000.000,-	

20	Koordinasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza di Kab/Kota	50.000.000,-	
21	Evaluasi manajemen pelayanan imunisasi di fasyankes	70.619.200	
22	Manajemen supervisi suportif/SS dlm pelaksanaan imunisasi	98.984.300	
23	Surveilans KIPI	65.984.300	
24	Pertemuan evaluasi dan validasi data pelaksanaan imunisasi rutin	90.314.730	
25	Monitoring pelaksanaan instroduksi vaksin baru	89.124.800	
26	Supervisi dan monitoring dlm rangka validasi data UCI dan BIAS	69.057.860	
27	Penguatan sistem kewaspadaan diri dan respon (SKDR) dan OJT pencatatan pelaporan surveilans epidemiologi	30.960.000	
28	Pelacakan kontak PIE	69.057.860	
29	Pelacakan kasus kontak dan kunjungan ulang penyakit menular PD3I (DAK NON Fisik)	95.000.000,-	
30	Verifikasi signal surveilans PD3I	60.000.000,-	
31	Konsultasi ke Pusat Program SURVIM	97.400.000,-	
32	Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka KLB,wabah dan bencana	60.000.000,-	

Palangka Raya, 3 Januari 2024

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama

KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. RIZA SYAHPUTRA, M.AP
NIP.19760903 200802 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAYUMUATULU, SKM, MAP

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP 196808072000031006

Pihak Pertama,

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Prosentase realisasi Jasa Medis terhadap pendapatan Labkes	%	100
2	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah pengujian parameter laboratorium klinik dan laboratorium Kesehatan Masyarakat	parameter	21.538
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Score penilaian	84
4.		Persentase pemenuhan alat dan bahan laboratorium	%	80
5.		Laporan Tahunan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	Dokumen	1

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis UPT Labkeskal	282.000.000	PAD
2.	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	40.000.000	PAD
3.	Akreditasi Parameter Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	70.000.000	PAD
4.	Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	10.000.000	PAD
5.	Kaji Ulang Manajemen (KUM)	10.000.000	PAD
6.	Pelayanan Pelanggan UPT Labkeskal	42.919.048	PAD
7.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
8.	Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium Kesehatan	3.000.000	PAD
9.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	40.000.000	PAD
10.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
11.	Pengadaan Labkesda untuk penguatan sistem Kesehatan (DAK Fisik)	1.480.500.797	DAK Fisik
12.	Kontrol Mutu Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat	35.000.000	PAD
TOTAL		2.113.419.845	

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP 196808072000031006

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDAYATI, S.ST, M.A.P**

Jabatan : **KEPALA UPT BAPELKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax 427039
e-mail dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA UPT BAPELKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi SDM kesehatan	Jumlah Nakes yang Terlatih	orang	24
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan sinergitas kediklatan pelatihan bersama Dinkes Kabupaten/kota	kegiatan	1
3.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Workshop Pelaksanaan BLUD	kegiatan	1
4.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan konsultasi ke Pusat	kegiatan	1
5.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan akreditasi institusi	kegiatan	1
6.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan	kegiatan	1
7.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	kegiatan	1
8.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lapangan	kegiatan	1
9.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan	kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Sinergitas kediklatan pelatihan Bersama Dinkes Kab/Kota	Rp. 90.000.000	Triwulan I, II
2. Kegiatan Workshop Pelaksanaan BLUD	Rp. 15.000.000	Triwulan I
3. Kegiatan Akreditasi Institusi Bapelkes	Rp. 94.000.000	Triwulan I, II
4. Kegiatan Konsultasi ke Pusat	Rp. 75.924.780	TR, I,II,III,IV
5. Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan	Rp. 50.000.000	Triwulan III
6. Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	Rp. 6.000.000	Triwulan III
7. Kegiatan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	Rp. 237.000.000	Triwulan III
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan	Rp. 12.000.000	Triwulan IV
9. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan	Rp. 6.000.000	Triwulan IV

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391 e-mail :
dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si**
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Pihak Pertama,

MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391e-mail :
dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	Buah	20
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah laporan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi	Laporan	1
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Persen	100

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengolahan Tanaman Tradisional Menjadi Jamu Skala Laboratorium P4TO.	Rp. 15.000.000,-	PAD
2. Konservasi Tanaman Berkhasiat dalam upaya persiapan Etalase Tanaman Obat di UPT PPOT.	Rp. 24.000.000,-	PAD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Konservasi tanaman Obat untuk menunjang Penyediaan Bahan Baku Produksi Obat Tradisional.	Rp. 14.452.230,-	PAD
4. Penapisan Tanaman Obat.	Rp. 10.000.000,-	PAD
5. Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi dalam rangka mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota.	Rp. 50.000.000,-	PAD/Spesific Grant
6. Pengumpulan Tanaman Obat.	Rp 55.000.000,-	PAD
7. Peningkatan Kapasitas SDM UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di bidang SDK
8. Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO.	Rp 0	Anggaran melekat di Bidang SDK
9. Kalibrasi peralatan Laboratorium UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Labkeskal
10. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) UPT P2OT.	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Labkeskal
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 302.038.398,-	PAD
12. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan PPOT)	Rp. 0	Anggaran melekat di Sekretariat
13. Workshop BLUD UPT PPOT	Rp 0	Anggaran melekat di UPT Bapelkes

Pihak Kedua



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

Palangka Raya, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,



MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso, No.14, Palangka Raya, 73112 Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : bapelkeskalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIHERDI S. GUNAWAN, SH**
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu UPT Bapelkes
Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDAYATI, S.ST, M.A.P**
Jabatan : Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

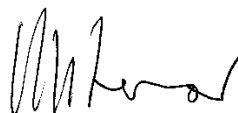
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, November 2024

Pihak Kedua,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007

Pihak Pertama,

WIHERDI S. GUNAWAN, SH
NIP. 19820925 200801 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso, No.14, Palangka Raya, 73112 Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : bapelkeskalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Plt. KEPALA SEKSI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN MUTU
UPT BAPELKEK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Akreditasi Institusi	Kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Akreditasi Institusi	Rp. 75.400.000	Triwulan III, IV


Pihak Kedua,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007

Palangka Raya, November 2024
Pihak Pertama,

WIHERDI S. GUNAWAN, SH
NIP. 19820925 200801 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep., M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : LAYUMUATULU, SKM, MAP

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep., M.A.P
NIP 198108142005011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase realisasi Jasa Medis terhadap pendapatan Labkes	%	100
2.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Indeks Kepuasan Masyarakat	Score penilaian	84
3.		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Laboratorium	%	80

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis UPT Labkeskal	282.000.000	PAD
2.	Pelayanan Pelanggan UPT Labkeskal	42.919.048	PAD
3.	Pengadaan Labkesda untuk penguatan sistem Kesehatan (DAK Fisik)	1.480.500.797	DAK Fisik
TOTAL			

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

M. RUSTAM EFFENDY, S. Kep., M.A.P
NIP 198108142005011010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A G U S., S.Si., M.MKes**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK**

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **LAYUMUATULU, SKM, MAP**

Jabatan : **KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Pertama,

A G U S., S.Si., M.MKes
NIP 19700801 199803 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Pemantapan Mutu External (PME) pengujian laboratorium klinik	Parameter	25
2.		Kontrol mutu pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Parameter	27
3.		Akreditasi parameter pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Dokumen	1
4.		Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	Dokumen	1
5.		Kaji Ulang Manajemen	Dokumen	1

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA TAHUN 2024

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemantapan Mutu External (PME) pengujian laboratorium klinik	Rp 40.000.000,-	PAD
2. Kontrol mutu pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Rp 35.000.000,-	PAD
3. Akreditasi parameter pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Rp 70.000.000,-	PAD
4. Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	Rp 10.000.000,-	PAD
5. Kaji Ulang Manajemen	Rp 10.000.000,-	PAD
TOTAL	Rp 165.000.000,-	

Pihak Kedua,

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Pertama,

A G U S., S.Si., M.MKes
NIP 19700801 199803 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SABAR DEYULITA, S.Si., Apt, M.Farm**

Jabatan : KEPALA SEKSI LABORATORIUM TANAMAN OBAT TRADISIONAL
UPT PUSAT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MARLINAE, S.Si., Apt, M.Si**

Jabatan : KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 09 Oktober 2024

Pihak Kedua,

MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002

Pihak Pertama,

SABAR DEYULITA, S.Si., Apt, M.Farm
NIP. 19760714 200604 2 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA SEKSI LABORATORIUM TANAMAN OBAT TRADISIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	Buah	18

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengolahan Tanaman Tradisional Menjadi Jamu Skala Laboratorium P4TO.	Rp. 15.000.000,-	PAD
2. Konservasi Tanaman Berkhasiat dalam upaya persiapan Etalase Tanaman Obat di UPT PPOT.	Rp. 24.000.000,-	PAD

Palangka Raya, 09 Oktober 2024

Pihak Kedua,

MARLINAE, S. Si., Apt, M. Si
NIP. 19750325 200012 2 002

Pihak Pertama,

SABAR DEYULITA, S.Si., Apt, M.Farm
NIP. 19760714 200604 2 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3224383, 3224383, 3226214
Palangka Raya 73111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Wahyuni, S.Gz

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Idayati, S.ST,M.AP

Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Kalteng

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangkaraya, November 2024

Pihak Kedua

Idayati, S.ST,M.A.P

NIP. 19680808 198901 2 007

Pihak Pertama

Indah Wahyuni, S.Gz

NIP. 19770516 200012 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3224383, 3224383, 3226214
Palangka Raya 73111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
UPT BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI Kalimantan TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Nakes yang dilatih	orang	24
2.	Meningkatnya Pembinaan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	Kegiatan	1
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Sinergitas Kediklatan Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota	Kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	237.000.000	Oktober
2. Pengukuran Indeks Kepuasan Peserta Latih	6.000.000	September
3. Sinergitas Kediklatan Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota	90.000.000	Februari- November

Palangkaraya, November 2024

Pihak Pertama

Indah Wahyuni, S.Gz
NIP. 19770516 200012 2 005

Pihak Kedua

Idayati, S.ST,M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso, No.14, Palangka Raya, 73112 Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : bapelkeskalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURIANIE, SE**
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Usaha UPT Bapelkes
Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDAYATI, S.ST, M.A.P**
Jabatan : Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, November 2024

Pihak Kedua,

IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007

Pihak Pertama,



SURIANIE, SE
NIP. 196809302007012011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso, No.14, Palangka Raya, 73112 Telp (0536) 3239469 Fax (0536) 3239469
e-mail : bapelkeskalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Pit. KEPALA SEKSI TATA USAHA
UPT BAPELKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Workshop Pelaksanaan BLUD Institusi Bapelkes	Kegiatan	1
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Jumlah pelaksanaan konsultasi ke pusat	Kegiatan	1
3.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Laboratorium Lapangan	Kegiatan	1
4.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Jumlah pelaksanaan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Kegiatan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Workshop Pelaksanaan BLUD Bapelkes.	Rp. 13.000.000	Triwulan III, IV
2. Konsultasi Pusat Bapelkes	Rp. 100.647.449	Triwulan III, IV
3. Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Rp. 6.000.000	Triwulan III, IV
4. Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan	Rp. 12.000.000	Triwulan III, IV

Palangka Raya, November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



IDAYATI, S.ST, M.A.P
NIP. 19680808 198901 2 007

SURIANIE, SE
NIP. 196809302007012011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jl. Let. Jend. Suprpto No.1 Palangka Raya 73111 Telp./Fax (0536) 3221106
email: blkkalteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BOYKE PURNOMO. S.ST**

Jabatan : Plt. Ka.sie Pemeliharaan dan Kalibrasi pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **LAYUMUATULU, SKM, MAP**

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah

LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Pihak Pertama,

Plt. Ka.Sie Pemeliharaan dan Kalibrasi

BOYKE PURNOMO, S.ST
NIP 197510152000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase realisasi Jasa Medis terhadap pendapatan Labkes	%	100
2.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Score penilaian	84
3.	memenuhi standar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Laboratorium	%	80

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Jasa Medis UPT Labkeskal	282.000.000	PAD
2.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
3.	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	50.000.000	PAD
4.	Pengadaan Labkesda untuk penguatan sistem Kesehatan (DAK Fisik)	1.480.500.797	DAK Fisik
TOTAL			

Palangka Raya, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,

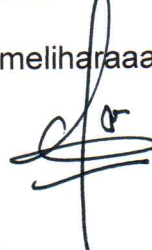
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan
Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah



LAYUMUATULU, SKM, MAP
NIP 196711121990022003

Pihak Pertama,

Plt. Ka.Sie Pemeliharaan dan Kalibrasi



BOYKE PURNOMO, S.ST
NIP 197510152000121002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Cakupan Posyandu aktif	Persen	65
		Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas	Persen	50
		Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	Persen	65
		Cakupan layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Persen	14
		Cakupan Kab/kota yang dilakukan pembinaan Labkesmas	Persen	50

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Terkait GERMAS	Rp. 150.000.000,-	DAU-Bagi Hasil
2.	Pendampingan dan Pembinaan UKBM dalam Rangka Posyandu Aktif oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DWP unit Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah	Rp. 65.000.000,-	DAU-Bagi Hasil
3.	Konsultasi Implementasi Germas ke Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Rp. 50.000.000,-	DAU
4.	Penggerakan Massa dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (3 kali)	Rp. 155.274.369,-	DAU-Bagi Hasil
5.	Penggerakan Masyarakat "Cegah Stunting itu penting" (3 kali)	Rp. 175.000.000,-	DAU-Bagi Hasil
6.	Refreshing Kader Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah (1 kali)	Rp. 210.000.000,-	DAU-Bagi Hasil
7.	Supervisi Fasilitatif Data UKBM	Rp. 70.000.000,-	DAU-Bagi Hasil
8.	Seminar Kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	Rp. 0,-	DAU-Bagi Hasil
9.	Penggerakan Masyarakat dalam Mendukung Bumil Sehat (1 kali)	Rp. 94.621.700,-	DAU-Bagi Hasil

10.	Advokasi, pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 167.878.000,-	DAK-Non Fisik
-----	--	-------------------	---------------

Pihak Kedua


dr. Fery Iriawan, MPH
 NIP. 19750120 200501 1 005

Palangka Raya, Oktober 2024

Pihak Pertama


Agus Tetiana, SKM
 NIP. 19840810 200604 2 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : YAESAR WAWAN, SKM.,MPH

Jabatan : KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. RIZA SAPUTRA,M.AP

Jabatan : KEPALA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

dr. RIZA SAPUTRA, M.AP
NIP. 19760903 200802 1002

Palangkaraya, 1 November 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN
IMUNISASI DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

YAESAR WAWAN, SKM, MPH
NIP. 19690316 198903 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Target1	Terkendalnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap IDL .	95 %	80 %
		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE< 24 jam	100 %	100 %
		Respon Alert (SKDR)	80 %	97 %

ANGGARAN KEUANGAN KINERJA 2024

No	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Pengiriman spesimen PD3I dan lainnya ke laboratorium nasional regional/rujukan	9.396.000	90 %
2	Evaluasi manajen pelayanan imunisasi di Fasyankes	28.672.800	85 %
3	Manajemen supervisi sportif/SS dalam pelaksanaan imunisasi	19.208.000	85 %
4	Surveilans KIPI	32.206.000	85 %
5	Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin	96.815.999	100 %
6	Monitoring pelaksanaan introduksi vaksin baru	70.951.677	85 %
7	Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI dan BIAS	55.963.200	85 %
8	Assesment dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan PIN	152.256.050	85 %
9	Pemusnahan limbah vaksinasi PIN	15.015.000	85 %
Total		480.484.726	85 %

KEPALA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,



dr. RIZA SAPUTRA, M.AP
NIP. 19760903 200803 200802 1002

KEPALA SEKSI SURVEILANCE DAN
IMUNISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YAESAR WAWAN,SKM,MPH
NIP. 19690316 198903 1003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 4270391, <https://dinkes.kalteng.go.id/> e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fran Yuliano, SKM**

Jabatan : KETUA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rainer Danny P. Mamahit, SKM, MKM**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rainer Danny P. Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001

Palangka Raya, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Fran Yuliano, SKM
NIP. 19670727 198803 1 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 4270391, <https://dinkes.kalteng.go.id/> e-mail : dinkes@kalteng.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	14	Dokumen
		Jumlah berita acara monitoring dan evaluasi terpadu DAK yang sesuai dengan SK Penetapan DAK	14	Kab/kota
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Umur Harapan Hidup	70,44	Tahun
		Persentase penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan secara tepat waktu	100	Persen
		Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal	100	Persen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 271.000.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 1.358.670.700	
TOTAL	Rp. 1.629.670.700	

Pihak Kedua,

Rainer Danny P. Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001

Palangka Raya, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Fran Yuliano, SKM
NIP. 19670727 198803 1 015



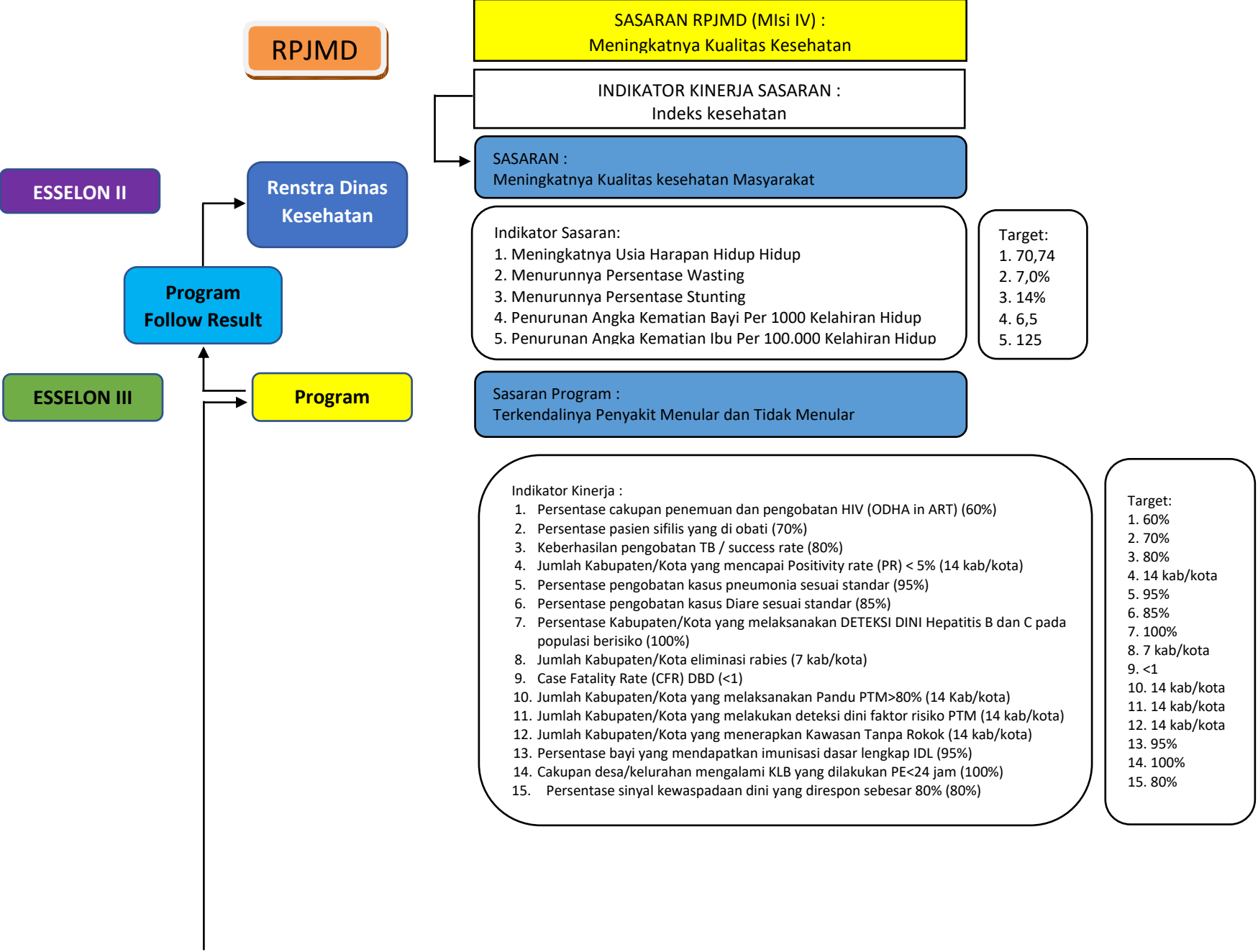
CASCADING PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

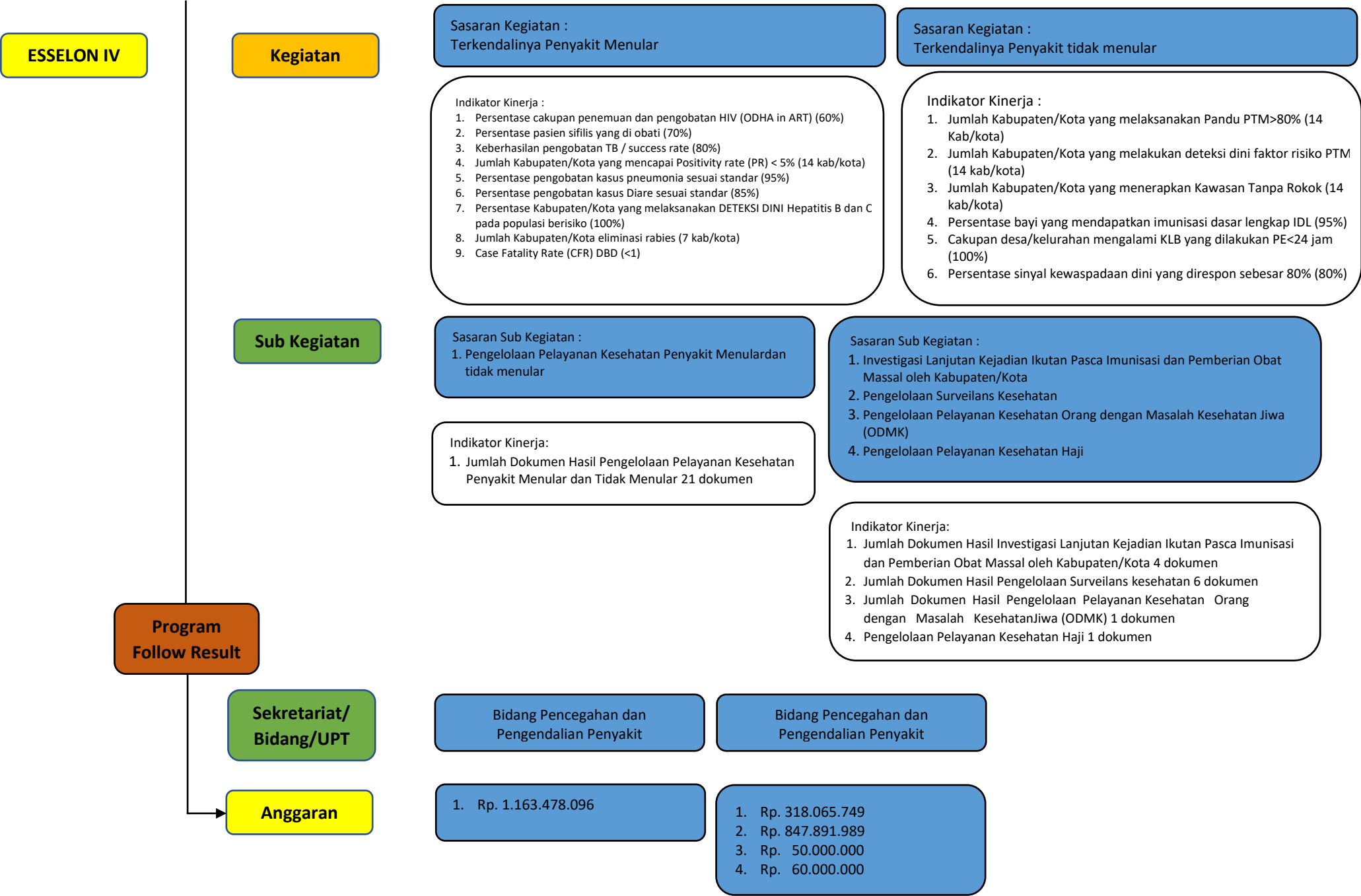
**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA

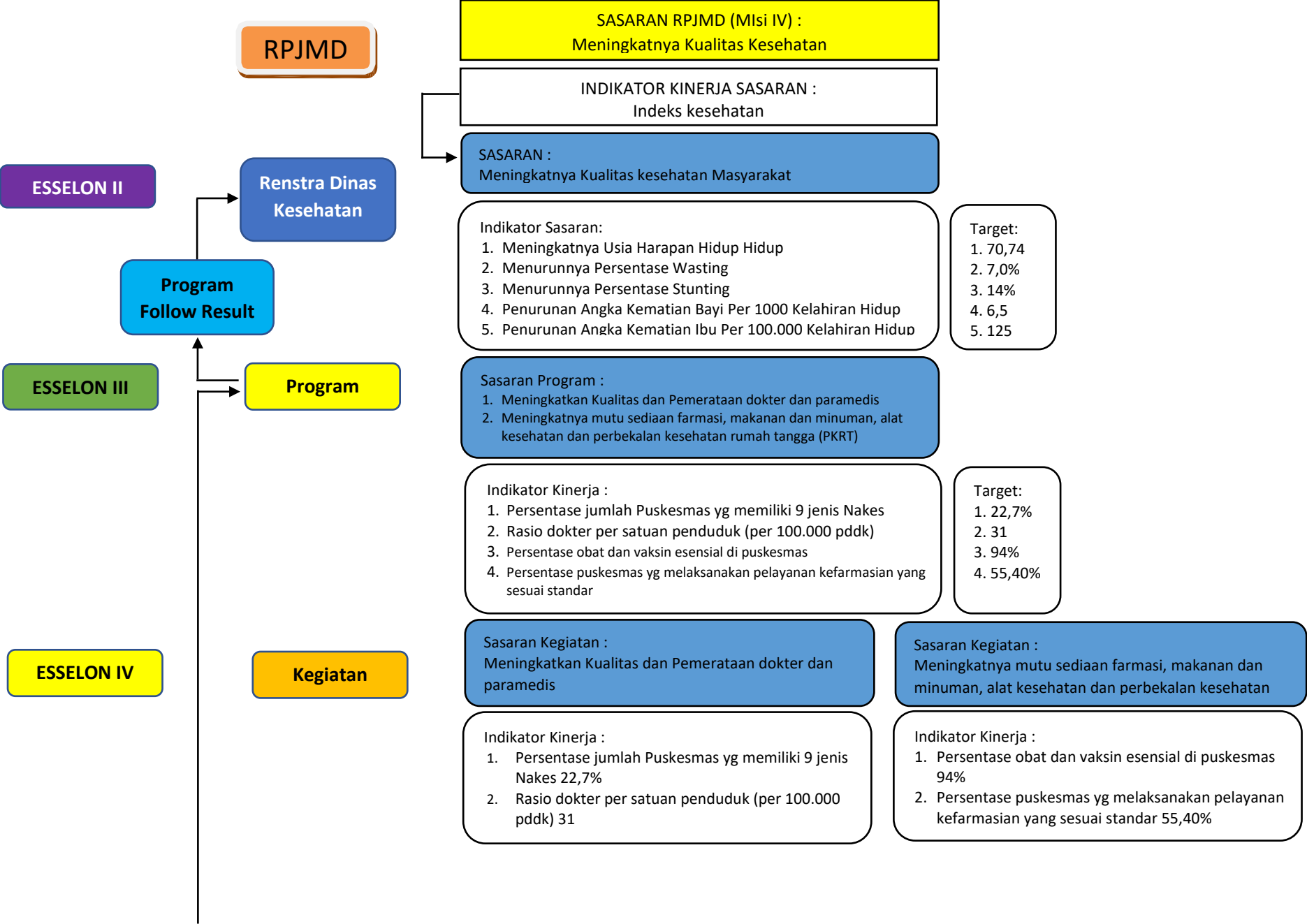
2024

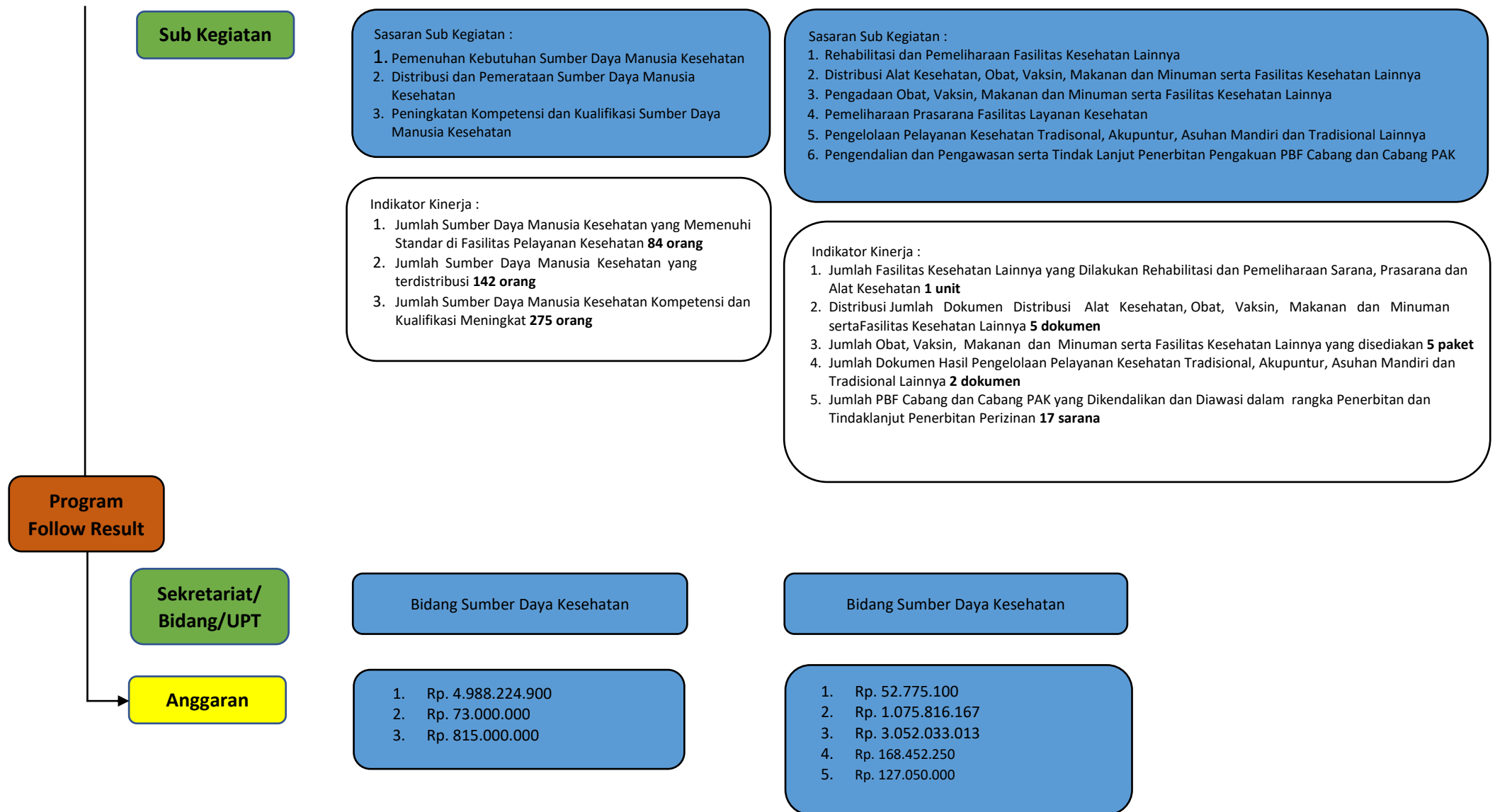
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



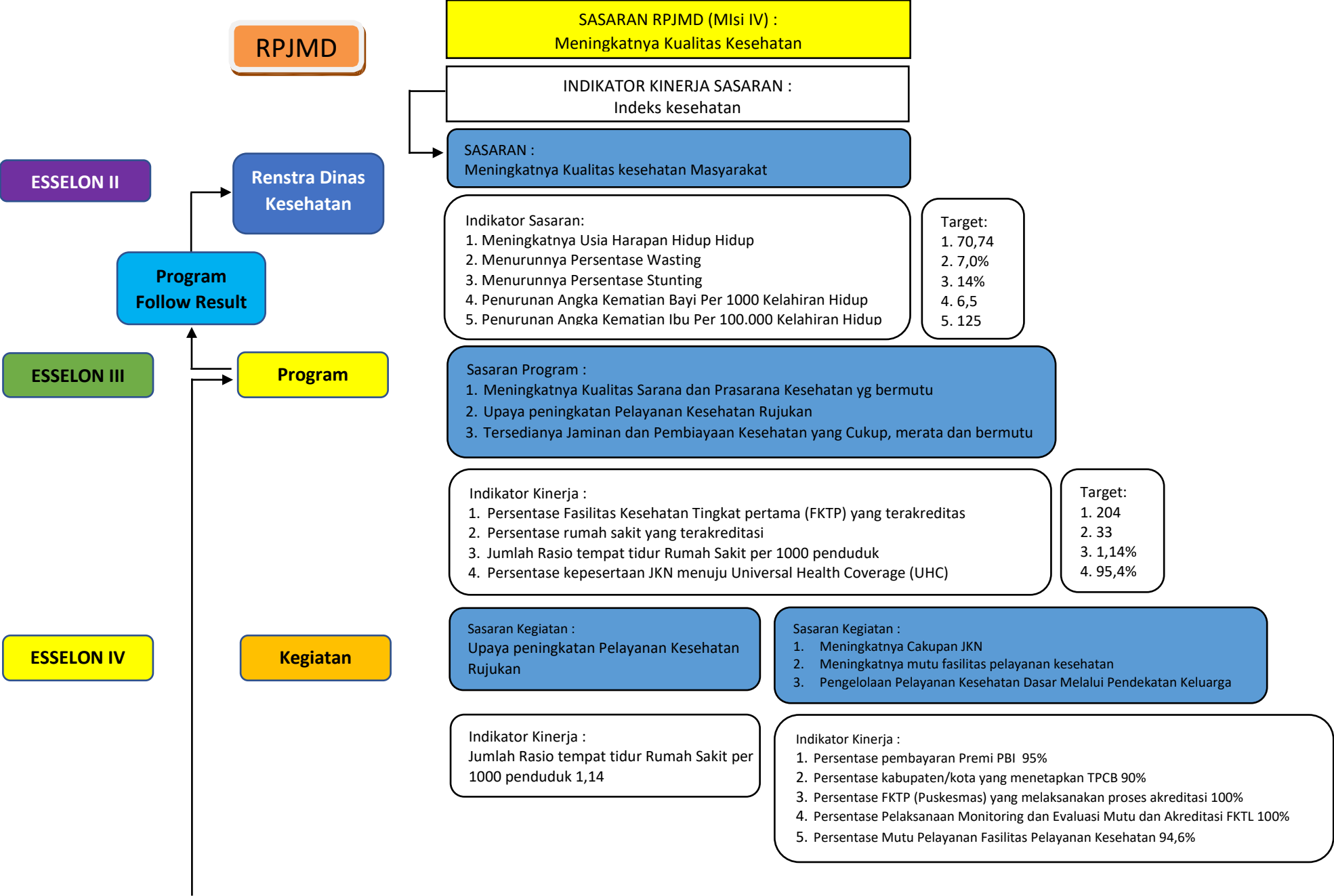


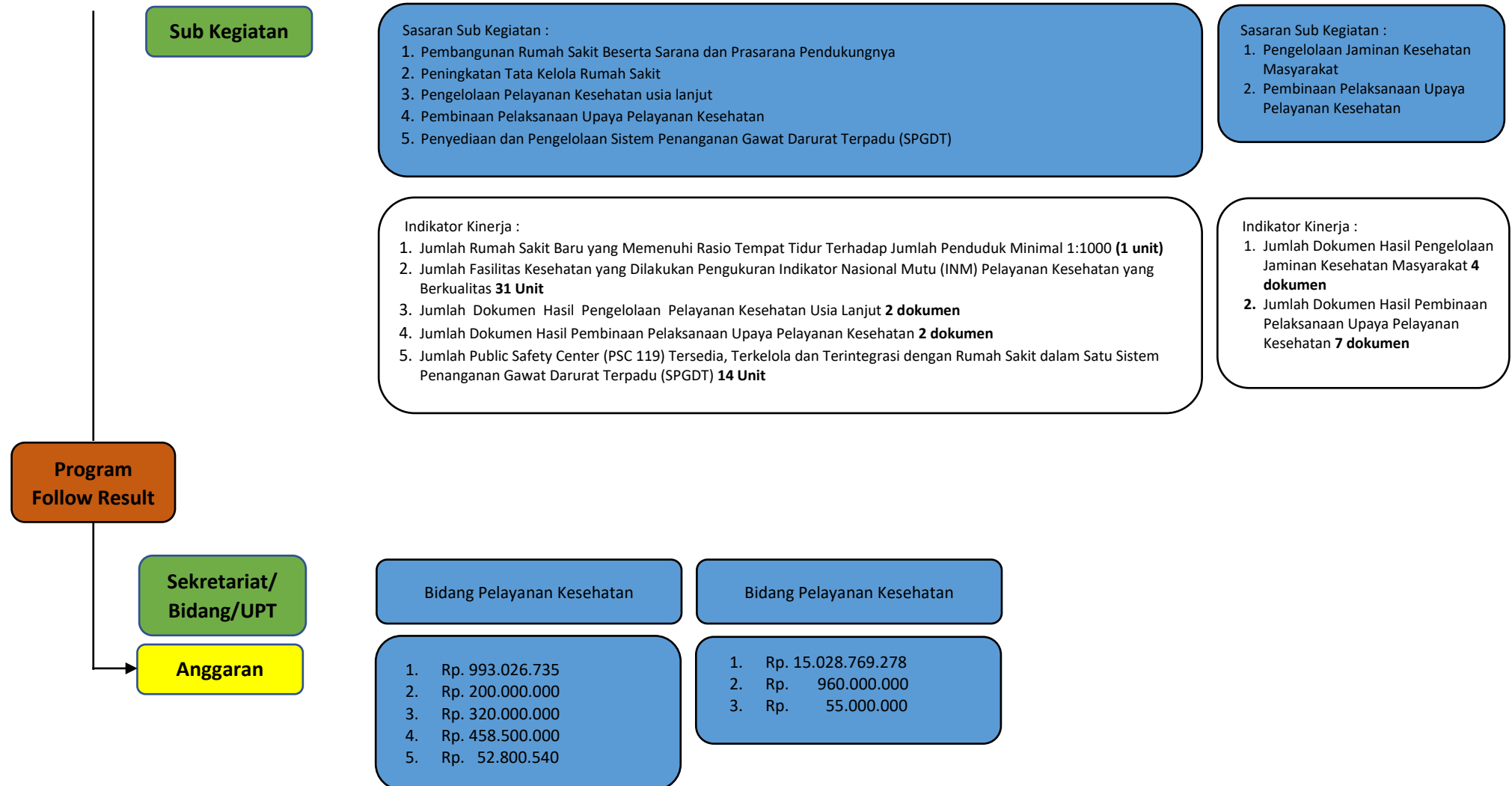
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



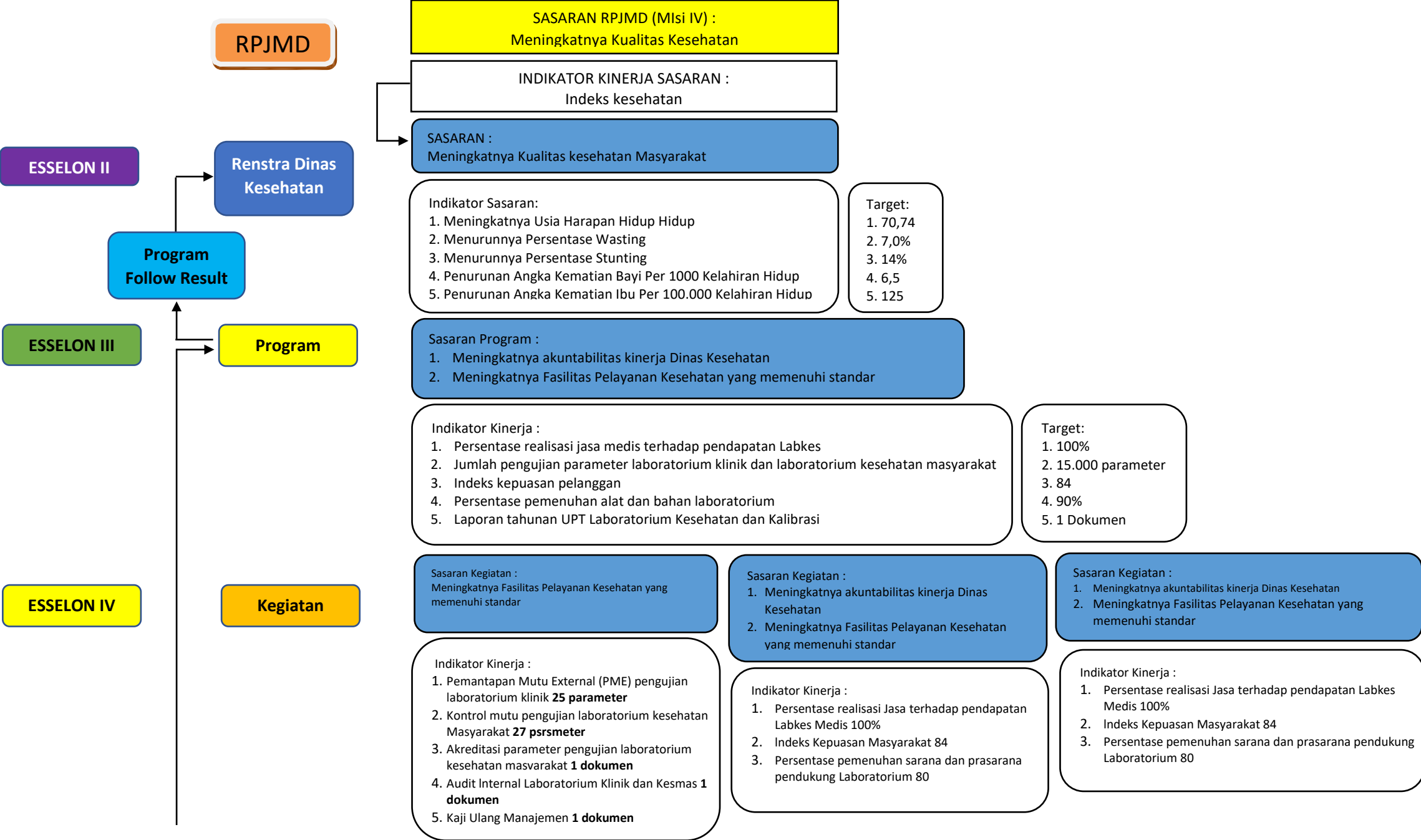


Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



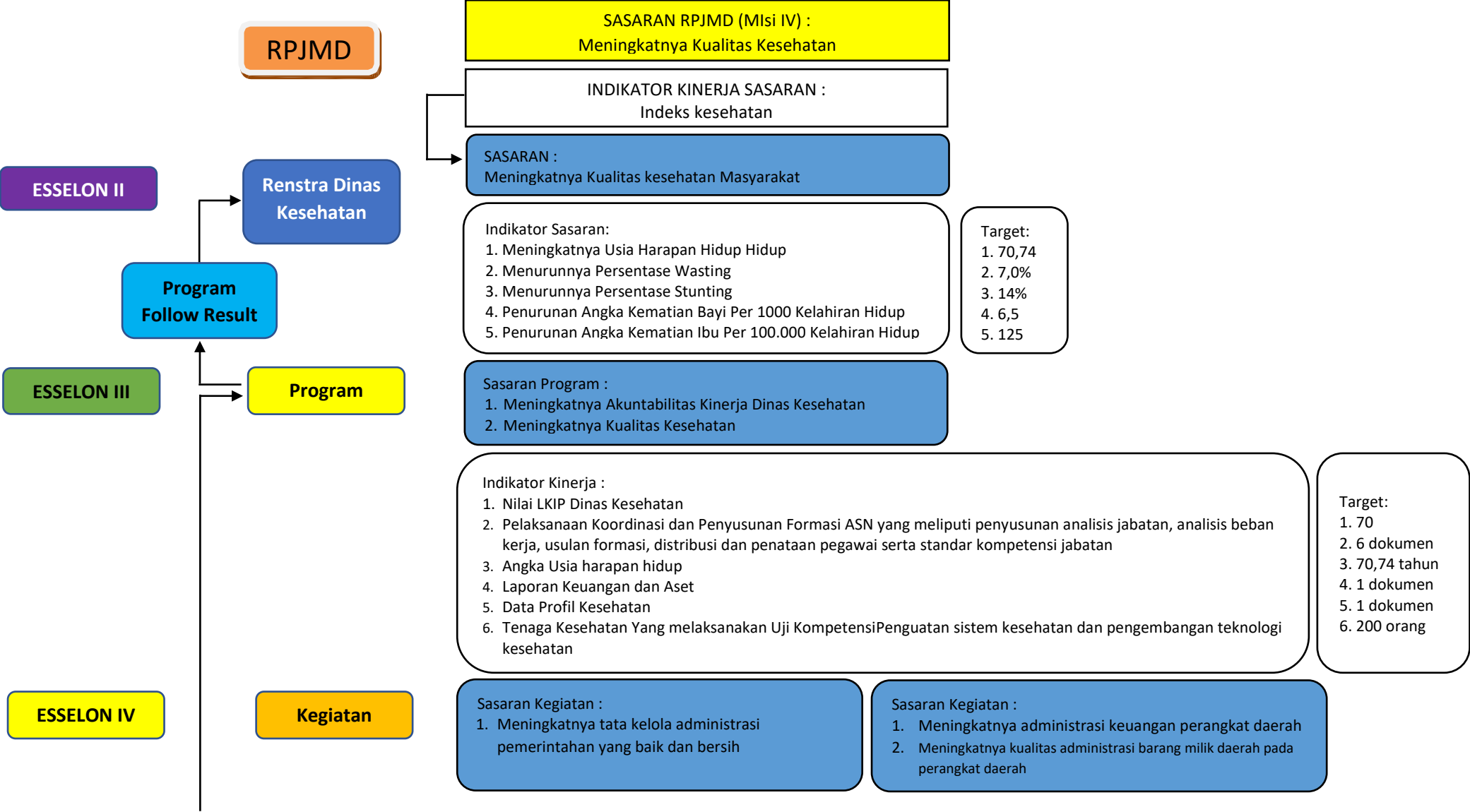


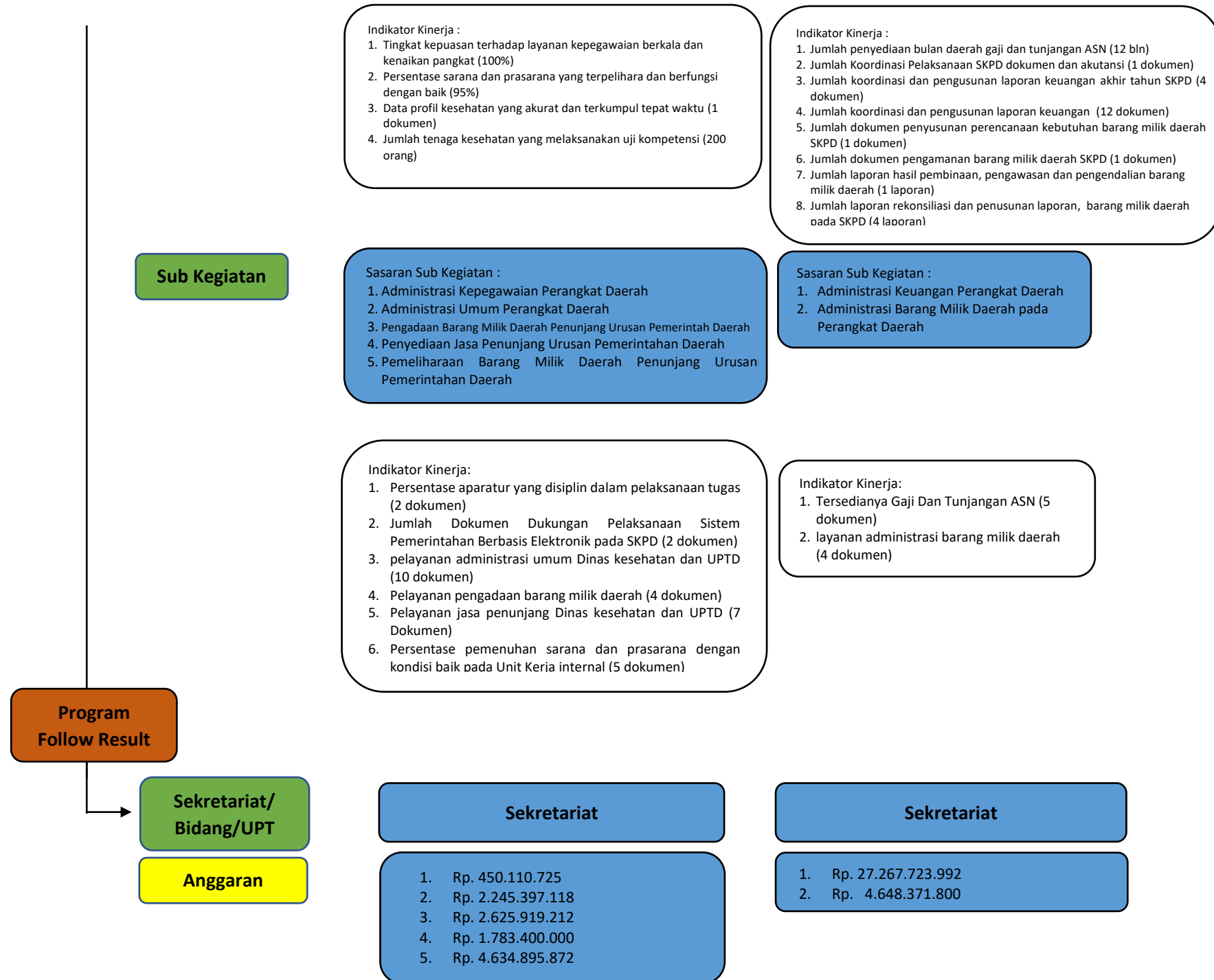
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



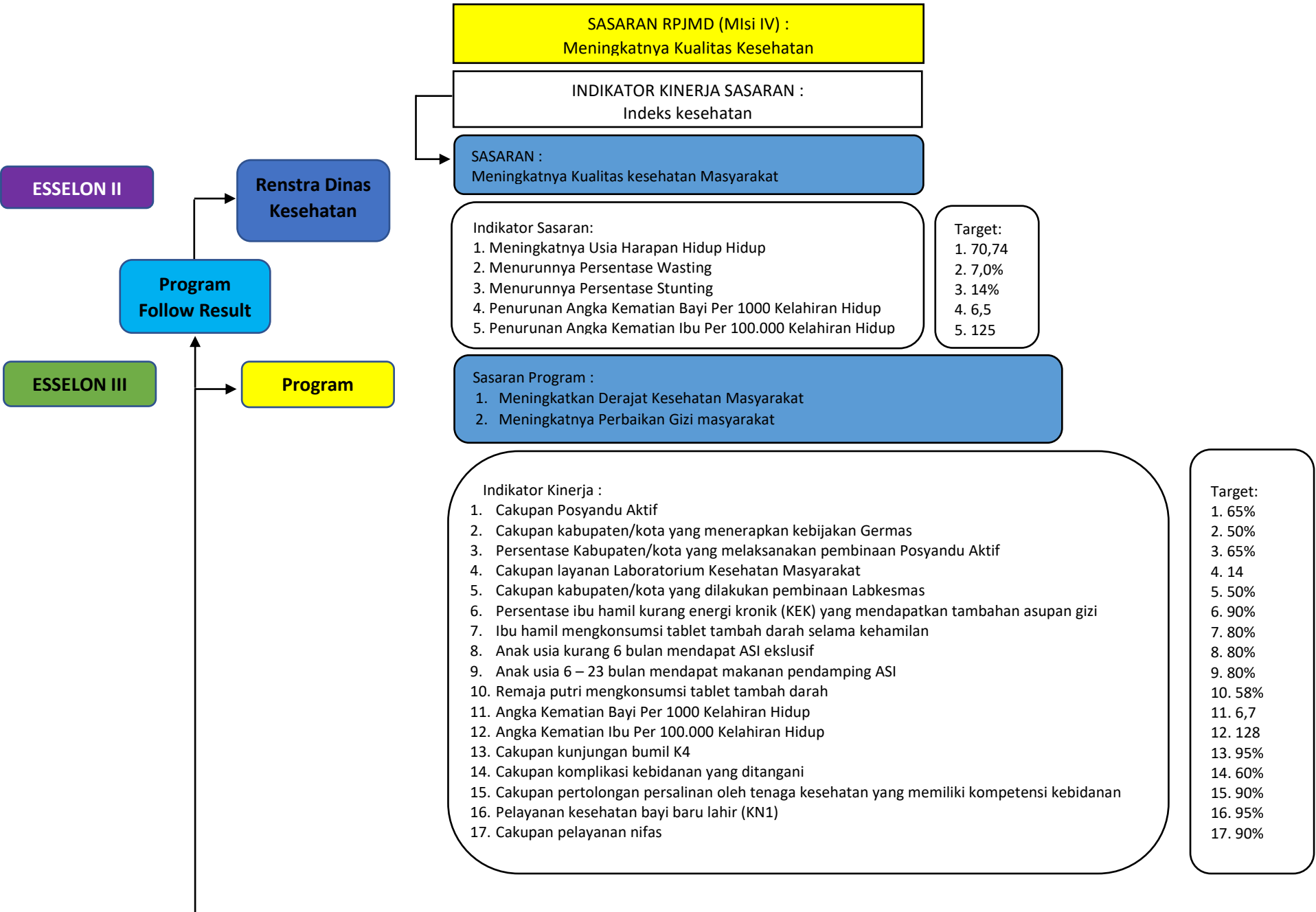


Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing



ESSELON IV

Kegiatan

Indikator Kinerja :

- 18. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
- 19. Cakupan kunjungan bayi
- 20. Pelayanan kesehatan Anak Balita
- 21. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
- 22. Cakupan peserta KB Aktif
- 23. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)
- 24. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota sehat (KKS)
- 25. Persentase Sarana air minum yang di awasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
- 26. Kabupaten/kota yang rumah sakitnya melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan 40%
- 27. Kabupaten/kota yang memiliki tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi standar 50%
- 28. Kabupaten/kota yang memiliki tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar

Target:

- 18. 45%
- 19. 45%
- 20. 85%
- 21. 100%
- 22. 75%
- 23. 60%
- 24. 10 Kab/kota
- 25. 80%
- 26. 80%
- 27. 80%
- 28. 80%

Sasaran Kegiatan :
Meningkatkan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja :

- 1. Cakupan Posyandu Aktif
- 2. Cakupan kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas
- 3. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif
- 4. Cakupan layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- 5. Cakupan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Labkesmas

Sasaran Kegiatan :
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Perbaikan Gizi masyarakat

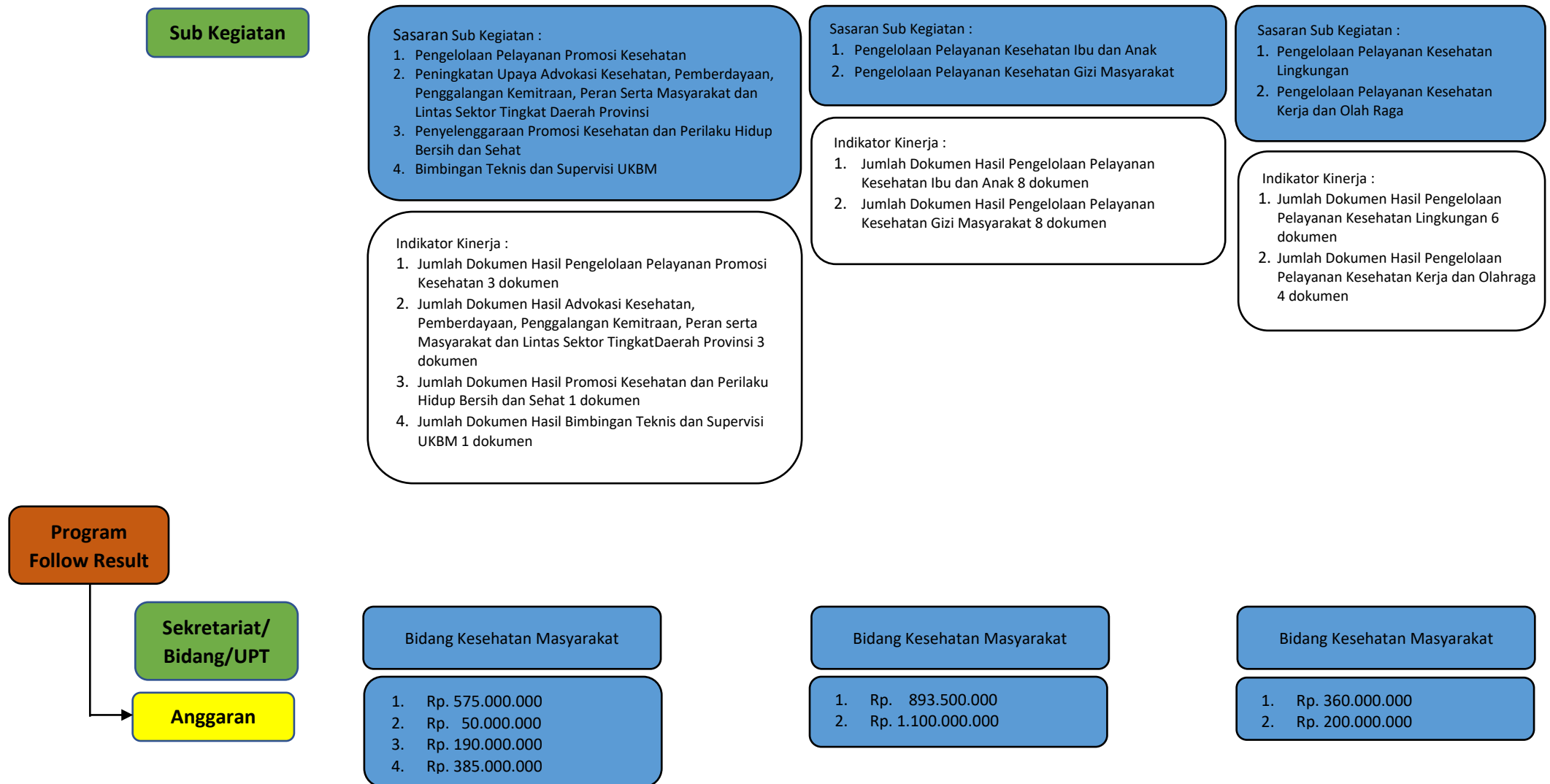
Indikator Kinerja :

- 1. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi
- 2. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan
- 3. Anak usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif
- 4. Anak usia 6 – 23 bulan mendapat makanan pendamping ASI
- 5. Remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah
- 6. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
- 7. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
- 8. Cakupan kunjungan bumil K4
- 9. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- 10. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- 11. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1)
- 12. Cakupan pelayanan nifas
- 13. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
- 14. Cakupan kunjungan bayi
- 15. Pelayanan kesehatan Anak Balita
- 16. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
- 17. Cakupan peserta KB Aktif

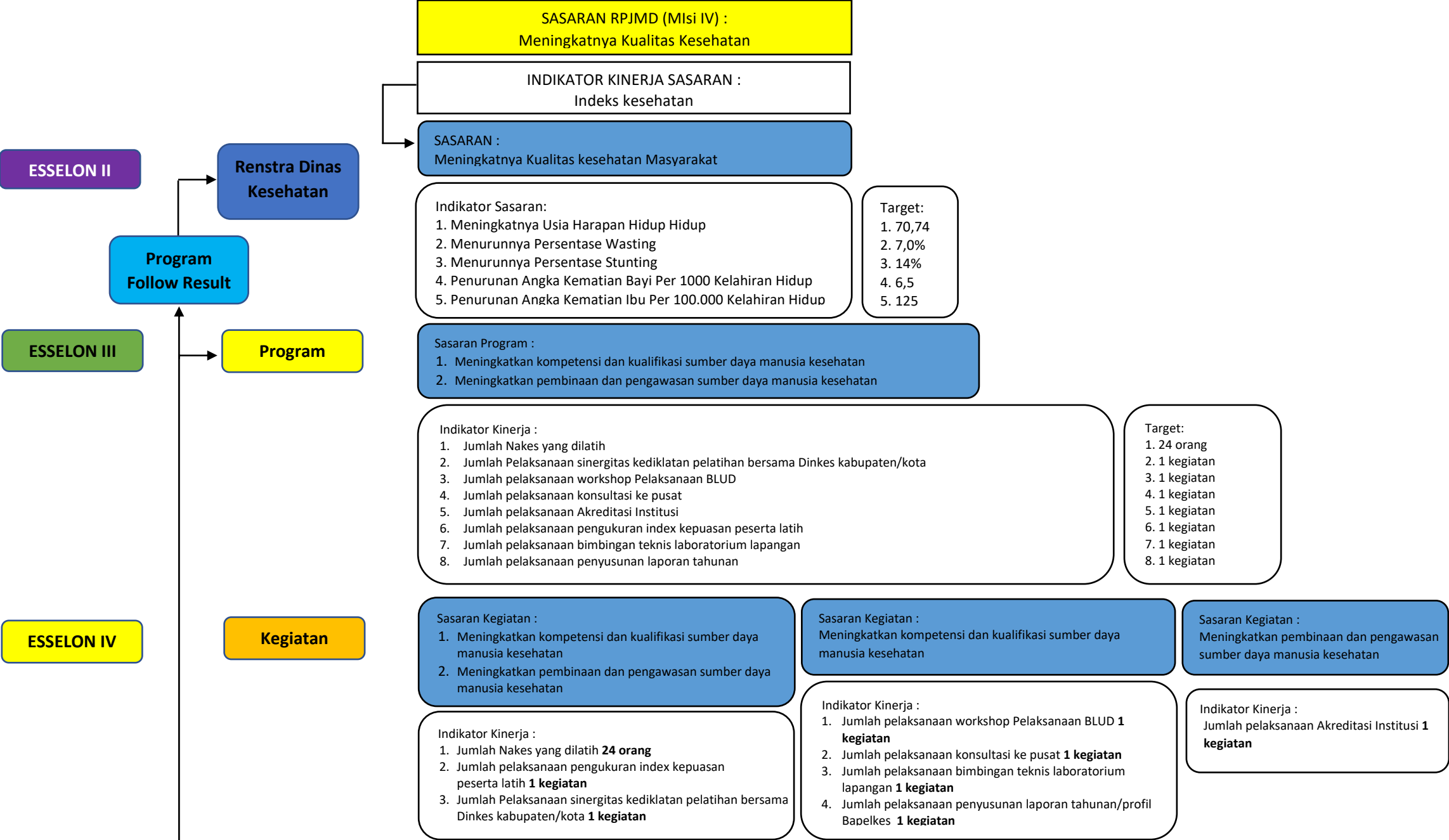
Sasaran Kegiatan :
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

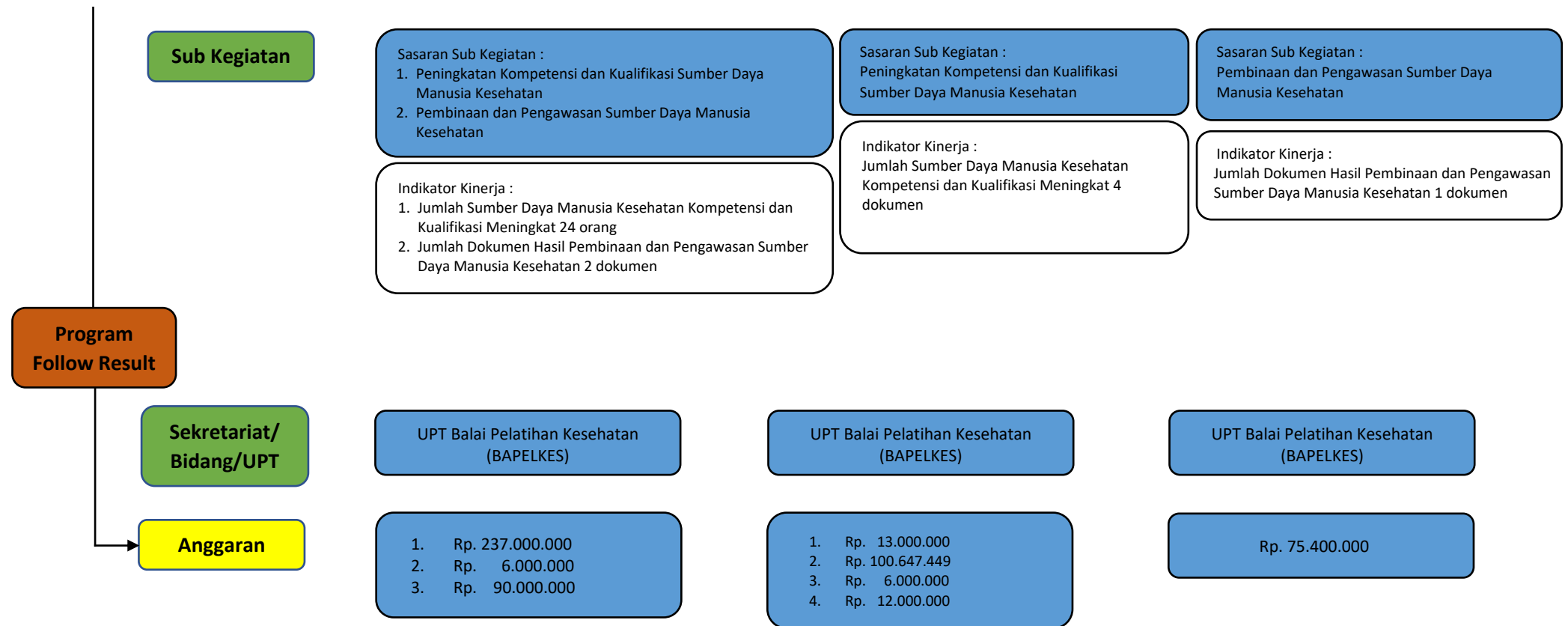
Indikator Kinerja :

- 1. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)
- 2. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota sehat (KKS)
- 3. Persentase Sarana air minum yang di awasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
- 4. Kabupaten/kota yang rumah sakitnya melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan 40%
- 5. Kabupaten/kota yang memiliki tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi standar 50%
- 6. Kabupaten/kota yang memiliki tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar

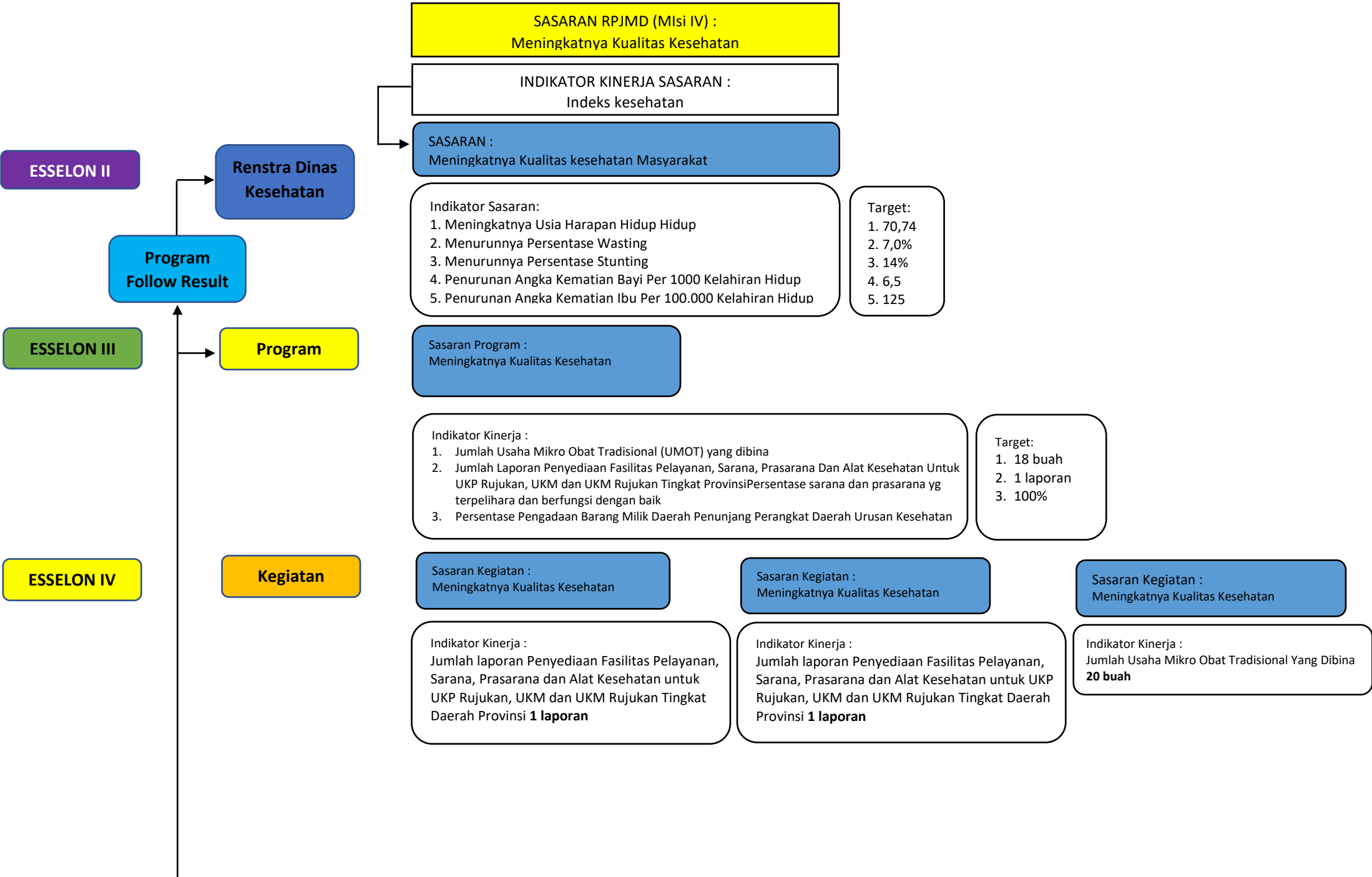


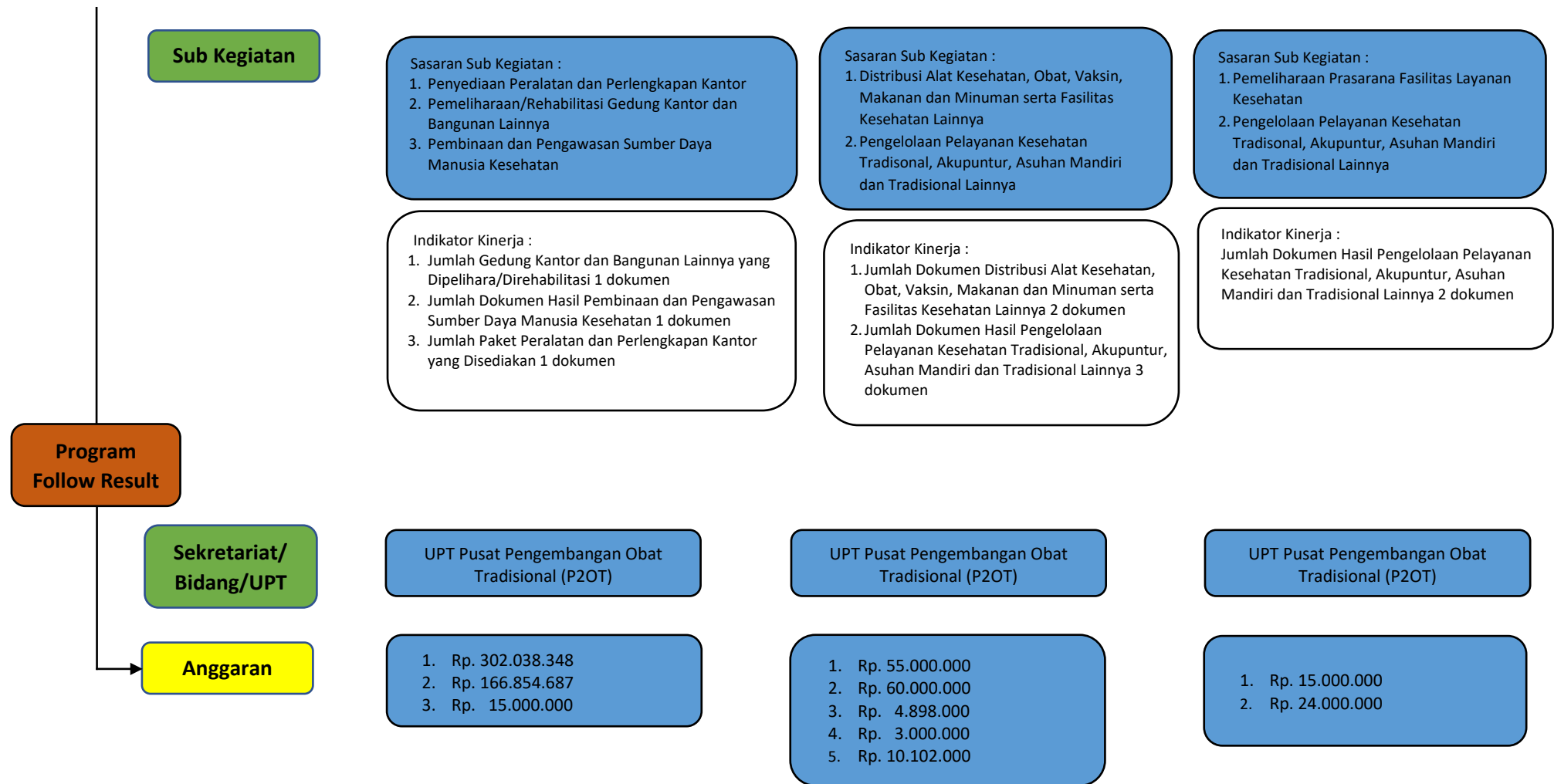
Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





Cascading Pencapaian Misi IV :
Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing





2024



RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

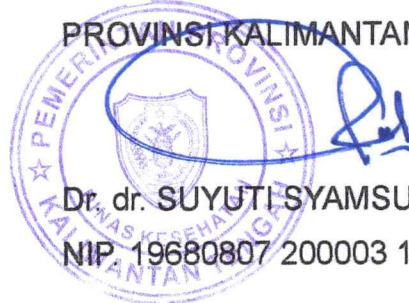
Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nyalah dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disusun tepat pada waktunya.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Palangka Raya,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	4
BAB II RENCANA AKSI	
A. Rencana Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
C. Perjanjian Kinerja (PK)	8
D. Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	8
Tabel 2.3	Program dan Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	9
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	12
Tabel 2.5	Target Rencana Aksi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	14
Tabel 2.6	Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan rencana aksi adalah tersusunnya rencana aksi capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan tujuan disusunnya rencana aksi yaitu:

1. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

3. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
4. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

BAB II

RENCANA AKSI

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan RENSTRA telah mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang Kesehatan Masyarakat yang diukur melalui Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikatornya Angka Usia Harapan Hidup, Perbaikan Gizi Masyarakat dengan indikatornya Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting, dan Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak dengan indikatornya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.

Adapun Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu **"Kalimantan Tengah Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis)".**

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **"Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing"**, Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan

dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan OPD sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat OPD sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,44
2.	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,3
		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	16
3.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,7
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	128

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,44	Tahun	Jumlah Umur orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu di bagi dengan Jumlah orang meninggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tertentu
Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,3	Persen	(Jumlah balita dengan berat badan/tinggi badan di bawah -2 SD dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
	Persentase Balita Stunting	16	Persen	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di Provinsi Kalimantan Tengah dibagi jumlah balita yang diukur di Provinsi Kalimantan Tengah) x 100 persen
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,7	Indeks	(Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 1000
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128	Indeks	(Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma di bagi dengan jumlah lahir hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sama) x 100.000

Tabel 2.3

**Program dan Anggaran Untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			39.201.880.704
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		282.500.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		183.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		79.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29.220.123.992
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26.700.355.192
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.500.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4.346.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		5.422.400
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		240.464.600
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.121.500
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		30.000.000
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		201.356.700
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.986.400
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		670.110.725
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		385.110.725
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		260.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		25.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.838.020.038
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		144.020.038
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		150.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		120.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		150.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		120.000.000
		Penyediaan Bahan/Material		225.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		50.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		699.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		25.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		155.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.039.734.700
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.116.000
		Pengadaan Mebel	95.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	302.038.348
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	518.580.352
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.509.071.960
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.648.154.200
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.755.917.760
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.401.854.687
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.116.854.687
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		33.745.199.325
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.632.819.332
		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.170.026.735
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25.000.000
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.595.500.797
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.005.714.167
		Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.836.577.633
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	26.278.460.945
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.400.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	326.784.178
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.473.276.775
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	135.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	320.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	750.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	240.452.220

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	360.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	575.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	168.452.250
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.163.478.096
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	60.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	50.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.941.819.278
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	898.778.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.398.670.700
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.574.000.000
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	334.948.998
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	52.800.450
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	55.000.000
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	380.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	380.000.000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	453.919.048
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	200.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	253.919.048
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.682.802.780
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.303.000.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.230.000.000
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	73.000.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.379.802.780
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	661.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	718.802.780
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	127.050.000
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	127.050.000
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	127.050.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	485.000.000
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	435.000.000
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	435.000.000
	TOTAL PAGU ANGGARAN			80.241.932.807

D. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

**Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angkatan Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	16	16	16	16	16
3.	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Persen	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Persen	128	128	128	128	128

Tabel 2.5

**Target Rencana Aksi Sasaran Strategis dan Program
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angkatan Usia Harapan Hidup (tahun)	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4	3	4	SEKRETARIAT
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Wasting Balita	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4	3	4	SEKRETARIAT
		Persentase Balita Stunting (%)	16	16	16	16	16		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1	-	-	SEKRETARIAT
3.	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	-	-	SEKRETARIAT
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	128	128	128	128	128		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	-	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	-	-	-	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan rekonsialisasi keuangan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan rekonsialisasi keuangan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan keuangan	-	2	-	2	SEKRETARIAT
									Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi keuangan SKPD	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Asuransi Bangunan Gedung Kantor milik SKPD	6	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Kabupaten /Kota yang mendapat Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD)	3	3	3	4	SEKRETARIAT
									Jumlah rutin/berkala Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1	1	1	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah layanan pengelolaan manajemen jabatan fungsional aparatur	-	-	-	1	SEKRETARIAT
									Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan yang selaras antar lintas sektor	-	-	-	1	SEKRETARIAT
									Jumlah pengelola program pembinaan jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi kriteria dalam hal pengorganisasian dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan di unit kerjanya di Kabupaten / Kota	-	-	200	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	1	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	30	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2	2	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1	1	-	SEKRETARIAT
									Jumlah paket rehab instalasi listrik gedung dinkes	-	1	1	-	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2	-	2	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2	-	2	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	-	-	2	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	-	-	2	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	-	-	SEKRETARIAT
									Tersedianya Spanduk dan Papan Ucapan	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Tersedianya Mobil Hias dan Karnaval Budaya	-	1	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	1	SEKRETARIAT
									Tersedianya makan dan minum rapat	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	3	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Adanya kesepahaman antara pusat dan provinsi dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Adanya kesepahaman antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam hal pelaksanaan kegiatan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Tersedianya makan dan minum rapat	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1	-	1	SEKRETARIAT
									Persentase tersedianya Pelayanan Kearsipan Kepegawaian yang mudah diakses	-	100%	-	-	SEKRETARIAT
									Persentase tersedianya sistem kearsipan online	-	-	-	100%	SEKRETARIAT
									Persentase kualitas Layanan E- Health	0	0	0	90%	SEKRETARIAT
									Jumlah dan jenis informasi yang tersedia di PPID, serta kemudahan akses bagi masyarakat	0	0	0	1	SEKRETARIAT
									Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1	-	PPOT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Persentase peralatan Gedung kantor yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan	50%	30%	10%	20%	SEKRETARIAT
									Persentase Perbaikan Instalasi Listrik ebagai penunjang kelancaran pekerjaan	-	-	-	100%	SEKRETARIAT
									Terpeliharanya Taman yang tertata dengan rapi	-	-	-	100%	SEKRETARIAT
									Persentase peralatan komputer yang tersedia sebagai penunjang pekerjaan	50%	50%	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan Tersedianya materai dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan se-kalteng	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan Tersedianya materai dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan se-kalteng	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah bulan terpenuhinya bahan kelengkapan peralatan kerja Penunjang	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honorer	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Medis Labkes yang bertujuan Adanya Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN UPT. Labkes dan Kalibrasi Provinsi	1	1	1	1	LABKESDA
									Jumlah bulan tersedianya jasa retribusi sampah	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10%	40%	20%	30%	SEKRETARIAT
									Persentase anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional R-4	12.50	50	12.50	25	SEKRETARIAT
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	12.50	25	13	SEKRETARIAT
									Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1	1	0	SEKRETARIAT
									Jumlah Gedung yang terpelihara	0,5 paket	-	0,5 paket	-	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Ruangan yang di rehab ringan	-	1	-	-	SEKRETARIAT
									Terlaksananya layanan Pengadaan BMD Penunjang pada urusan kesehatan	-	1	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Rumah Dinas yang akan direhab	1	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Ruangan yang di rehab ringan	-	-	1	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1	1	-	SEKRETARIAT
									Persentase anggaran untuk tersedianya Sarana Jaringan LAN (Local Area Network)	-	50%	50%	-	SEKRETARIAT
									Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	-	1	-	-	SEKRETARIAT
								Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah laporan Pengawasan Pembangunan RS Rujukan Kelas B	-	-	-	1	YANKES
									Jumlah laporan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	-	-	-	1	YANKES
									Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin dilakukan secara berkala	-	-	-	1	SDK
									Jumlah Peralatan Laboratorium yang di kalibrasi	-	-	1	-	LABKESDA
									Jumlah peralatan laboratorium kesehatan yang dipelihara	-	-	1	-	LABKESDA
									Jumlah persentase dan unit dari keseluruhan kegiatan DAK Disik tahun berjalan	-	2	2	-	LABKESDA

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Peralatan Laboratorium yang di kalibrasi	8	-	-	-	PPOT
									Terlaksananya Distribusi Obat dan vaksin ke Kabupaten/Kota	3	4	4	3	SDK
									Terlaksananya Distribusi Obat dan vaksin ke Kabupaten/Kota	3	4	4	3	SDK
									Jumlah Puskesmas dan RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	3	4	4	3	SDK
									Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-	1	-	1	SDK
									Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi laporan signap sarana pelayanan kefarmasian di Dinas Kesehatan Kab/Kota	3	4	4	3	SDK
									Jumlah Peralatan P4TO yang dipelihara dan direvitalisasi	5	7	-	-	PPOT
									Persentase kesesuaian obat untuk Fasilitas kesehatan Kab/Kota sesuai dengan Formularium Nasional	2	3	3	2	SDK
									Tersedianya obat buffer dan bahan habis pakai	-	-	-	1	SDK
									Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat	-	-	-	1	SDK
									Terlaksananya kegiatan pemusnahan Obat dan BHP	-	-	-	1	SDK
									Tersedianya obat program Kesehatan Ibu	-	-	-	1	SDK
									Tersedianya obat program Kesehatan Anak	-	-	-	1	SDK

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Tersedianya obat program Gizi	-	-	-	1	SDK
									Tercapainya 50.000 pengujian/pemeriksaan sampel/specimen dalam 1 (satu) tahun	1	1	1	1	LABKESDA
									Tercapainya 50.000 pengujian/pemeriksaan sampel/specimen dalam 1 (satu) tahun	1	1	1	1	LABKESDA
									Terlayannya Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	233455	233455	233455	233455	SEKRETARIAT
									Terlaksananya kegiatan Penguatan Siscobidkes SPM Kab/Kota Tk. Provinsi	-	-	34	-	SEKRETARIAT
									Tersedianya Buffer Stock PMT Ibu Hamil & BALITA (Bencana)	-	-	-	678	SEKRETARIAT
									Tersedianya KIT PPAM Kespro Bencana	-	-	-	54	SEKRETARIAT
									Terlayannya Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	2858	2858	2858	2859	SEKRETARIAT
									Terlaksananya Penyelidikan Epidmiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana	3	3	3	3	SEKRETARIAT
									Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	8	4	-	-	KESMAS
									Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	1	-	-	-	KESMAS
									Jumlah orang yang melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	1	-	1	-	KESMAS

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Puskesmas membina sekolah minimal 4x dalam setahun	6	4	4	-	KESMAS
									Terlaksananya Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting (DAK NON FISIK)	-	1	-	1	KESMAS
									Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat pendek) di Kab/kota 15.34% di tahun 2024	-	1	1	-	KESMAS
									Monitoring dan evaluasi kesehatan reproduksi di Kalimantan Tengah	-	-	8	6	KESMAS
									Jumlah laporan hasil Sosialisasi/Advokasi/Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia	-	1	-	-	KESMAS
									Jumlah laporan hasil pelayanan operasi katarak	-	1	-	-	YANKES
									Presentase anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	27	14	-	11	KESMAS
									Persentase Remaja Puteri mengkonsumsi TTD	-	5	2	-	KESMAS
									Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	8	17	11	12	KESMAS
									Persentase ibu Hamil KEK mendapat asupan gizi	0	0	7	7	KESMAS
									Persentase ibu Hamil mengkonsumsi TTD selama kehamilan	13	9	30	22	KESMAS
									Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	8 kali	7 kali	8 kali	8 kali	KESMAS

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	-	1 kali	-	-	KESMAS
									Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	KESMAS
									Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	5 kab	4 kab	6 kab	-	KESMAS
									Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas	-	3 kab	5 kab	-	KESMAS
									Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Intervensi Kesehatan Lingkungan	3	4	4	3	KESMAS
									Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program kesehatan lingkungan ke kementerian kesehatan RI	-	-	4	2	KESMAS
									Terlaksananya orientasi penyelenggaraan Kesehatan lingkungan bagi petugas kab/kota dan puskesmas	1	1	1	1	KESMAS
									Pergerakan massa dalam mendukung implementasi gerakan masyarakat hidup sehat	1	1	1	1	KESMAS
									Terlaksananya layanan media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi kesehatan terkait Germas	1	2	-	-	KESMAS
									Penggerakan masyarakat "cegah stunting itu penting" dilaksanakan 3 kali	1	1	1	-	KESMAS

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	1	1	1	PPOT
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	1	1	1	PPOT
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1	1	1	PPOT
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	1	-	1	PPOT
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	1	1	1	PPOT
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	1	-	-	PPOT
									Jumlah Kab/kota yang angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90% (kab/kota)	3	4	4	3	P2P

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10%	3	4	4	3	P2P
									Meningkatnya jumlah pengetahuan pengelola program Diare, Tyfoid dan Hepatitis (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Terlaksananya Koordinasi dengan petugas pengelola dalam tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90% (kab/kota)	3	4	4	3	P2P
									Penggunaan TCM untuk penegakan diagnosis TB >50%	3	4	4	3	P2P
									Jumlah Kabupaten/Kota Bebas Frambusia dan melaksanakan surveilans frambusia	3	4	4	3	P2P
									Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10% (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Angka Bebas Jentik di Kabupaten meningkat (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Terselenggaranya koordinasi dan penguatan pengendalian wolbachia (Provinsi)	3	4	4	3	P2P

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat melaksanakan tes dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS	3	4	4	3	P2P
									Terselenggaranya koordinasi dan penguatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit	1	1	1	1	P2P
									Jumlah kab/kota yang melaksanakan implementasi KTR di 7 tatanan	3	4	4	3	P2P
									Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40 % populasi	3	4	4	3	P2P
									Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada 40% populasi (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun (Kabupaten Kota)	3	4	4	3	P2P
									Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada ≥ 80 % populasinya	3	4	4	3	P2P
									Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun	3	4	4	3	P2P
									Jumlah spesimen PD3I yang dilakukan pemeriksaan	1	-	-	-	P2P
									Jumlah kab/kota yang dilakukan moneyv haji	3	4	5	-	P2P

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan layanan	3	4	5	-	P2P
									Jumlah kabupaten yang dilakukan monev jaminan kesehatan	3	4	5	-	YANKES
									Jumlah laporan hasil sinkronisasi dan konsolidasi Program JKN	-	-	2	-	YANKES
									Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan JKN	-	-	1	-	YANKES
									Jumlah peserta PBI di Prov Kalteng	1,565,911	1,565,911	1,823,201	1,308,621	YANKES
									Daerah yang secara cepat melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon	2	4	5	3	P2P
									Berkurangnya kejadian penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat	2	4	5	3	P2P
									Terlaksananya koordinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	-	-	1	-	P2P
									Untuk mendapatkan kasus/kontak yang adekuat	2	4	5	3	P2P
									Jumlah daerah yang melakukan sistem kewaspadaan dini dan respon	2	4	5	3	P2P
									Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)	2	4	5	3	P2P
									Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyebaran kasus dan temuan kasus yang didapatkan	2	4	5	3	P2P

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Rabies (Pencegahan dan Pengendalian kasus GHPR) (Kabupaten Kota)	2	4	5	3	P2P
									Kasus kusta tanpa cacat (Kabupaten Kota)	2	4	5	3	P2P
									Terlaksananya Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons)	-	-	-	1	KESMAS
									Koordinasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal	-	1	1	-	P2P
									Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan transformasi kesehatan	-	20	10	9	SEKRETARIAT
									Jumlah Kebijakan bidang kesehatan yang tersinergitas antar bidang dan program pada kab/kota (orang)	250	-	-	-	SEKRETARIAT
									Jumlah kab/kota yang memiliki layanan kesehatan standar (Kab/kota)	-	3	8	3	SEKRETARIAT
									Jumlah kab/kota yang melaksanakan DAK bidang kesehatan sesuai ketentuan (kab/kota)	-	7	4	3	SEKRETARIAT
									Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan program kesehatan	-	6	5	3	SEKRETARIAT
									Jumlah dokumen Inovasi Dinas Kesehatan yang tersusun	-	-	1	-	SEKRETARIAT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah dokumen Inovasi Dinas Kesehatan yang tersusun	-	-	1	-	SEKRETARIAT
									Jumlah laporan kegiatan tim pelayanan kesehatan lapangan	-	-	-	1	YANKES
									Jumlah kabupaten yang dilakukan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	2	4	3	1	YANKES
									Jumlah kabupaten yang dilakukan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	2	4	3	1	YANKES
									Jumlah Laporan hasil monev Tim Pembina Cluster Binaan /Tim pembina Mutu Dinas Kesehatan	1	1	1	1	YANKES
									Jumlah Kabupaten yang telah dilaksanakan bimbingan dan evaluasi pelayanan kesehatan primer	4	3	2	-	YANKES
									Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan	-	1	-	-	YANKES
									Jumlah kabupaten yang dilakukan monev layanan UTD daerah	2	5	4	-	YANKES
									Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan UTD Daerah	-	1	-	-	YANKES
									Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik Daerah	-	1	-	-	YANKES
									Pemantauan pelaksanaan imunisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan	1	2	2	1	P2P

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Terlaksananya manajemen supervisi pada kab/kota dan puskesmas 14 kab/kota	2	2	3	1	P2P
									Jumlah dugaan kasus KIPI yang dapat ditangani atau tercatat	2	3	2	2	P2P
									Jumlah kab/kota yang melaksanakan Akselerasi kegiatan imunisasi dalam rangka evaluasi dan validasi data capaian imunisasi	-	1	-	-	P2P
									Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I	2	4	5	3	P2P
									Data hasil pelaksanaan BIAS dan analisa UCI desa	1	4	4	2	P2P
									Jumlah kabupaten yang dilakukan jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan	-	2	3	1	YANKES
									Jumlah kabupaten yang mendapatkan analisis hasil PIS-PK Terintegrasi	2	3	2	-	YANKES
									Jumlah dokumen buku profil kesehatan dan buku saku kesehatan dinkes prov.kalteng yang tersusun tepat waktu (buku)	-	-	1	-	SEKRETARIAT
									Terlaksananya pertemuan PMKDR Tk. Provinsi	-	-	32	-	SEKRETARIAT
									Terlaksananya pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN pemegang data profil kesehatan dan SIK	-	-	32	-	SEKRETARIAT
									Jumlah kabupaten yang dilakukan money Sistrute	2	5	5	2	YANKES

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah kabupaten yang dilakukan moneyv dan bimtek manual rujukan	3	4	4	2 / 1	YANKES
									Meningkatnya Parameter Laboratorium yang di ikut sertakan dalam Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	-	1	1	-	LABKESDA
									Jumlah parameter Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang di ikutkan dalam Uji Banding setiap tahun	-	-	1	-	LABKESDA
									Meningkatnya Parameter Ruang Lingkup Pengujian Laboratorium yang akan terakreditasi di UPT.Lab Kesehatan dan Kalibrasi Prov. Kal-Teng	-	-	1	-	LABKESDA
									Audit Penerapan Pelaksanaan Dokumen Mutu oleh seluruh personil baik administratif maupun teknis dengan baik.	-	1	-	-	LABKESDA
									Sistem Mutu oleh Seluruh Personel Teknis dan Adminstrasi di UPT Labkeskal secara terus menerus dengan baik dari Laporan KUM serta Sasaran Tindak lanjut Perbaikan/Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.	-	-	-	1	LABKESDA
									Semua sarana prasarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium kesehatan yang direncanakan tersedia	-	1	-	-	LABKESDA

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Semua limbah (limbah B3, sampah, limbah cair, limbah gas) yang dihasilkan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	3	3	3	LABKESDA
									Jumlah pengujian/pemeriksaan sampel/spesimen	1	1	1	1	LABKESDA
									Jumlah Kegiatan Pengelolaan K3 yang dilaksanakan	-	1	-	-	PPOT
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang diberi bantuan pendidikan di wilayah prov.kalteng	-	-	32	-	SDK
									Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat predikat tenaga kesehatan teladan se Kalteng	-	50	-	-	SDK
									Jumlah daerah atau wilayah puskesmas yang memenuhi 9 nakes	-	-	14	-	SDK
									Jumlah nakes yang ditingkatkan pengetahuan melalui peningkatan kapasitas nakes teladan	-	-	-	1	SDK
									Jumlah dinkes yang ditingkatkan pengetahuan melalui peningkatan kapasitas	-	-	1	-	SDK
									Jumlah SDM Farmasi yang mengikuti kegiatan pengelolaan Vaksin	5	-	-	-	SDK
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	-	1	5	1	PPOT

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	-	-	21	-	BAPELKES
									Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan Bapelkes	-	-	-	1	BAPELKES
									Jumlah pengelola SDMK se Kalteng	-	30	-	-	SDK
									Jumlah Fasilitasi koordinasi program dokter internsip ke kab/kota yang dikunjungi	6	-	8	-	SDK
									Jumlah Dokumen Penilaian Akreditasinya Institusi Bapelkes	-	1	-	-	BAPELKES
									Jumlah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang melaksanakan konsultasi guna meningkatkan Mutu Kediklatan dan terlaksananya Akreditasi Institusi	5	3	3	3	BAPELKES
									Jumlah dokumen/ laporan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data Akreditasi Bapelkes	-	-	7	-	BAPELKES
									Jumlah Hasil Laporan Pengukuran Index Kepuasan Peserta Latih	-	-	1	-	BAPELKES
									Jumlah dokumen workshop pelaksanaan BLUD Institusi BAPELKES	1	-	-	-	BAPELKES
									Jumlah Laporan Tahunan (Profil Bapelkes) yang tersusun	-	-	-	1	BAPELKES

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah Dinkes Kab/ Kota yang melaksanakan MoU terkait pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berjalan	8	6	-	-	BAPELKES
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	-	1	-	PPOT
									Meningkatnya Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	-	-	1	-	KESMAS & LABKES
								Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sarana yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	-	1	SDK
									Jumlah sarana yang dilaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Provinsi	-	-	-	1	SDK
								Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah tenaga Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi yang melaksanakan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI	6	-	-	-	Promkes & PM
									Jumlah Kab/Kota yang menjadi sasaran pendampingan dan pembinaan UKBM alam Rangka Posyandu Aktif oleh Dinkes Prov bersama DWP Unit Dinkes Prov.Kalteng	3	3	-	-	Promkes & PM
									Jumlah kegiatan seminar kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	-	-	-	1	Promkes & PM

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Jumlah kegiatan refreshing Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1	-	Promkes & PM
									Jumlah Kab/Kota yang dilakukan supervisi Fasilitatif Data UKBM	3	4	-	-	Promkes & PM

Tabel 2.6

Rencana Aksi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								80,241,932,807	25,273,677,432	21,342,852,046	22,392,164,646	11,233,238,683	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								39,201,880,702	17,647,320,301	9,088,770,198	8,506,572,636	3,959,217,567	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								282,500,000	58,506,600	117,424,694	103,145,614	3,423,092	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	3	4	Penyusunan dokumen perencanaan	183,500,000	36,686,600	90,244,694	53,145,614	3,423,092	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	3	4	Penyusunan dokumen perencanaan	183,500,000	36,686,600	90,244,694	53,145,614	3,423,092	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	-	-	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	0	10,000,000	0	0	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	-	-	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	10,000,000	0	0	0	SEKRETARIAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	-	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,000,000	11,500,000	17,500,000	50,000,000	0	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								29,220,123,992	15,245,098,668	5,981,848,590	5,977,615,974	2,015,020,760	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								26,700,355,192	12,744,209,588	5,977,615,973	5,977,075,974	2,001,453,657	
Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Bulan	3	3	3	3	Terlaksananya Belanja Pegawai	26,700,355,192	12,744,209,588	5,977,615,973	5,977,075,974	2,001,453,657	SEKRETARIAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	-	-	-	Penyerahan dana hibah ke lembaga penerima hibah	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	
Hibah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	-	-	-	Penyerahan dana hibah ke lembaga penerima hibah	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	SEKRETARIAT
Hibah Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	-	-	-	Penyerahan dana hibah ke lembaga penerima hibah	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan rekonsiliasi keuangan	Laporan	3	3	3	3	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan	4,346,400	889,080	1,458,660	540,000	1,458,660	
Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan rekonsiliasi keuangan	Laporan	3	3	3	3	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan	4,346,400	889,080	1,458,660	540,000	1,458,660	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
											I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan keuangan	Dokumen	-	2	-	2	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Laporan keuangan	10,000,000	0	0	0	10,000,000	SEKRETARIAT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi keuangan SKPD	Laporan	3	3	3	3	Terlaksananya Laporan Capaian dan Realisasi Keuangan SKPD	5,422,400	0	2,773,957	0	2,648,443	SEKRETARIAT
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								240,464,600	35,571,500	79,521,568	78,568,000	46,803,532	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-	-	-	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,121,500	5,121,500	0	0	0	SEKRETARIAT
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Asuransi Bangunan Gedung Kantor milik SKPD	Unit	6	-	-	-	Terlaksananya Asuransi Bangunan Gedung Kantor milik SKPD	30,000,000	30,000,000	0	0	0	SEKRETARIAT
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kabupaten /Kota yang mendapat Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD)	Kabupaten	3	3	3	4	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	201,356,700	0	78,118,000	78,118,000	45,120,700	SEKRETARIAT
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rutin/berkala Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Terlaksananya rutin/berkala Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,986,400	450,000	1,403,568	450,000	1,682,832	SEKRETARIAT
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								670,110,725	29,810,294	175,447,506	391,404,107	73,448,818	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	1	1	1	Melakukan pendataan dan pengolahan administrasi perihal kepegawaian	385,110,725	29,810,294	74,737,506	250,914,107	29,648,818	SEKRETARIAT
		Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Aparatur (orang)	Jumlah layanan pengelolaan manajemen jabatan fungsional aparatur	Layanan	-	-	-	1	Melakukan layanan pengelolaan manajemen jabatan fungsional aparatur	145,110,725	28,962,690	42,966,000	43,533,217	29,648,818	SEKRETARIAT
		Sinergitas Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan yang selaras antar lintas sektor	Laporan	-	-	-	1	Melaksanakan koordinasi pembinaan dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan yang selaras antar lintas sektor	75,000,000	847,604	31,771,506	42,380,890	0	SEKRETARIAT
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten / Kota	Jumlah pengelola program pembinaan jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi kriteria dalam hal pengorganisasian dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan di unit kerjanya di Kabupaten / Kota	Orang	-	-	200	-	Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi kriteria dalam hal pengorganisasian dan penatalaksanaan jabatan fungsional kesehatan di unit kerjanya di Kabupaten / Kota	165,000,000	0	0	165,000,000	0	SEKRETARIAT
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	1	-	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	260,000,000	0	100,710,000	115,490,000	43,800,000	SEKRETARIAT
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	-	-	30	-	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000	0	0	25,000,000	0	SEKRETARIAT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,838,020,038	382,401,686	701,162,571	320,392,991	434,062,790	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	2	2	-	Menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	144,020,038	0	70,033,373	73,986,665	0	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	1	-	Menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94,020,038	0	45,033,373	48,986,665	0	SEKRETARIAT
			Rehab Instalasi listrik Gedung Dinkes	Jumlah paket rehab instalasi listrik gedung dinkes	Paket	-	1	1	-	Menyediakan paket rehab instalasi listrik gedung dinkes	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	SEKRETARIAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	2	-	2	Menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000	0	75,014,872	0	74,985,128	SEKRETARIAT
			Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	2	-	2	Menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000	0	75,014,872	0	74,985,128	SEKRETARIAT
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	-	-	2	Menyediakan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	-	-	2	Menyediakan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	-	-	-	Menyediakan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150,000,000	13,500,000	61,000,000	13,500,000	62,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan (bulan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	Menyediakan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150,000,000	13,500,000	61,000,000	13,500,000	62,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	-	-	Menyediakan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120,000,000	97,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3	Menyediakan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120,000,000	97,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	Menyediakan Paket Bahan/Material yang Disediakan	225,000,000	18,750,000	168,750,000	18,750,000	18,750,000	SEKRETARIAT
			Spanduk dan Papan Ucapan	Tersedianya Spanduk dan Papan Ucapan	Paket	1	-	-	-	Menyediakan Spanduk dan Papan Ucapan	75,219,000	18,750,000	18,969,000	18,750,000	18,750,000	SEKRETARIAT
			Mobil Hias dan Karnaval Budaya	Tersedianya Mobil Hias dan Karnaval Budaya	Paket	-	1	-	-	Menyediakan Mobil Hias dan Karnaval Budaya	149,781,000	0	149,781,000	0	0	SEKRETARIAT
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	1	Menyediakan Fasilitas Kunjungan Tamu	50,000,000	12,606,022	12,464,658	12,464,658	12,464,662	SEKRETARIAT
			Penyediaan makanan dan minuman (bulan)	Tersedianya makan dan minum rapat	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan makan dan minum rapat	50,000,000	12,606,022	12,464,658	12,464,658	12,464,662	SEKRETARIAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	3	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699,000,000	174,750,000	174,750,000	174,750,000	174,750,000	SEKRETARIAT
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya kesepakatan antara pusat dan provinsi dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan	Bulan	3	3	3	3	Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	310,968,000	77,742,000	77,742,000	77,742,000	77,742,000	SEKRETARIAT
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Adanya kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam hal pelaksanaan kegiatan	Bulan	3	3	3	3	Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	339,200,000	84,800,000	84,800,000	84,800,000	84,800,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Tersedianya makan dan minum rapat	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan makanan dan minuman	48,832,000	12,208,000	12,208,000	12,208,000	12,208,000	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	-	1	Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25,000,000	0	10,000,000	0	15,000,000	SEKRETARIAT
		Pengelolaan Perpustakaan dan Arsiparis	Persentase tersedianya Pelayanan Kearsipan Kepegawaian yang mudah diakses	Persen	-	100 %	-	-	Melaksanakan Pelayanan Kearsipan Kepegawaian yang mudah diakses	10,000,000	0	10,000,000	0	0	SEKRETARIAT
		Sistim Kearsipan Online	Persentase tersedianya sistem kearsipan online	Persen	-	-	-	100 %	Menyediakan sistem kearsipan online	15,000,000	0	0	0	15,000,000	SEKRETARIAT
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	155,000,000	38,750,000	38,750,000	38,750,000	38,750,000	SEKRETARIAT
		Pengembangan aplikasi Terpadu Dinas Kesehatan Provinsi (E-Health Dinkes Kalteng)	Presentase kualitas Layanan E- Health	Persen	0	0	0	90%	Pelaksanaan Pengembangan aplikasi Terpadu Dinas Kesehatan Provinsi (E-Health Dinkes Kalteng)	105,000,000	26,250,000	26,250,000	26,250,000	26,250,000	SEKRETARIAT
		Pengembangan dan Pengelolaan PPID	Jumlah dan jenis informasi yang tersedia di PPID, serta kemudahan akses bagi masyarakat	Dokumen	0	0	0	1	Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan PPID	50,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	SEKRETARIAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,039,734,700	368,647,565	500,022,936	27,848,617	143,215,582	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	-	-	-	Melaksanakan pembelian Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,116,000	124,116,000	0	0	0	SEKRETARIAT
		Motor Operasional Dinkes dan UPT	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	-	-	-	Melaksanakan pembelian Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,116,000	124,116,000	0	0	0	SEKRETARIAT
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	-	-	-	Menyediakan mebel yang dibutuhkan	95,000,000	0	95,000,000	0	0	SEKRETARIAT
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	-	-	-	Menyediakan mebel yang dibutuhkan	95,000,000	0	95,000,000	0	0	SEKRETARIAT
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								302,038,348	26,706,533	273,107,957	2,223,858	0	
		Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran untuk UPT P2OT	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	-	Kegiatan dilaksanakan pada TW I-III, berupa pengadaan sarana dan prasarana di UPT PPOT dalam upaya pemenuhan fasilitas gedung yang tersedia guna menunjang upaya pengembangan obat tradisional Tersedianya komputer, perabot kantor, alat listrik, kursi kantor, taman tanaman obat	302,038,348	26,706,533	273,107,957	2,223,858	0	PPOT
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								518,580,352	217,825,032	190,788,800	1,800,000	108,166,520	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase peralatan Gedung kantor yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan	Persentas e	50%	30 %	10%	20%	Melaksanakan Pengadaan peralatan gedung kantor	152,616,520	76,308,260	66,341,740	1,800,000	8,166,520	SEKRETARIAT
		Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikan instalasi listrik	Persentase Perbaikan Instalasi Listrik ebagai penunjang kelancaran pekerjaan	Paket	-	-	-	100 %	Melaksanakan Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikan instalasi listrik	50,000,000	0	0	0	50,000,000	SEKRETARIAT
		Pembuatan dan Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya Taman yang tertata dengan rapi	Paket	-	-	-	100 %	Melaksanakan Pembuatan dan Pemeliharaan Taman	50,000,000	0	0	0	50,000,000	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembelian peralatan komputer & sound system	Persentase peralatan komputer yang tersedia sebagai penunjang pekerjaan	Unit	50%	50 %	-	-	Melaksanakan pembelian peralatan komputer & sound system	265,963,832	141,516,772	124,447,060	0	0	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,509,071,960	1,050,957,989	1,133,077,989	1,127,457,989	1,197,577,993	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	1	Menyediakan jasa surat menyurat	10,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	Jumlah bulan Tersedianya materi dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan se-kalteng	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan materi dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan	10,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	-	1	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,648,154,200	412,038,550	412,038,550	412,038,550	412,038,550	SEKRETARIAT
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Jumlah bulan Tersedianya materi dan benda pos lainnya dan terlaksananya pengiriman surat dan paket sarana kesehatan se-kalteng	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,648,154,200	412,038,550	412,038,550	412,038,550	412,038,550	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	1	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,000,000	18,750,000	28,750,000	23,750,000	23,750,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan terpenuhinya bahan kelengkapan peralatan kerja Penunjang	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan bahan kelengkapan peralatan kerja Penunjang	95,000,000	18,750,000	28,750,000	23,750,000	23,750,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								2,755,917,760	688,669,440	689,289,440	688,669,440	689,289,440	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)	Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulan	3	3	3	3	Tersedianya Jasa jasa administrasi keuangan	716,200,000	178,740,000	179,360,000	178,740,000	179,360,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan jasa kebersihan kantor/Gaji Tenaga Honorer	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honorer	Bulan	3	3	3	3	Tersedianya Jasa jasa kebersihan kantor/Gaji tenaga honorer	1,742,717,760	435,679,440	435,679,440	435,679,440	435,679,440	SEKRETARIAT
			Jasa Medis Balai Labkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Medis Labkes yang bertujuan Adanya Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN UPT. Labkes dan Kalibrasi Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Menyediakan Jasa Medis Pegawai Labkeskal yang dibagikan setiap triwulan	282,000,000	70,500,000	70,500,000	70,500,000	70,500,000	LABKESDA
			Retribusi Sampah Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah bulan tersedianya jasa retribusi sampah	Bulan	3	3	3	3	Menyediakan jasa retribusi sampah	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	SEKRETARIAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,401,854,687	476,325,999	400,264,344	479,599,344	45,665,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10%	40 %	20%	30%	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125,000,000	10,000,000	55,000,000	24,335,000	35,665,000	SEKRETARIAT
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	Persentase anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional R-4	Persen	12.5 0%	50 %	12.5 0%	25%	Menyediakan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	125,000,000	10,000,000	55,000,000	24,335,000	35,665,000	SEKRETARIAT
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50%	12. 50 %	25%	13%	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	30,000,000	25,000,000	35,000,000	10,000,000	SEKRETARIAT
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan)	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Bulan	3	3	3	3	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	30,000,000	25,000,000	35,000,000	10,000,000	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	1	1	0	Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,116,854,687	436,325,999	280,528,688	400,000,000	0
			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinkes	Jumlah Gedung yang terpelihara	Paket	0,5 paket	-	0,5 paket	-	Melakukan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinkes	300,000,000	100,000,000	0	200,000,000	0
			Rehab Ringan Ruang Kerja Kadis Kesehatan	Jumlah Ruangan yang di rehab ringan	Paket	-	1	-	-	Melakukan Rehab Ringan Ruang Kerja Kadis Kesehatan	150,000,000	0	150,000,000	0	0
			Pemeliharaan/rehabilitasi ringan atap, gedung kantor dan pengcatan tembok pagar UPT P2OT	Terlaksananya layanan Pengadaan BMD Penunjang pada urusan kesehatan	Dokumen	-	1	-	-	Kegiatan dilaksanakan pada TW II (Juni), berupa pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantaor dan bangunan lainnya di UPT PPOT dalam upaya pemenuhan fasilitas gedung yang tersedia guna menunjang upaya pengembangan obat tradisional berupa kegiatan pengecatan parkir, pemeliharaan pagar dan selasar	166,854,687	36,325,999	130,528,688	0	0
			Rehab Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang akan direhab	Paket	1	-	-	-	Melakukan Rehab Rumah dinas	300,000,000	300,000,000	0	0	0
			Rehab Ruang rapat pimpinan	Jumlah Ruangan yang di rehab ringan	Paket	-	-	1	-	Melakukan Rehab Ruang rapat pimpinan	200,000,000	0	0	200,000,000	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	1	-	Melaksanakan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000	0	40,000,000	20,000,000	0
			Pemeliharaan daan peningkatan Jaringan LAN	Persentase anggaran untuk tersedianya Sarana Jaringan LAN (Local Area Network)	Persen	-	50 persen	50 persen	-	Melakukan Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan LAN	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
			Pemeliharaan rumah dinas Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	unit	-	1	-	-	Pemeliharaan rumah dinas Dinas Kesehatan	20,000,000	0	20,000,000	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											33,745,199,325	6,830,213,585	11,118,132,406	9,161,051,760	6,635,801,574
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							6,632,819,332	490,268,837	3,070,173,980	1,943,023,183	1,129,353,332	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							1,170,026,735	10,000,003	295,000,000	580,000,000	285,026,732	
			Operasional Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Jumlah laporan Pengawasan Pembangunan RS Rujukan Kelas B	Laporan	-	-	-	1	Melaksanakan pemantauan operasional pembangunan RS Rujukan Kelas B	70,026,735	10,000,003	20,000,000	30,000,000	10,026,732
			Konsultasi Perencanaan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	Jumlah laporan pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	Laporan	-	-	-	1	Menelaah dan mengevaluasi laporan hasil pembangunan RSUD Kelas B wilayah barat tahapan pengawasan berkala (MYC)	1,100,000,000	0	275,000,000	550,000,000	275,000,000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							25,000,000	3,750,000	7,750,000	7,750,000	5,750,000	
			Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin (Bulan)	Pemeliharaan Instalasi Farmasi dan Gudang Vaksin dilakukan secara berkala	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan dilaksanakan rutin bulanan dalam upaya memperbaiki dan memelihara peralatan yang ada di IF	25,000,000	3,750,000	7,750,000	7,750,000	5,750,000
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							1,595,500,797	15,000,000	1,129,500,000	451,000,797	0	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Peralatan Laboratorium yang di kalibrasi	Dokumen	-	-	1	-	Kegiatan dilaksanakan dalam upaya tersedianya peralatan laboratorium yang berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi teknisnya sehingga data pengujian yang dihasilkan memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Pelaksanaan pada TW III (Agustus) 2024	50,000,000	0	0	50,000,000	0	LABKESDA
			Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Kesehatan (Alat)	Jumlah peralatan laboratorium kesehatan yang dipelihara	Dokumen	-	-	1	-	Tersedianya peralatan laboratorium kesehatan yang senantiasa berfungsi dengan baik dan benar sesuai spesifikasi teknisnya sehingga data pengujian yang dihasilkan senantiasa dalam tingkat akurasi dan presisi yang tinggi	50,000,000	0	0	50,000,000	0	LABKESDA
			Pengadaan labkesda untuk penguatan sistem kesehatan (DAK FISIK)	Jumlah persentase dan unit dari keseluruhan kegiatan DAK Disik tahun berjalan	Dokumen	-	2	2	-	kegiatan dilaksanakan dalam upaya tersedianya peralatan penunjang untuk menguatkan sistem kesehatan yang berjalan di labkeskal	1,480,500,797	0	1,129,500,000	351,000,797	0	LABKESDA
			Kalibrasi Peralatan Laboratorium UPT P2OT	Jumlah Peralatan Laboratorium yang di kalibrasi	Unit	8	-	-	-	Kegiatan dilaksanakan dalam upaya tersedianya peralatan laboratorium yang berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi teknisnya sehingga data pengujian yang dihasilkan memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Pelaksanaan pada TW I (Maret) 2024	15,000,000	15,000,000	0	0	0	PPOT
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								1,005,714,167	201,518,834	331,338,250	267,514,250	205,342,833	
			Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Terlaksananya Distribusi Obat dan vaksin ke Kabupaten/Kota	kab/kota	3	4	4	3	Kegiatan dilaksanakan setiap ada permintaan obat dan bmhp ke Dinas Kesehatan Provinsi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota	526,714,167	105,342,834	158,014,250	158,014,250	105,342,833	SDK
			Biaya tambahan distribusi obat dan Vaksin ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Distribusi Obat dan vaksin ke Kabupaten/Kota	kab/kota	3	4	4	3	Kegiatan dilaksanakan setiap ada permintaan obat dan bmhp ke Dinas Kesehatan Provinsi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota	50,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	SDK
			Monev Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas (Kabupaten Kota)	Jumlah Puskesmas dan RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	kab/kota	3	4	4	3	Kegiatan dilaksanakan di 14 Kab/Kota guna monitoring terkait kendala sistem pelaporan SIMONA yang ada di daerah	140,000,000	28,000,000	42,000,000	42,000,000	28,000,000	SDK
			Koordinasi peningkatan distribusi kefarmasian ke kementerian kesehatan	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dokumen	-	1	-	1	Kegiatan dilaksanakan 2 kali ke pusat guna koordinasi meminta masukan terkait kendala sistem yang ada	54,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	SDK
			Analisa dan evaluasi ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi (NPP) di sarana pelayanan kesehatan	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi laporan sipnap sarana pelayanan kefarmasian di Dinas Kesehatan Kab/Kota	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Kegiatan dilaksanakan di 14 Kab/Kota guna monitoring terkait kendala pelaporan Sipnap yang ada di daerah	100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	SDK
			Pemeliharaan dan Revitalisasi Fasilitas Peralatan P4TO	Jumlah Peralatan P4TO yang dipelihara dan direvitalisasi	Unit	5	7	-	-	Pelaksanaan kegiatan pada TW I (Maret) & TW II (Juni) 2024	60,000,000	23,176,000	36,824,000	0	0	PPOT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Monev Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan di Kab./Kota	Persentase kesesuaian obat untuk Fasilitas kesehatan Kab/Kota sesuai dengan Formularium Nasional	Kabupate n	2	3	3	2	Kegiatan dilaksanakan di 10 Kabupaten guna monitoring terkait kendala sistem yang ada di daerah	75,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	15,000,000	SDK
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								2,836,577,633	260,000,000	838,671,933	1,099,671,933	638,233,767	
			Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan (Paket)	Tersedianya obat buffer dan bahan habis pakai	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat dan BMHP yang tidak ada tersedia di Kab/Kota	615,000,000	0	123,000,000	369,000,000	123,000,000	SDK
			Tim Perencanaan Obat Terpadu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat	Dokumen	-	-	-	1	Tersedianya dokumen perencanaan obat	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	SDK
			Pemusnahan Obat dan BHP	Terlaksananya kegiatan pemusnahan Obat dan BHP	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan pemusnahan Obat dan BMHP diadakan 1 kali menggunakan jasa pihak ketiga	50,000,000	0	0	20,000,000	30,000,000	SDK
			Pengadaan Obat Program Kesehatan Ibu (DAK NON FISIK)	Tersedianya obat program Kesehatan Ibu	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat program Kesehatan Ibu di Kab/Kota	109,475,625	0	43,790,250	43,790,250	21,895,125	SDK
			Pengadaan Obat Program kesehatan Anak (DAK NON FISIK)	Tersedianya obat program Kesehatan Anak	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat program Kesehatan Anak di Kab/Kota	208,971,038	0	83,588,415	83,588,415	41,794,208	SDK
			Pengadaan Obat Program Gizi (DAK NON FISIK)	Tersedianya obat program Gizi	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan obat program Gizi di Kab/Kota	808,233,170	0	323,293,268	323,293,268	161,646,634	SDK
			Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium di BLK	Tercapainya 50.000 pengujian/pemeriksaan sampel/specimen dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan bahan penunjang untuk pengambilan dan pengujian/pemeriksaan sampel/specimen selama 1 tahun	40,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	LABKESDA
			Pengadaan Bahan Kimia di BLK	Tercapainya 50.000 pengujian/pemeriksaan sampel/specimen dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan demi menunjang ketersediaan bahan penunjang untuk pengambilan dan pengujian/pemeriksaan sampel/specimen selama 1 tahun	994,897,800	250,000,000	250,000,000	250,000,000	244,897,800	LABKESDA
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								26,278,460,945	6,216,060,445	7,878,001,486	6,776,983,320	5,407,415,694	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								1,400,000,000	217,308,436	334,250,281	126,148,485	722,292,798	
			Tim Terpadu Krisis Kesehatan (Tim)	Terlayannya Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang	233 455	233 455	2334 55	233 455	Terlayannya Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,135,000,000	151,058,436	268,000,281	59,898,485	656,042,798	SEKRETARIAT
			Penguatan Siscobidkes SPM Kab/Kota Tk. Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penguatan Siscobidkes SPM Kab/Kota Tk. Provinsi	Orang	-	-	34	-	Terlaksananya kegiatan Penguatan Siscobidkes SPM Kab/Kota Tk. Provinsi	165,000,000	41,250,000	41,250,000	41,250,000	41,250,000	SEKRETARIAT
			Buffer Stock PMT Ibu Hamil & BALITA (Bencana)	Tersedianya Buffer Stock PMT Ibu Hamil & BALITA (Bencana)	Kg	-	-	-	678	Tersedianya Buffer Stock PMT Ibu Hamil & BALITA (Bencana)	50,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	SEKRETARIAT
			KIT PPAM Kespro Bencana	Tersedianya KIT PPAM Kespro Bencana	Paket	-	-	-	54	Tersedianya KIT PPAM Kespro Bencana	50,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	SEKRETARIAT
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa								326,784,178	59,053,200	85,329,800	89,347,978	93,053,200	
			Tim terpadu kejadian luar biasa (KLB) Tingkat Provinsi (tim)	Terlayannya Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Orang	285 8	285 8	2858	285 9	Terlayannya Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	250,000,000	39,857,155	66,133,755	70,151,935	73,857,155	SEKRETARIAT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana	Dokumen	3	3	3	3	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) disangka/KLB, wabah dan bencana	76,784,178	19,196,045	19,196,045	19,196,045	19,196,045	SEKRETARIAT
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak								1,473,276,775	348,068,970	766,554,736	85,261,000	273,392,069	
			Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita (OT)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Kab/ Kota	8	4	-	-	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balitasudah dilaksanakan di 14 Kabupaten/ Kota	160,000,000	102,981,195	57,018,805	0	0	KESMAS
			Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Dokumen	1	-	-	-	Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga direncanakan pada TW III bulan September dengan mengundang Penanggung Jawab dan Pengelola Program Kesga dari 14 Kabupaten/ Kota	150,000,000	150,000,000	0	0	0	KESMAS
			Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Jumlah orang yang melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga ke Pusat	Dokumen	1	-	1	-	Konsultasi dan Koordinasi Program Kesga sudah dilaksanakan sebanyak 5 OT	50,000,000	21,540,000	0	28,460,000	0	KESMAS
			Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Jumlah Puskesmas membina sekolah minimal 4x dalam setahun	Dokumen	6	4	4	-	Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja sudah dilaksanakan di 8 Kabupaten, sisanya direncanakan akan dilaksanakan pada TW II ini	184,547,775	73,547,775	83,250,000	27,750,000	0	KESMAS
			Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting (DAK NON FISIK)	Terlaksananya Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting (DAK NON FISIK)	Dokumen	-	1	-	1	Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting sudah dilaksanakan 1x, dan untu rapat kedua direncanakan akan dilaksanakan pada bulan oktober	613,444,000	0	340,051,931	0	273,392,069	KESMAS
			Pertemuan evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, stunting) (DAK NON FISIK)	Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat pendek) di Kab/kota 15.34% di tahun 2024	Laporan	-	1	1	-	Terlaksananya kegiatan evaluasi lintas sektor kesehatan Ibu dan anak termasuk masalah gizi, sebanyak 2 kali	315,285,000	0	286,234,000	29,051,000	0	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif								135,000,000	0	0	81,849,600	53,150,400	
			Monev Kespro	Monitoring dan evaluasi kesehatan reproduksi di Kalimantan Tengah	Kab/Kota	-	-	8	6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kesehatan reproduksi kesehatan keluarga di daerah	135,000,000	0	0	81,849,600	53,150,400	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut								320,000,000	16,056,000	303,944,000	0	0	
			Sosialisasi/ Advokasi/ Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia (HLUN/ LS)	Jumlah laporan hasil Sosialisasi/Advokasi/Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia	Laporan	-	1	-	-	Merencanakan dan melaksanakan Sosialisasi/Advokasi/Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia	70,000,000	0	70,000,000	0	0	KESMAS
			Pelayanan Operasi Katarak (kab/kota)	Jumlah laporan hasil pelayanan operasi katarak	Laporan	-	1	-	-	Merencanakan dan melaksanakan pelayanan operasi katarak	250,000,000	0	250,000,000	0	0	YANKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								750,000,000	0	190,875,000	190,135,000	368,990,000	
			Penyuluhan Deteksi Dini Stunting bagi Kader Posyandu	Presentase anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	OT	27	14	-	11	Terlaksananya semua kegiatan pemberian MP-ASI di 14 kabupaten/kota	200,000,000	0	112,722,680	87,277,320	0	KESMAS
			Konsultasi Program Gizi	Persentase Remaja Puteri mengkonsumsi TTD	OT	-	5	2	-	Koordinasi dengan pengelola program baik di pusat maupun kab/kota	50,000,000	0	25,932,320	0	24,067,680	KESMAS

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan Surveilans Gizi	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	OT	8	17	11	12	Sosialisasi /koordinasi program ASI Eksklusif	150,195,000	0	19,920,000	33,357,680	96,917,320	KESMAS
			Pertemuan Surveilans GKIA Bagi Petugas GKIA di 14 Kab/Kota	Persentase ibu Hamil KEK mendapat asupan gizi	14 kab/kota	0	0	7	7	Sosialisasi program PMT Lokal	175,000,000	0	0	37,500,000	137,500,000	KESMAS
			Money Manajemen Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Balita Stunting	Persentase ibu Hamil mengkonsumsi TTD selama kehamilan	74 OT	13	9	30	22	Sosialisasi program Pemberian TTD bagi Ibu Hamil	174,805,000	0	32,300,000	32,000,000	110,505,000	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								240,452,220	49,948,100	83,236,000	66,559,120	40,709,000	
			Senam jumat pagi bersama ASN dan tenaga kontrak	Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	Dokumen	8 kali	7 kali	8 kali	8 kali	Melaksanakan senam jumat pagi bersama ASN dinkes dan tenaga kontrak	10,000,000	0	4,860,000	0	5,140,000	KESMAS
			Konsultasi Ke Pusat Terkait Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	Laporan		1 kali			Konsultasi program kesehatan kerja dan olahraga	12,802,000	0	12,802,000	0	0	KESMAS
			Pemeriksaan kebugaran jasmani dengan metode aplikasi SIPGAR utk ASN Dinkes dan OPD lainnya	Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Melaksanakan pemeriksaan kebugaran jasmani dengan metode aplikasi Sipgar untuk ASN Dinkes da OPD lainnya	24,186,001	6,272,001	6,142,000	5,630,000	6,142,000	KESMAS
			Monitoring dan koordinasi / Pendampingan pelaksanaan Germas pada kelompok olahraga	Persentase puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	Dokumen	5 kab	4 kab	6 kab	-	Melaksanakan monitoring dan koordinas untuk pendampingan Germas pada kelompok olahraga	123,464,099	43,676,099	37,442,000	19,320,000	23,026,000	KESMAS
			Monitoring dan evaluasi MBH / Perusahaan peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan dan keluarganya	Jumlah kab/kota yang melakukan kebijakan germas	Dokumen	-	3 kab	5 kab	-	Melaksanakan money GP2SP di perusahaan yg peduli pekerja perempuan	70,000,120	0	21,990,000	41,609,120	6,401,000	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								360,000,000	42,580,000	196,102,000	67,607,000	53,711,000	
			Pendampingan intervensi kesehatan lingkungan	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Intervensi Kesehatan Lingkungan	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Melaksanakan kegiatan pendampingan Intervensi kesling dilaksanakan setiap bulannya ke kab/kotanya berdasarkan analisis dari masing -masing indikator program	120,000,000	33,860,000	30,990,000	27,575,000	27,575,000	KESMAS
			Konsultasi dan koordinasi program Kesehatan Lingkungan ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program kesehatan lingkungan ke kementerian kesehatan RI	OT	-	-	4	2	Kegiatan konsultasi dan koordinasi dilaksanakan di TW III	40,608,000	0	0	27,072,000	13,536,000	KESMAS
			Orientasi Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Bagi petugas kabupaten/ kota dan Puskesmas se Kalimantan Tengah	Terlaksananya orientasi penyelenggaraan Kesehatan lingkungan bagi petugas kab/kota dan puskesmas	Laporan	1	1	1	1	Pada Kegiatan Orientasi ini ada 2 kegiatan yaitu : berupa pertemuan atau Orientasi Penyelenggaraan kesling bagi petugas kab/kota & Puskesmas kegiatan di Provinsi pada triwulan II, kegiatan ke 2 yaitu Money ke 11 kab/kota yg dilaksanakan oleh petugas pengelola program Penyehatan Lingkungan dan Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Kalteng dari Triwulan I - IV	199,392,000	8,720,000	165,112,000	12,960,000	12,600,000	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								575,000,000	140,087,618	168,261,905	163,761,905	102,888,571	
			Pergerakan Massa Dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Pergerakan massa dalam mendukung implementasi gerakan masyarakat hidup sehat	Kali	1	1	1	1	Melaksanakan penggerakan masyarakat di Tingkat Provinsi dan monitoring terkait pelaksanaan Germas di daerah	250,000,000	35,714,285	71,428,572	71,428,572	71,428,571	KESMAS
			Penyediaan Media dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan terkait Germas	Terlaksananya layanan media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi kesehatan terkait Germas	Layanan	1	2	-	-	Menyiapkan dan menyebarkan media luar ruang sesuai kebutuhan dan tema yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	150,000,000	46,040,000	38,500,000	34,000,000	31,460,000	KESMAS

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penggerakkan Masyarakat "Cegah Stunting Itu Penting"	Penggerakkan masyarakat "cegah stunting itu penting" dilaksanakan 3 kali	Kali	1	1	1	-	Melaksanakan penggerakkan dengan tema cegah stunting bagi sasaran sesuai kebutuhan di lapangan	175,000,000	58,333,333	58,333,333	58,333,333	0	KESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya								168,452,250	1,500,000	84,281,592	56,656,667	26,013,991	
			Sosialisasi, Pelaksanaan BUDE JAMU dan Evaluasi dalam rangka mendukung GERMAS di Prov/Kab/Kota (P4TO)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan 3 kali & dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan ke masyarakat, terutama murid SMA di Kota P. Raya terkait memperkenalkan ramuan tradisional khas Kalteng	50,000,000	0	16,666,667	16,666,667	16,666,666	PPOT
			Pengolahan Tanaman Tradisional Menjadi Jamu Skala Laboratorium P4TO	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan 5 kali mengolah ramuan jamu skala laboratorium terdiri dari 7 ramuan dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan ke masyarakat beberapa ramuan tradisional sebagai welcome drink terutama ketika ada event provinsi berkoordinasi dengan lintas sektor	15,000,000	0	10,800,000	2,800,000	1,400,000	PPOT
			Pengumpulan tanaman obat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan 11 kali pada 5 kab/kota untuk mendapatkan tanaman lokal wisdom daerah dalam mempersiapkan etalase tanaman di UPT PPOT berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program, lintas bidang, pelaku usaha obat tradisional	55,000,000	1,500,000	25,750,000	25,750,000	2,000,000	PPOT
			Penapisan tanaman obat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	1	-	1	Kegiatan rapat dilaksanakan 2 kali di P.Raya untuk inventarisasi tanaman lokal wisdom daerah serta persiapan mapping tanaman obat daerah dalam mempersiapkan buku kumpulan tanaman dengan berkoordinasi dengan lintas sekte dan lintas program	10,000,000	0	4,892,675	0	5,107,325	PPOT
			Konservasi tanaman berkhasiat dalam upaya persiapan etalase tanaman obat di UPT PPOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	1	1	1	Kegiatan dilaksanakan 5 kali pada 4 kab/kota untuk mendapatkan tanaman lokal wisdom daerah dalam mempersiapkan etalase tanaman di UPT PPOT	24,000,000	0	11,720,000	11,440,000	840,000	PPOT
			Pemberdayaan masyarakat melalui konservasi tanaman obat untuk menunjang penyediaan bahan baku produksi obat tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	1	-	-	Kegiatan pertemuan dilaksanakan 1 kali di P.Raya dengan melibatkan pelaku usaha obat tradisional di Pasar Kahayan	14,452,250	0	14,452,250	0	0	PPOT
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								1,163,478,096	261,496,430	276,479,371	398,700,930	226,801,365	
			Penguatan Penemuan dan Tatalaksana kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten	Jumlah Kab/kota yang angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90% (kab/kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Kegiatan monitoring penemuan angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90% (kab/kota)	30,000,000	12,000,000	6,000,000	12,000,000	0	P2P

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan	Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10%	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Kegiatan monitoring di daerah terkait risiko penularan filariasis yang harus kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10%	58,040,449	8,291,493	16,582,986	24,874,472	8,291,498	P2P
			Pemantauan dan Pengawasan Layanan LROA (Layanan Rehidrasi Oral Aktif)	Meningkatnya jumlah pengetahuan pengelola program Diare, Tyfoid dan Hepatitis (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Peningkatan pengetahuan pengelola program Diare, Tyfoid dan Hepatitis	35,000,000	5,755,000	11,810,000	12,580,000	4,855,000	P2P
			Pemantauan dan Pengawasan Petugas Pengelola dalam Tatalaksana ISPA	Terlaksananya Koordinasi dengan petugas pengelola dalam tatalaksana ISPA (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Pelaksanaan Koordinasi dengan petugas pengelola dalam tatalaksana ISPA	35,000,000	5,755,000	6,955,000	17,435,000	4,855,000	P2P
			Pembinaan implementasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) di Kabupaten	Angka kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90% (Kab/kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Koordinasi dalam angka penemuan kesembuhan dan angka keberhasilan pengobatan TB 90%	91,560,000	22,100,000	20,260,000	33,150,000	16,050,000	P2P
			Monitoring Utilisasi TCM untuk diagnosis TB	Penggunaan TCM untuk penegakan diagnosis TB >50%	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Daerah dengan Penggunaan TCM untuk penegakan diagnosis TB >50%	35,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	P2P
			Assesment dan pembinaan sertifikasi bebas frambusia di kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota Bebas Frambusia dan melaksanakan surveilans frambusia	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Assesment kabupaten/Kota Bebas Frambusia dan melaksanakan surveilans frambusia	25,000,000	7,684,000	7,684,000	7,684,000	1,948,000	P2P
			Penilaian Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Kegiatan penemuan kasus angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun	47,464,000	9,492,800	14,985,600	13,985,600	9,000,000	P2P
			Bimbingan Teknis Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis	Jumlah Kab/Kota yang risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10% (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Koordinasi risiko penularan filariasis kurang dari 1 % dan reduksi kecacingan di bawah 10%	40,000,600	6,000,000	10,000,000	13,000,600	11,000,000	P2P
			Penyelidikan Epidemiologi DBD	Angka Bebas Jentik di Kabupaten meningkat (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Angka Bebas Jentik di Kabupaten meningkat (Kabupaten Kota)	50,000,000	16,560,000	8,280,000	16,880,000	8,280,000	P2P
			Penguatan dan pengendalian teknis arbovirosis	Terselenggaranya koordinasi dan penguatan pengendalian wolbachia (Provinsi)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Terselenggaranya koordinasi dan penguatan pengendalian wolbachia (Provinsi)	75,000,000	18,750,000	15,588,695	37,500,000	3,161,305	P2P
			On The Job Training Program HIV AIDS dan PIMS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat melaksanakan tes dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat melaksanakan tes dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS	50,000,000	9,000,000	10,500,000	15,500,000	15,000,000	P2P
			Konsultasi bidang P2p ke kementerian kesehatan RI/Dinkes Provinsi Prioritas	Terselenggaranya koordinasi dan penguatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit	Provinsi/Pusat	1	1	1	1	Terselenggaranya koordinasi dan penguatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit	125,976,000	31,494,000	31,494,000	23,580,000	39,408,000	P2P
			Pengawasan ke Kabupaten dan Kota yang Melaksanakan Kebijakan KTR 100% di 7 Tatanan	Jumlah kab/kota yang melaksanakan implementasi KTR di 7 tatanan	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melaksanakan implementasi KTR di 7 tatanan	69,041,047	17,561,047	17,160,000	17,160,000	17,160,000	P2P
			Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40 % populasi	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40 % populasi	50,000,000	10,400,000	12,800,000	15,600,000	11,200,000	P2P
			Monev Deteksi dini Katarak di Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada 40% populasi (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada 40% populasi (Kabupaten Kota)	65,000,000	14,080,000	14,080,000	28,480,000	8,360,000	P2P

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pertemuan Rujukan kasus Deteksi Dini Iva dan SADANIS di Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun (Kabupaten Kota)	65,000,000	14,080,000	14,080,000	28,480,000	8,360,000	P2P
			Koordinasi Pelaksanaan Gangguan Diabetes Melitus (DM) dan Gangguan Metabolik (Kabupaten Kota)	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada ≥ 80 % populasinya	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada ≥ 80 % populasinya	132,000,000	25,413,090	28,641,090	37,993,258	39,952,562	P2P
			Sosialisasi Deteksi Dini IVA dan Sadanis bagi Tenaga Kesehatan (Kabupaten)	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun	Kabupaten/Kota	3	4	4	3	Jumlah kab/kota yang melakukan deteksi dini pada ≥ 80 % populasi usia 30-50 tahun	75,000,000	17,080,000	14,880,000	33,120,000	9,920,000	P2P
			Pengiriman spesimen PD3I dan lainnya ke laboratorium nasional regional/rujukan (DAK NON FISIK)	Jumlah spesimen PD3I yang dilakukan pemeriksaan	Dokumen	1	-	-	-	Spesimen PD3I yang dilakukan pemeriksaan	9,396,000	0	4,698,000	4,698,000	0	P2P
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								60,000,000	25,350,909	29,280,000	5,369,091	0	
			Monev Prog Haji	Jumlah kab/kota yang dilakukan monev haji	Kabupaten	3	4	5	-	Jumlah kab/kota yang dilakukan monev haji	60,000,000	25,350,909	29,280,000	5,369,091	0	P2P
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa								50,000,000	9,000,000	9,000,000	10,767,575	21,232,425	
			Koordinasi pelayanan kesehatan jiwa dan napza di kabupaten kota	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan layanan	Kabupaten	3	4	5	-	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan layanan	50,000,000	9,000,000	9,000,000	10,767,575	21,232,425	P2P
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								14,941,819,278	3,671,894,819	3,691,134,820	4,526,134,820	3,052,654,819	
			Monitoring Jaminan Kesehatan ke Kab/Kota	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev jaminan kesehatan	Kabupaten	3	4	5	-	Merencanakan dan melaksanakan monev JKN ke 13 kab.	105,000,000	20,190,000	39,430,000	44,430,000	950,000	YANKES
			Sinkronisasi dan Konsolidasi Program JKN	Jumlah laporan hasil sinkronisasi dan konsolidasi Program JKN	Laporan	-	-	2	-	Merencanakan dan melaksanakan sinkronisasi dan konsolidasi Program JKN ke Kemenkes	70,000,000	0	0	70,000,000	0	YANKES
			Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan JKN	Dokumen	-	-	1	-	Merencanakan dan melaksanakan pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN tingkat Provinsi	160,000,000	0	0	160,000,000	0	YANKES
			Premi Penerima bantuan Iuran (PBI) JKN	Jumlah peserta PBI di Prov Kalteng	Orang	1,56 5,91 1	1,5 65, 911	1,82 3,20 1	1,30 8,62 1	Melakukan rekon peserta PBI dengan BPJS serta melakukan pembayaran premi PBI	14,606,819,278	3,651,704,819	3,651,704,820	4,251,704,820	3,051,704,819	YANKES
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan								898,778,000	92,768,455	292,147,000	186,240,909	327,621,636	
			Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan OJT Pencatatan Pelaporan Surveilans Epidemiologi	Daerah yang secara cepat melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Daerah yang secara cepat melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon	70,713,000	19,228,455	10,200,000	19,600,000	21,684,545	P2P
			Pelacakan Kasus Penyakit Infeksi Emerging (PIE)	Berkurangnya kejadian penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Berkurangnya kejadian penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat	65,545,000	13,400,000	13,900,000	19,600,000	18,645,000	P2P
			Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Provinsi	-	-	1	-	Terlaksananya koordinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	189,105,000	0	189,105,000	0	0	P2P
			Pelacakan Kasus Kontak dan Kunjungan Ulang Penyakit Menular PD3I (DAK NON FISIK)	Untuk mendapatkan kasus/kontak yang adekuat	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Untuk mendapatkan kasus/kontak yang adekuat	71,400,000	12,800,000	12,400,000	28,090,909	18,109,091	P2P
			Verifikasi Signal Surveilans PD3I	Jumlah daerah yang melakukan sistem kewaspadaan dini dan respon	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Jumlah daerah yang melakukan sistem kewaspadaan dini dan respon	57,120,000	11,920,000	9,200,000	25,800,000	10,200,000	P2P

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelidikan Epidemiologi Malaria (DAK NON FISIK)	Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Jumlah Kab/kota yang angka kesakitan malaria (API/Annual Parasite Incidence) menurun (Kabupaten Kota)	43,290,000	6,400,000	9,400,000	18,290,000	9,200,000	P2P
			Pelacakan Kontak Penyakit Influenza Like Illnes (ILI), Jaundice, Hand Foot, and Mouth Disease (HFMD) dan Penyakit Tidak Lazim (DAK NON FISIK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyebaran kasus dan temuan kasus yang didapatkan	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyebaran kasus dan temuan kasus yang didapatkan	67,340,000	12,800,000	12,400,000	29,740,000	12,400,000	P2P
			Penyelidikan Epidemiologi Zoonosis (DAK NON FISIK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Rabies (Pencegahan dan Pengendalian kasus GHPR) (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Rabies (Pencegahan dan Pengendalian kasus GHPR) (Kabupaten Kota)	43,290,000	6,600,000	10,890,000	19,600,000	6,200,000	P2P
			Penyelidikan Epidemiologi Kusta dan Frambusia (DAK NON FISIK)	Kasus kusta tanpa cacat (Kabupaten Kota)	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Kasus kusta tanpa cacat (Kabupaten Kota)	48,100,000	9,620,000	9,620,000	9,620,000	19,240,000	P2P
			Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons) (DAK NON FISIK)	Terlaksananya Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons)	Dokumen	-	-	-	1	Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons) dilaksanakan dalam bentuk Pertemuan dengan mengundang Dinkes Kab/ Kota, OP, LS terkait dan akan dilaksanakan pada TW IV	194,675,000	0	0	0	194,675,000	KESMAS
			Konsultasi ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi	Koordinasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal	Provinsi/Pusat	-	1	1	-	Koordinasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal	48,200,000	0	15,032,000	15,900,000	17,268,000	P2P
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota								1,398,670,700	758,945,399	327,759,050	245,322,430	66,643,821	
			Monitoring, evaluasi pelaksanaan program (Kali)	Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan transformasi kesehatan	OT	-	20	10	9	Fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan transformasi kesehatan	137,865,000	0	68,180,000	42,954,000	26,731,000	SEKRETARIAT
			Rapat kerja Kesehatan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (orang)	Jumlah Kebijakan bidang kesehatan yang tersinergitas antar bidang dan program pada kab/kota (orang)	Orang	250	-	-	-	Kebijakan bidang kesehatan yang tersinergitas antar bidang dan program pada kab/kota (orang)	723,135,700	723,135,700	0	0	0	SEKRETARIAT
			Koordinasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab./Kota	Jumlah kab/kota yang memiliki layanan kesehatan standar (Kab/kota)	Kabupaten/Kota	-	3	8	3	Kab/kota yang memiliki layanan kesehatan standar (Kab/kota)	141,320,000	0	29,760,800	83,501,234	28,057,966	SEKRETARIAT
			Pemantauan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan (Kab/kota)	Jumlah kab/kota yang melaksanakan DAK bidang kesehatan sesuai ketentuan (kab/kota)	Kabupaten/Kota	-	7	4	3	Kab/kota yang melaksanakan DAK bidang kesehatan sesuai ketentuan (kab/kota)	113,850,000	0	56,925,000	45,070,145	11,854,855	SEKRETARIAT
			Fasilitasi Adinkes	Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi pelaksanaan program kesehatan	Kabupaten/Kota	-	6	5	3	Fasilitasi Adinkes ke Kab/Kota	100,000,000	0	85,000,000	15,000,000	0	SEKRETARIAT
			Penggerakan masyarakat dalam mendukung bumi sehat	Jumlah dokumen Inovasi Dinas Kesehatan yang tersusun	Dokumen	-	-	1	-	Melakukan penggerakan masyarakat dalam mendukung bumi sehat	110,621,700	35,809,699	35,000,000	39,812,001	0	SEKRETARIAT
			Fasilitasi Inovasi Dinkes	Jumlah dokumen Inovasi Dinas Kesehatan yang tersusun	Dokumen	-	-	1	-	Melakukan fasilitasi inovasi Dinkes	71,878,300	0	52,893,250	18,985,050	0	SEKRETARIAT
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan								1,574,000,000	137,946,500	884,883,500	426,641,500	124,528,500	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelayanan Kesehatan Lapangan (Kegiatan)	Jumlah laporan kegiatan tim pelayanan kesehatan lapangan	Laporan	-	-	-	1	Melaksanakan pelayanan kesehatan lapangan	464,000,000	33,086,500	124,793,500	229,971,500	76,148,500	YANKES
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mutu fasyankes FKTP	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	Kabupaten	2	4	3	1	Merencanakan dan melaksanakan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	100,000,000	20,190,000	39,430,000	29,810,000	10,570,000	YANKES
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mutu fasyankes FKRTL	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	Kabupaten	2	4	3	1	Merencanakan dan melaksanakan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKRTL	100,000,000	20,190,000	39,430,000	29,810,000	10,570,000	YANKES
			Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Cluster Binaan /Tim pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPCB/TPMDK)	Jumlah Laporan hasil monev Tim Pembina Cluster Binaan /Tim pembina Mutu Dinas Kesehatan	Laporan	1	1	1	1	Merencanakan dan melaksanakan monev Tim Pembina Cluster Binaan /Tim pembina Mutu Dinas Kesehatan	200,000,000	49,500,000	74,450,000	73,750,000	2,300,000	YANKES
			Bimbingan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Kabupaten yang telah dilaksanakan bimbingan dan evaluasi pelayanan kesehatan primer	Kabupaten	4	3	2	-	Merencanakan dan melaksanakan Bimbingan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer ke 9 Kabupaten	100,000,000	0	42,320,000	32,740,000	24,940,000	YANKES
			Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan	Laporan	-	1	-	-	Merencanakan dan melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan	150,000,000	0	150,000,000	0	0	YANKES
			Monitoring dan Evaluasi Layanan Unit Transfusi Darah Daerah	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev layanan UTD daerah	Kabupaten	2	5	4	-	Merencanakan dan melaksanakan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKTP	100,000,000	14,980,000	54,460,000	30,560,000	0	YANKES
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan Unit Transfusi Darah Daerah	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan UTD Daerah	Laporan	-	1	-	-	Merencanakan dan melaksanakan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKTP	180,000,000	0	180,000,000	0	0	YANKES
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik di Kalteng	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik Daerah	Laporan	-	1	-	-	Merencanakan dan melaksanakan monev penyelenggaraan mutu fasyankes FKTP	180,000,000	0	180,000,000	0	0	YANKES
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota								334,948,998	84,896,233	83,097,066	91,160,525	75,795,174	
			Evaluasi Manajemen Pelayanan Imunisasi di Fasyankes	Pemantauan pelaksanaan imunisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan	Kabupaten/Kota	1	2	2	1	Pemantauan pelaksanaan imunisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan	28,672,800	7,149,700	0	14,997,825	6,525,275	P2P
			Manajemen Supervisi Sportif/SS Dalam Pelaksanaan Imunisasi	Terlaksananya manajemen supervisi pada kab/kota dan puskesmas 14 kab/kota	Kabupaten/Kota	2	2	3	1	Manajemen supervisi imunisasi pada kab/kota dan puskesmas	36,406,000	6,092,700	313,300	12,185,400	17,814,600	P2P
			Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Jumlah dugaan kasus KIPI yang dapat ditangani atau tercatat	Kabupaten/Kota	2	3	2	2	Pelaksanaan surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi di daerah	42,208,000	11,837,700	7,092,400	10,092,700	13,185,200	P2P
			Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Pelaksanaan Imunisasi Rutin	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Akselerasi kegiatan imunisasi dalam rangka evaluasi dan validasi data capaian imunisasi	Laporan	-	1	-	-	Melaksanakan Akselerasi kegiatan imunisasi dalam rangka evaluasi data capaian imunisasi	97,895,999	41,386,433	56,509,566	0	0	P2P
			Monitoring Pelaksanaan Introduksi Vaksin Baru	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I	Kabupaten/Kota	2	4	5	3	Kegiatan monitoring pelaksanaan imunisasi antigen baru	73,522,999	7,629,700	16,721,800	27,901,400	21,270,099	P2P
			Supervisi dan Monitoring dalam Rangka Validasi Data UCI (Universal Child Immunization) dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	Data hasil pelaksanaan BIAS dan analisa UCI desa	Kabupaten/Kota	1	4	4	2	Data hasil pelaksanaan BIAS dan analisa UCI desa	56,243,200	10,800,000	2,460,000	25,983,200	17,000,000	P2P
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								52,800,450	0	15,000,000	30,000,000	7,800,450	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang dilakukan jejaring Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan	Kabupaten	-	2	3	1	Melaksanakan jejaring pusat komando PSC 119	52,800,450		15,000,000	30,000,000	7,800,450	YANKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								55,000,000	15,140,000	24,570,000	15,290,000	0	
			Analisis Hasil PIS-PK Terintegrasi Lintas Program di Tingkat Provinsi	Jumlah kabupaten yang mendapatkan analisis hasil PIS-PK Terintegrasi	Kabupaten	2	3	2	-	Merencanakan dan melaksanakan Analisis Hasil PIS-PK Terintegrasi Lintas Program ke kabupaten	55,000,000	15,140,000	24,570,000	15,290,000	0	YANKES
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								380,000,000	32,156,546	48,234,819	251,373,819	48,234,816	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								380,000,000	32,156,546	48,234,819	251,373,819	48,234,816	
			Penyusunan Buku Profil Kesehatan (BUKU)	Jumlah dokumen buku profil kesehatan dan buku saku kesehatan dinkes prov. kalteng yang tersusun tepat waktu (buku)	Dokumen	-	-	1	-	Melakukan penyusunan buku profil kesehatan dan buku saku kesehatan dinkes prov. kalteng yang tersusun tepat waktu	130,000,000	32,156,546	48,234,819	1,373,819	48,234,816	SEKRETARIAT
			Pertemuan PMKDR Tk. Provinsi	Terlaksananya pertemuan PMKDR Tk. Provinsi	Orang	-	-	32	-	Melaksanakan pertemuan PMKDR Tk. Provinsi	165,000,000	0	0	165,000,000	0	SEKRETARIAT
			Peningkatan Kapasitas pengelola data profil kesehatan	Terlaksananya pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN pemegang data profil kesehatan dan SIK	Orang	-	-	32	-	Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN pemegang data profil kesehatan dan SIK	85,000,000	0	0	85,000,000	0	SEKRETARIAT
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								453,919,048	91,727,757	121,722,121	189,671,438	50,797,732	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit								200,000,000	26,710,900	71,280,640	70,440,640	31,567,820	
			Monev Sistem Rujukan Terintegrasi (kabupaten kota)	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev Sistrute	Kabupaten/Kota	2	5	5	2	Merencanakan dan melaksanakan monev sistrute ke kabupaten	100,000,000	6,710,900	41,280,640	40,440,640	11,567,820	YANKES
			Monev dan Bimtek Manual Rujukan	Jumlah kabupaten yang dilakukan monev dan bimtek manual rujukan	Kabupaten	3	4	4	2 kab/1 kota	Merencanakan dan melaksanakan monev dan bimtek manual rujukan ke Kab/Kota	100,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	20,000,000	YANKES
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								253,919,048	65,016,857	50,441,481	119,230,798	19,229,912	
			Pemantapan Mutu Eksternal (PME) pengujian laboratorium klinik	Meningkatnya Parameter Laboratorium yang di ikut sertakan dalam Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Parameter	-	1 Laporan	1 laporan	-	Merencanakan dan melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal	40,000,000	40,000,000	0	0	0	LABKESDA
			Kontrol mutu pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Jumlah parameter Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang di ikutkan dalam Uji Banding setiap tahun	Parameter	-	-	1 Laporan	-	Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Kontrol Mutu	35,000,000	0	0	35,000,000	0	LABKESDA
			Akreditasi parameter pengujian laboratorium kesehatan masyarakat	Meningkatnya Parameter Ruang Lingkup Pengujian Laboratorium yang akan terakreditasi di UPT.Lab Kesehatan dan Kalibrasi Prov. Kal-Teng	Parameter	-	-	1 Laporan	-	Mempersiapkan dokumen pendukung akreditasi parameter laboratorium dan melaksanakan kegiatan akreditasi laboratorium dari lembaga Komite akreditasi Nasional	70,000,000	0	0	70,000,000	0	LABKESDA

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Audit Internal Laboratorium Klinik dan Kesmas	Audit Penerapan Pelaksanaan Dokumen Mutu oleh seluruh personil baik administratif maupun teknis dengan baik.	Dokumen	-	1	-	-	Merencanakan, membentuk tim Audit Internal dan melaksanakan kegiatan Audit Internal	10,000,000	0	10,000,000	0	0	LABKESDA
			Kaji Ulang Manajemen	Sistem Mutu oleh Seluruh Personel Teknis dan Administrasi di UPT Labkeskal secara terus menerus dengan baik dari Laporan KUM serta Sasaran Tindak lanjut Perbaikan/Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.	Dokumen	-	-	-	1	Merencanakan, mempersiapkan kegiatan yang akan dievaluasi pada akhir kegiatan dan melaksanakan Kaji Ulang Manajemen	10,000,000	0	0	0	10,000,000	LABKESDA
			Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium kesehatan	Semua sarana prasarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium kesehatan yang direncanakan tersedia	Dokumen	-	1	-	-	Melaksanakan dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Labkes	3,000,000	0	3,000,000	0	0	LABKESDA
			Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laboratorium Kesehatan	Semua limbah (limbah B3, sampah, limbah cair, limbah gas) yang dihasilkan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	3	3	3	3	Melaksanakan pemilahan, pengemasan, kemudian pengangkutan oleh pihak ketiga Semua limbah (limbah B3, sampah, limbah cair, limbah gas) yang dihasilkan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40,000,000	19,549,041	13,258,670	5,608,264	1,584,025	LABKESDA
			Pelayanan Pelanggan Laboratorium Kesehatan	Jumlah pengujian/pemeriksaan sampel/spesimen	Dokumen	1	1	1	1	Melaksanakan dan memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada pelanggan demi tercapainya penerimaan dan pemeriksaan sampel dan spesimen yang maksimal	42,919,048	5,467,816	21,182,811	8,622,534	7,645,887	LABKESDA
			Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) UPT P2OT	Jumlah Kegiatan Pengelolaan K3 yang dilaksanakan	Laporan	-	1	-	-	Melaksanakan kegiatan Workshop Pengenalan Tata Cara Penyusunan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Inhouse Training Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran. Kegiatan pada TW II (Mei) 2024	3,000,000	0	3,000,000	0	0	PPOT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											6,682,802,780	683,088,546	1,009,973,500	4,425,515,250	564,225,484	
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								5,303,000,000	348,528,000	735,994,500	3,891,361,250	327,116,250	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan								5,230,000,000	348,528,000	735,994,500	3,818,361,250	327,116,250	
			Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang diberi bantuan pendidikan di wilayah prov.kalteng	Orang	-	-	32	-	Merencanakan, membuat estimasi para dokter, berkoordinasi dan memonev pihak terkait	4,775,000,000	321,840,000	334,370,500	3,791,673,250	327,116,250	SDK
			Penilaian Nakes Teladan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat predikat tenaga kesehatan teladan se Kalteng	Orang	-	50	-	-	Merencanakan, penentuan juri dan panitia, menilai tatap muka, memonev peserta nakes teladan	455,000,000	26,688,000	401,624,000	26,688,000	0	SDK
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								73,000,000	0	0	73,000,000	0	
			Penilaian Puskesmas yang Memenuhi 9 Nakes	Jumlah daerah atau wilayah puskesmas yang memenuhi 9 nakes	Kabupaten/Kota	-	-	14	-	Merencanakan, penentuan juri dan panitia, menilai, memonev peserta	73,000,000	0	0	73,000,000	0	SDK

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN			INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							1,379,802,780	334,560,546	273,979,000	534,154,000	237,109,234	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan							661,000,000	50,356,000	22,902,000	397,304,000	190,438,000	
			Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan	Dokumen	-	-	-	1	Merencanakan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan kegiatan	162,000,000	0	0	0	162,000,000	SDK
			Peningkatan Kapasitas Puskesmas yang memenuhi 9 Nakes	Dokumen	-	-	1	-	Merencanakan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan kegiatan	140,000,000	0	0	140,000,000	0	SDK
			Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi dalam Pengelolaan Vaksin	Orang	5	-	-	-	Kegiatan dilaksanakan 1 kali di Instalasi Farmasi Pusat	50,000,000	50,000,000	0	0	0	SDK
			Peningkatan Kapasitas SDM UPT P2OT	Orang	-	1	5	1	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM sebanyak 7 orang, dgn 5 lokus, yaitu: Jawa Barat (1 org), Jawa Tengah (1 org), Jawa Timur (2 org), dan Jakarta (3 org)	60,000,000	356,000	22,902,000	20,304,000	16,438,000	PPOT
			Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi dokter umum, bidan dan perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	-	-	21	-	Melaksanakan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi dokter umum, bidan dan perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	237,000,000	0	0	237,000,000	0	BAPELKES
			Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan Bapelkes	Dokumen/ Laporan	-	-	-	1	Melaksanakan Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan Bapelkes pada 1 Lokus Puskesmas Lab. di Kota Palangka Raya	12,000,000	0	0	0	12,000,000	BAPELKES
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							718,802,780	284,204,546	251,077,000	136,850,000	46,671,234	
			Pertemuan Koordinasi Program Pengembangan SDM	Orang	-	30	-	-	Merencanakan, mengundang peserta kab/kota dan melaksanakan kegiatan	126,000,000	126,000,000	0	0	0	SDK
			Fasilitasi Koordinasi Program Dokter Internship Ke Kabupaten	Kabupaten/Kota	6	-	8	-	Merencanakan dan memonev	73,000,000	37,015,000	0	35,985,000	0	SDK
			Akreditasi Institusi Bapelkes	Dokumen	-	1	-	-	Melaksanakan Penilaian Akreditasi Institusi Bapelkes	94,000,000	30,523,000	63,477,000	0	0	BAPELKES
			Konsultasi Pusat (BAPELKES)	Orang	5	3	3	3	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang melaksanakan konsultasi ke Pusat guna meningkatkan Mutu Kediklatan dan terlaksananya Akreditasi Institusi	75,924,780	21,234,780	18,230,000	18,230,000	18,230,000	BAPELKES
			Evaluasi Pasca Pelatihan	Dokumen	-	-	7	-	Melaksanakan Evaluasi Pasca Pelatihan ke 7 Kab terpilih (Kab terdekat perjalanan <8 jam perjalanan) selanjutnya menyusun dokumen/ laporan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan yang sudah dilaksanakan sebagai data Akreditasi	50,000,000	0	0	28,383,766	21,616,234	BAPELKES
			Pengukuran Index Kepuasan Peserta Lath di Bapelkes	Dokumen	-	-	1	-	Melaksanakan Rapat dalam rangka Menyusun Laporan Pengukuran Index Kepuasan Peserta Lath	6,000,000	0	0	6,000,000	0	BAPELKES

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Workshop Pelaksanaan BLUD Institusi BAPELKES	Jumlah dokumen workshop pelaksanaan BLUD Institusi BAPELKES	Dokumen	1	-	-	-	Melaksanakan Workshop BLUD Institusi BAPELKES tentang teknis penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA), pelaporan keuangan melalui praktik bisnis yang baik, Perkada BLUD dll	15,000,000	15,000,000	0	0	0	BAPELKES
			Penyusunan Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	Jumlah Laporan Tahunan (Profil Bapelkes) yang tersusun	Dokumen	-	-	-	1	Menyusun Laporan Tahunan (Profil Bapelkes)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	BAPELKES
			Sinergitas Kediklatan Pelatihan Institusi Bapelkes ke Kab/ Kota	Jumlah Dinkes Kab/ Kota yang melaksanakan MoU terkait pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berjalan	Kabupate n/Kota	8	6	-	-	Melaksanakan pertemuan secara daring dengan 14 Kab/ Kota terkait inventarisir data informasi jumlah pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024, serta konsultasi ke pusat dalam rangka konsultasi program Kediklatan dan pelaporan pelaksanaan Diklat di UPT.Bapelkes Prov.Kalteng	90,000,000	46,248,000	43,752,000	0	0	BAPELKES
			Workshop BLUD UPT P2OT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	dok ume n	0		0	Kegiatan dilaksanakan pada TW I (Maret) & TW III (Sept) 2024 dan merupakan kegiatan dalam rangka penerapan BLUD dengan NS dari tenaga ahli terkait pengelolaan keuangan BLUD	15,000,000	7,358,766	0	7,641,234	0	PPOT
			Advokasi, Bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat (DAK NON FISIK)	Meningkatnya Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Dokumen	-	-	1	-	Tercapainya Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang sesuai standar Kementerian Kesehatan	167,878,000	825,000	125,618,000	40,610,000	825,000	KESMAS & LABKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											127,050,000	25,410,000	38,115,000	38,115,000	25,410,000	
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								127,050,000	25,410,000	38,115,000	38,115,000	25,410,000	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK								127,050,000	25,410,000	38,115,000	38,115,000	25,410,000	
			Pemeriksaan lapangan dalam rangka Penerbitan Izin PBF dan PAK	Jumlah sarana yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di beberapa PBF	19,320,000	3,864,000	5,796,000	5,796,000	3,864,000	SDK
			Monev Sarana dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Tindak Lanjut Penerbitan Izin PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah sarana yang dilaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Provinsi	Dokumen	-	-	-	1	Kegiatan monitoring dilaksanakan di beberapa PBF	107,730,000	21,546,000	32,319,000	32,319,000	21,546,000	SDK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											485,000,000	87,645,000	87,860,942	260,910,000	48,584,058	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								50,000,000	50,000,000	0	0	0	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								50,000,000	50,000,000	0	0	0	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETIL KEGIATAN				INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI / AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Konsultasi Implementasi Germas ke Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Jumlah tenaga Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi yang melaksanakan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI	6 OT	6	-	-	-	Petugas Sie.Promkes melaksanakan konsultasi dan/atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pusat	50,000,000	50,000,000	0	0	0	Promkes & PM
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								435,000,000	55,030,000	79,970,000	210,000,000	90,000,000	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM								435,000,000	55,030,000	79,970,000	210,000,000	90,000,000	
			Pendampingan dan Pembinaan UKBM dalam rangka Posyandu Aktif oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DWP Unit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kab/Kota yang menjadi sasaran pendampingan dan pembinaan UKBM dalam Rangka Posyandu Aktif oleh Dinkes Prov bersama DWP Unit Dinkes Prov.Kalteng	6 Kab/Kota	3	3	-	-	Pembinaan ke Puskesmas oleh Sie.Promkes dan ke sasaran lebih luas (Kader & sasaran masyarakat) melalui pemberdayaan masyarakat/mitra bersama DWP Unit Dinkes Prov.Kalteng ke beberapa daerah	65,000,000	32,500,000	32,500,000	0	0	Promkes & PM
			Seminar Kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	Jumlah kegiatan seminar kesehatan bagi Organisasi Wanita dalam Rangka HKN Tahun 2024	Kali	-	-	-	1	Melaksanakan seminar tema kesehatan bagi mitra Organisasi Wanita sebagai rangkaian HKN 2024	90,000,000	0	0	0	90,000,000	Promkes & PM
			Refreshing Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan refreshing Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Kali	-	-	1	-	Melaksanakan kegiatan apresiasi kader-kader berprestasi terpilih dari 14 Kako berupa KIE dan lomba-lomba antar kader	210,000,000	0	0	210,000,000	0	Promkes & PM
			Supervisi Fasilitatif Data UKBM	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan supervisi Fasilitatif Data UKBM	7 Kab/Kota	3	4	-	-	Tim Promkes langsung ke sasaran Puskesmas dan/atau langsung ke Kader Posyandu untuk melakukan supervisi terkait UKBM dan mempersiapkan penggabungan UKBM menuju layanan ILP siklus hidup	70,000,000	22,530,000	47,470,000	0	0	Promkes & PM

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan

Palangka Raya,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006



**PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI**

Sub. Bagian Penyusunan Program

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Nomor SOP

:

Tanggal Pembuatan

:

02 Januari 2023

Tanggal Revisi

:

31 Juli 2023

Tanggal Efektif

:

Disahkan oleh

:

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM

NIP. 19680807 200003 1 006

Nama SOP

:

Pengukuran Kinerja

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui Tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan Kinerja

Peralatan/ Perlengkapan

1. Berkas Persyaratan
2. Komputer, ATK

Pencatatan & Pendataan

Direkam/disimpan secara elektronik dan manual

No.	Kepala	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang	Tim LKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim LKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim LKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim LKIP menyiapkan metdodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim LKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Tim LKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	
7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Kepala Dinas	
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			

Palangka Raya, Juli 2023

Mengetahui :

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



**PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI**

Sub. Bagian Penyusunan Program

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Nomor SOP

:

Tanggal Pembuatan

:

02 Januari 2023

Tanggal Revisi

:

31 Juli 2023

Tanggal Efektif

:

Disahkan oleh

:

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM

NIP. 19680807 200003 1 006

Nama SOP

:

Pengumpulan Data Kinerja

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui Tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan Kinerja

Peralatan/ Perlengkapan

1. Berkas Persyaratan
2. Komputer, ATK

Pencatatan & Pendataan

Direkam/disimpan secara elektronik dan manual

SOP Pengumpulan Data Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	JF Adminkes	Sub Koordinator Bidang	Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/bidang/UPT						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi	1 hari	Disposisi	
2	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	120 menit	Lembar disposisi	
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	120 menit	Draft Laporan Kinerja	
4	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	120 menit	Draft Laporan Kinerja	
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 menit	Draft Laporan Kinerja	
6	Merekap laporan kinerja triwulan untuk menyusun laporan tahunan						Catatan Pembagian Tugas	2 hari	Disposisi	
7	Menyusun laporan kinerja tahunan						Data Laporan Kinerja Triwulan	120 hari	Lembar disposisi	
8	Mensosialisasikan laporan kinerja tahunan kepada pejabat terkait						Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 menit	Draft Laporan Kinerja	
9	Menyusun laporan kinerja tahunan secara final						Laporan Kinerja Triwulan	1 hari	Draft Laporan Kinerja	

Palangka Raya, Juli 2023

Mengetahui :
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 4270391 Laman www.dinkes.kalteng.go.id, Pos-el dinkes@kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 159 / TK-PP / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Membaca : a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencapaian target indikator derajat kesehatan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk mencapai persepsi maupun langkah selanjutnya
- b. dari setiap pelaksanaan program kesehatan di setiap jenjang administrasi;
- Bahwa untuk mencapai keberhasilan visi – misi Gubernur
- c. Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, maka perlu untuk membuat Laporan Kinerja Instansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 120/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi dan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

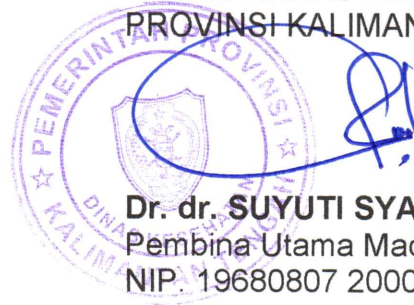
Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun bertugas mempersiapkan segala bahan dan literatur untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

- KETIGA : Pembiayaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

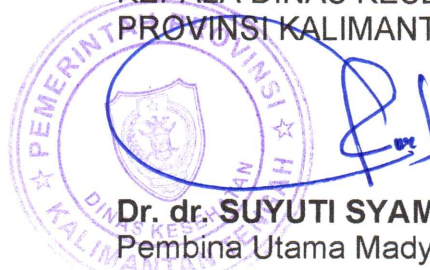
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : / TK-PP / III / 2024
TANGGAL : JANUARI 2024

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Penyusunan Program
Anggota : 1. Ashhabul Kahfi, SKM
2. Yuri Dartati, S.Kep., M.Kes
3. Arjan Arkasi, S.Kom., M.Kes
4. Lala Trisnani
5. Desi Adventie, SE
6. Ratih Puspita, S.Tr., Keb.,Bd
7. Sanurang Sanupati, S.Kep.Ners
8. Eka Novianty, SE

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 4270391 Laman www.dinkes.kalteng.go.id, Pos-el dinkes@kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 225.1 / TK-PP / I / 2024

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

- Menimbang :
- bahwa Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKIP);
 - bahwa Rencana Kerja Tahunan merupakan jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan Kinerja dengan sistem penganggaran. Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - bahwa indikator-indikator dari kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya;
 - bahwa untuk dapat mengukur capaian kinerja perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG "RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"**
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- KEDUA : Target Kinerja Tahun 2025 ini, merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan;
- KETIGA : Rencana Kerja Tahunan 2025 ini, merupakan bentuk komitmen bersama seluruh ASN Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai kinerja yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipantau melalui Rencana Kinerja Tahunan 2025 ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Kode Pos 73111

Telp/Fax (0536) 4270391

Email : dinkes@kalteng.go.id

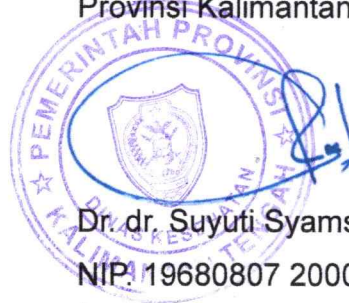
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT karena berkat-Nyalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Palangka Raya,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Struktur Organisasi	4
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	
A. Visi	13
B. Misi	13
C. Strategi	14
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama	15
BAB III PENUTUP	17

BAB I

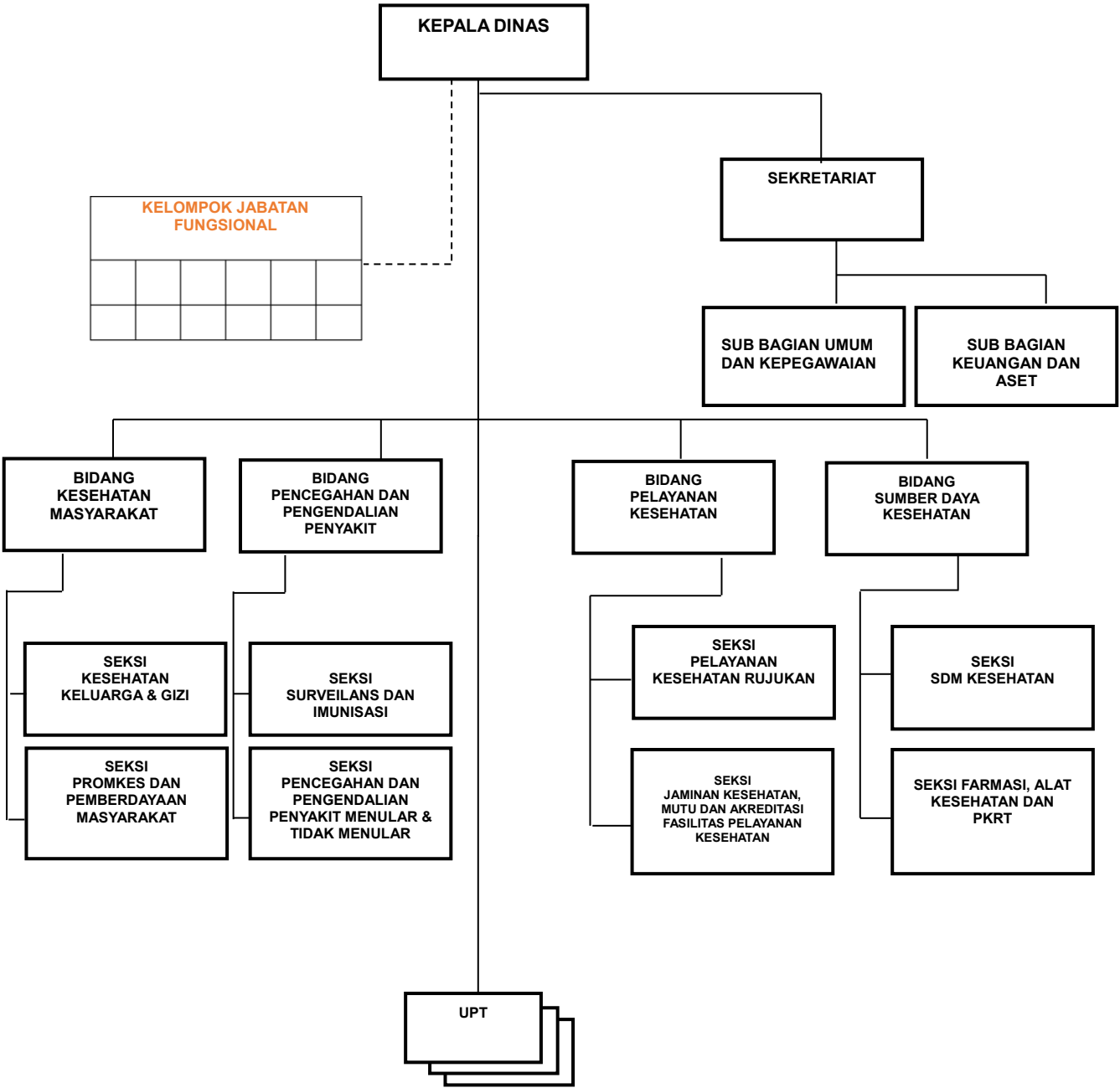
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sebagai penjabaran Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penetapan target sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dan merupakan dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Struktur Organisasi



C. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdapat tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dari masing-masing dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan. Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan serta membantu Kepala Dinas dalam memfasilitasi informasi publik;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Kesehatan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, keprotokolan arsip, informasi publik dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan penataan administrasi keuangan;
- g. Pembinaan dan penataan asset/barang milik daerah pada Dinas Kesehatan;
- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja, Olahraga dan pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, MATRA, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan,

pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan jaminan kesehatan, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- b. Seksi Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga.

7. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas: melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan Pemantapan Mutu Eksternal Mikrobiologi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rujukan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai Laboratorium Kesehatan;
- d. Pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
- f. Pelayanan pengujian higiene sanitasi;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;

- i. Pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
 - j. Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
 - k. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - l. Pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
 - m. Pelaksanaan pemasaran produk Balai Laboratorium Kesehatan;
 - n. Penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
 - o. Pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
 - p. Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
 - q. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Laboratorium Kesehatan; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
- Tugas: merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
- Fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan keterampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehatan;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelatihan Kesehatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Pusat Pengembangan Obat Tradisional

UPT-PPOT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan terkait penyediaan bahan baku Obat Tradisional dan Pengembangannya

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyuluhan, pengawasan, pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Daerah;
- b. Pemberian layanan penyediaan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar baik itu simplisia maupun produk jadi obat tradisional;
- c. Melaksanakan uji mutu dan kualitas bahan baku serta produk obat tradisional;
- d. Melaksanakan kegiatan kultur jaringan tanaman untuk melestarikan tanaman obat yang ada di Daerah;
- e. Melakukan budidaya tanaman obat tradisional serta pengumpulan tanaman obat tradisional di Daerah;
- f. Melakukan promosi produk obat tradisional Provinsi Kalimantan Tengah melalui produk jamu dan simplisia;
- g. Melaksanakan pengembangan dan penelitian tanaman obat asli Indonesia sebagai bahan baku obat tradisional terstandarisasi;
- h. Melaksanakan program saintifikasi jamu obat tradisional asli Indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

A. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2025, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

B. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

C. Strategi

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
4. Peningkatan pengendalian penyakit
5. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
6. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09.
2. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%.
3. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
4. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
5. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan OPD sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat OPD sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan naskah asli yang telah ditanda tangani oleh Gubernur

Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam lampiran Tahun 2025.

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

Sektor Kesehatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	70,74
2.	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Wasting Balita	Persen	7,0
		Persentase Balita Stunting (%)	Persen	14
3.	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	6,5
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	Indeks	125

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

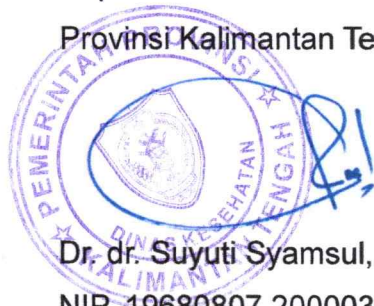
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang mencakup periode tahunan. Setiap tahun Dinas Kesehatan menyusun dokumen RKT yang dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta sebagai dasar kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Semoga dengan telah disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Palangka Raya,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya
Kode Pos 73111
Telp/Fax (0536) 4270391
Email: dinkes@kalteng.go.id

